



BADAN KEBIJAKAN FISKAL

KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



# LAPORAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 015

TAHUN ANGGARAN 2021 (AUDITED)



2021

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Kebijakan Fiskal adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Bagian Anggaran 015 Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kebijakan Fiskal. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan sebagai usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2022  
Kepala Badan Kebijakan Fiskal



Ditandatangani secara elektronik  
Febrio Nathan Kacaribu

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vi
Daftar Lampiran	vii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1. Dasar Hukum	8
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Badan Kebijakan Fiskal	8
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	11
A.4. Basis Akuntansi	12
A.5. Dasar Pengukuran	12
A.6. Kebijakan Akuntansi	12
A.7. Pengungkapan atas Pelaksanaan Kegiatan PEN BKF	20
A.8. Pengungkapan Capaian Kinerja BKF	21
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
B.1. Perubahan Pagu BKF	22
B.2. Pendapatan	22
B.3. Belanja	23
B.4. Catatan Penting Lainnya	28
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	33
C.1. Aset Lancar	33
C.2. Aset Tetap	35
C.3. Aset Lainnya	45
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	48
C.5. Ekuitas	48
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	49
D.1. Pendapatan Operasional	49
D.2. Beban Operasional	49
D.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	53
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
E.1. Ekuitas Awal	54
E.2. Surplus (Defisit) LO	54
E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan	54
E.4. Transaksi Antar Ekuitas	54
E.5. Kenaikan/Penurunan Eku	54
E.6. Ekuitas Akhir	54
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	55
F.1. Tuntutan Ganti Rugi	55
F.1. Kegiatan Prioritas Nasional BKF	57
F.1. Kegiatan PEN pada BKF	58



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## BADAN KEBIJAKAN FISKAL

GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO LANTAI 3 JL. DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3812203; FAKSIMILE (021) 3812763; LAMAN FISKAL.KEMENKEU.GO.ID

---

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Bagian Anggaran 015 Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) Badan Kebijakan Fiskal yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2022  
Kepala Badan Kebijakan Fiskal



Ditandatangani secara elektronik  
Febrio Nathan Kacaribu



## DAFTAR TABEL

No.		Halaman
1.	Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2021 dan 2020	1
2.	Tabel 2 Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2021 dan 2020	2
3.	Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	18
4.	Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap	19
5.	Tabel 5 Realisasi Kegiatan PC-PEN BKF TA 2021	21
6.	Tabel 6 Realisasi Output Strategis BKF TA 2021	21
7.	Tabel 7 Perubahan Anggaran BKF Per 31 Desember 2021	22
8.	Tabel 8 Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP	22
9.	Tabel 9 Perbandingan Realisasi PNBP Per 31 Desember 2021 dan 2020	23
10.	Tabel 10 Anggaran dan Realisasi Belanja per Kegiatan Tahun Anggaran 2021	23
11.	Tabel 11 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021	24
12.	Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2021 dan 2020	24
13.	Tabel 13 Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2021 dan 2020	25
14.	Tabel 14 Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2021 dan 2020	26
15.	Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2021 dan 2020	26
16.	Tabel 16 Pagu dan Realisasi Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 Per 31 Desember 2021 dan 2020	27
17.	Tabel 17 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2021 dan 2020	33
18.	Tabel 18 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2021 dan 2020	34
19.	Tabel 19 Rincian Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19 Per 31 Desember 2021	35
20.	Tabel 20 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2021	35

## DAFTAR TABEL

No.		Halaman
21.	Tabel 21 Rincian Tanah Per 31 Desember 2021	36
22.	Tabel 22 Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2021	36
23.	Tabel 23 Rincian Peralatan dan Mesin dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 Per 31 Desember 2021	40
24.	Tabel 24 Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2021	41
25.	Tabel 25 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2021 dan 2020	44
26.	Tabel 26 Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2021 dan 2020	45
27.	Tabel 27 Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2021 dan 2020	46
28.	Tabel 28 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per 31 Desember 2021	48
29.	Tabel 29 Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2021 dan 2020	49
30.	Tabel 30 Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2021 dan 2020	50
31.	Tabel 31 Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2021 dan 2020	50
32.	Tabel 32 Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2021 dan 2020	51
33.	Tabel 33 Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2021 dan 2020	51
34.	Tabel 34 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2021 dan 2020	52
35.	Tabel 35 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2021 dan 2020	52
36.	Tabel 36 Rincian Surplus/Defisit Per 31 Desember 2021 dan 2020	53
36.	Tabel 37 Realisasi Kegiatan PE-ICT BKF Per 31 Desember 2021	59

## DAFTAR GRAFIK

No		Halaman
1.	Grafik 1 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021	24

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
4. Laporan Operasional
5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Neraca
7. Neraca Percobaan
8. Memo Penyesuaian
9. Kertas Kerja Telaah
10. Surat Ijin Pembukaan Rekening
11. Berita Acara Pemeriksaan Realisasi Anggaran antara BKF dengan KPPN Jakarta II
12. Rekening Koran Per 31 Desember 2021
13. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
14. Berita Acara Rekonsiliasi BMN
15. Laporan Posisi BMN di Neraca
16. Laporan Persediaan
17. Laporan Pembantu Pengguna Barang Eselon I Intrakomptabel TA 2021
18. Laporan Pengguna Eselon I Ekstrakomptabel TA 2021
19. Laporan Pembantu Pengguna Barang Eselon I Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel TA 2021
20. Laporan Barang Pengguna Eselon I Aset Tak Berwujud TA 2021
21. Matrik Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK
22. Nota Kesepakatan Angka Asersi Final



## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp722.211.705 Pada Tahun Anggaran 2021 Badan Kebijakan Fiskal tidak memiliki estimasi pendapatan.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp76.812.168.878 atau mencapai 89,21 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp86.106.252.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

*Tabel 1*  
*Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran*  
*Per 31 Desember 2021 dan 2020*

Uraian	31 DES 2021			31 DES 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara		722.211.705	-	593.781.241
Belanja Negara	86.106.252.000	76.812.168.878	89,21	76.978.687.877

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp23.405.606.408 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp910.640.691, Aset Tetap sebesar Rp 21.965.515.958 dan Aset Lainnya sebesar Rp 529.449.759.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.635.656 dan Rp23.402.970.752.

**Tabel 2**  
**Ringkasan Neraca**  
**Per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	31 DES 2021	31 DES 2020	Naik/(Turun)	%
<b>Aset</b>				
Aset Lancar	910.640.691	1.532.668.629	(622.027.938)	(40,58)
Aset Tetap	21.965.515.958	27.926.386.628	(5.960.870.670)	(21,34)
Aset Lainnya	529.449.759	795.146.505	(265.696.746)	(33,41)
<b>Jumlah Aset</b>	<b>23.405.606.408</b>	<b>30.254.201.762</b>	<b>(6.848.595.354)</b>	<b>-22,64</b>
<b>Kewajiban</b>				
Kewajiban Jangka Pendek	2.635.656	151.173.448	(148.537.792)	(98,26)
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>2.635.656</b>	<b>151.173.448</b>	<b>(148.537.792)</b>	<b>(98,26)</b>
<b>Ekuitas</b>				
Ekuitas	23.402.970.752	30.103.028.314	(6.700.057.562)	(22,26)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>23.402.970.752</b>	<b>30.103.028.314</b>	<b>(6.700.057.562)</b>	<b>(22,26)</b>
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Ekuitas</b>	<b>23.405.606.408</b>	<b>30.254.201.762</b>	<b>(6.848.595.354)</b>	<b>(22,64)</b>

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO. Beban-LO, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.402.800 dan Beban LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp147.270.158.408 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp147.261.755.608. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp721.080.350 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp146.540.675.258.

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp30.103.028.314 ditambah Defisit-LO sebesar Rp146.540.675.258, kemudian transaksi antar entitas senilai Rp139.906.015.436, sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp23.402.970.752.

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2021, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### BADAN KEBIJAKAN FISKAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	Catatan	31 DES 2021			31 DES 2020
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>	<b>B.1</b>				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	722.211.705		593.781.241
<b>Jumlah Pendapatan</b>		-	<b>722.211.705</b>	-	<b>593.781.241</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>				
1. Belanja Pegawai	B.2.1	40.786.008.000	40.758.083.380	99,93	38.834.127.897
2. Belanja Barang	B.2.2	40.499.966.000	33.601.785.001	82,97	31.300.317.858
3. Belanja Modal	B.2.3	4.820.278.000	2.452.300.497	50,87	6.844.242.122
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>86.106.252.000</b>	<b>76.812.168.878</b>	<b>89,21</b>	<b>76.978.687.877</b>

## II. NERACA

**BADAN KEBIJAKAN FISKAL  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2021	31 DES 2020
<b>ASET</b>			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1		45.077.695
Piutang Bukan Pajak	C.1.2	9.247.751	5.375.156
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	C.1.3	12.610.243	
Persediaan	C.1.4	888.782.697	1.482.215.778
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>910.640.691</b>	<b>1.532.668.629</b>
<b>Aset Tetap</b>			
		<b>C.2</b>	
Tanah	C.2.1	4.018.902.000	4.018.902.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	86.288.958.023	90.754.061.611
Gedung dan Bangunan	C.2.3	3.869.560.997	3.869.560.997
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	1.257.708.832	1.257.708.832
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	1.475.310.479	719.514.479
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	79.904.000	145.464.000
Akumulasi Penyusutan	C.2.7	(75.024.828.373)	(72.838.825.291)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>21.965.515.958</b>	<b>27.926.386.628</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
		<b>C.3</b>	
Aset Tak Berwujud	C.3.1	3.039.924.720	2.733.004.720
Aset Lain-Lain	C.3.2	12.595.000	3.198.018.184
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(2.523.069.961)	(5.135.876.399)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>529.449.759</b>	<b>795.146.505</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>23.405.606.408</b>	<b>30.254.201.762</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
		<b>C.4</b>	
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	2.635.656	151.173.448
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>2.635.656</b>	<b>151.173.448</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>2.635.656</b>	<b>151.173.448</b>
<b>EKUITAS</b>			
		<b>C.5</b>	
Ekuitas		23.402.970.752	30.103.028.314
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>23.402.970.752</b>	<b>30.103.028.314</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>23.405.606.408</b>	<b>30.254.201.762</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### BADAN KEBIJAKAN FISKAL LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2021	31 DES 2020
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>Pendapatan Operasional</b>	<b>D.1</b>		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.1	8.402.800	2.772.000
<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>		<b>8.402.800</b>	<b>2.772.000</b>
<b>Beban Operasional</b>	<b>D.2</b>		
Beban Pegawai	D.2.1	40.671.574.892	38.868.442.985
Beban Persediaan	D.2.2	991.941.651	2.055.287.759
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	85.983.480.541	61.235.579.112
Beban Pemeliharaan	D.2.4	5.065.650.074	6.949.759.031
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	5.948.698.248	3.699.462.427
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6	8.608.730.173	9.662.079.017
Beban Penyusutan Piutang tak Tertagih	D.2.7	82.829	(96.804)
<b>Jumlah Beban Operasional</b>		<b>147.270.158.408</b>	<b>122.470.513.527</b>
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(147.261.755.608)	(122.467.741.527)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
	<b>D.3</b>		
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Operasional	D.3.1		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		539.324.286	282.789.799
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			107.302.864
<b>Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>		<b>539.324.286</b>	<b>175.486.935</b>
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.2		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		181.756.064	291.331.556
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			22.116.350
<b>Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		<b>181.756.064</b>	<b>269.215.206</b>
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		721.080.350	444.702.141
<b>SURPLUS / (DEFISIT) - LO</b>		<b>(146.540.675.258)</b>	<b>(122.023.039.386)</b>

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BADAN KEBIJAKAN FISKAL  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2021	31 DES 2020
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>E.1</b>	<b>30.103.028.314</b>	<b>35.332.490.924</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>E.2</b>	<b>(146.540.675.258)</b>	<b>(122.023.039.386)</b>
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN</b>	<b>E.3</b>	<b>(65.397.740)</b>	<b>30.439.937</b>
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN			
SELISIH REVALUASI ASET TETAP			
KOREKSI NILAI ASEP TETAP NON REVALUASI		(65.397.740)	30.439.937
LAIN-LAIN			
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	<b>E.4</b>	<b>139.906.015.436</b>	<b>116.763.136.839</b>
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	<b>E.5</b>	<b>(6.700.057.562)</b>	<b>(5.229.462.610)</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.6</b>	<b>23.402.970.752</b>	<b>30.103.028.314</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. DASAR HUKUM

##### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1777/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
5. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-27/PB/PB.6/2021 tanggal 31 Desember 2021 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 (*Unaudited*) serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun.

#### A.2 PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BADAN KEBIJAKAN FISKAL

##### Profil Dan

##### Kebijakan Teknis

##### Badan Kebijakan

##### Fiskal

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) adalah unit eselon I di Kementerian Keuangan yang berdomisili di Gd. R.M. Notohamiprodjo, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Pembentukan BKF dimaksudkan untuk membantu Menteri Keuangan dalam merumuskan kebijakan fiskal secara langsung maupun kebijakan ekonomi yang terkait dengan fiskal dalam rangka menciptakan kondisi fiskal yang berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi kebijakan ekonomi makro, kebijakan APBN, kebijakan pendapatan negara yang meliputi kebijakan pajak, penerimaan negara bukan pajak, kepabeanan, dan cukai serta kebijakan sektor keuangan. Selain itu, mengingat keberhasilan kebijakan ekonomi nasional juga sangat ditentukan oleh dukungan lingkungan eksternal, BKF juga menjalankan fungsi kerjasama kebijakan kerjasama internasional, baik di tingkat bilateral, regional, dan multilateral.

Mengingat lingkup tugas perumusan kebijakan yang bersifat nasional, BKF melakukan koordinasi intensif dengan unit-unit eselon I di dalam Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga lain yang terkait, seperti Bank Indonesia, Bappenas, dan Kementerian sektoral lainnya. Kerjasama dan koordinasi intensif yang mempunyai dampak kebijakan fiskal tersebut harus dapat dijaga sustainabilitasnya, dan di sisi lain mempunyai kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pembangunan yang berkualitas, yang mencakup antara lain dukungan terhadap penciptaan stabilitas dan



pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Kondisi perekonomian nasional dan dukungan kebijakan fiskal yang dinamis mendorong kepada transformasi organisasi BKF agar dapat mempunyai daya dukung yang lebih optimal. Sejak awal pembentukannya tahun 2006 (Peraturan Presiden nomor 66 Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 dengan susunan organisasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006), BKF telah mengalami 4 (empat) kali reorganisasi yang lebih dimaksudkan untuk penajaman berbagai fungsi organisasi sesuai dengan kondisi dinamis dan prioritas arah kebijakan Kementerian Keuangan.

Perubahan struktur organisasi BKF terakhir ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 11 Juni 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dengansusunan organisasi yang terdiri dari:

1. Sekretariat Badan
2. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
3. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
5. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan
6. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
7. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral

### **Visi**

Visi Kementerian Keuangan adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Untuk mendukung tercapainya visi Kementerian Keuangan tersebut, Badan Kebijakan Fiskal sebagai salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan mempunyai visi: Menjadi Perumus Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Kredibel dalam rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan

### **Misi**

Badan Kebijakan Fiskal mendukung Misi Kementerian Keuangan nomor 1 yaitu menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan dan

nomor 5 yaitu mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. Misi Badan Kebijakan Fiskal dalam rangka mewujudkan Visi BKF dan mendukung Misi Kementerian Keuangan adalah:

1. Merumuskan kebijakan ekonomi makro dan fiskal yang antisipatif, responsif, dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing;
2. Merumuskan kebijakan pendapatan negara yang optimal dalam rangka peningkatan daya saing iklim usaha dan meningkatkan kesejahteraan umum;
3. Merumuskan kebijakan dan mengelola kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal dan peningkatan daya saing dalam negeri;
4. Merumuskan kebijakan yang mendorong pendalaman pasar keuangan yang inklusif dan sistem keuangan yang stabil; dan
5. Membangun organisasi BKF yang adaptif dan berkinerja tinggi dengan didukung SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi serta infrastruktur dan anggaran yang suportif

Tujuan strategis BKF yang ingin dicapai adalah perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, BKF melakukan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan dalam bidang fiskal, sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
2. Pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan dalam bidang fiskal dan sektor keuangan;
3. Pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam bidang fiskal, sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
5. Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Pada Tahun Anggaran 2021, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKF adalah sebesar 108,19. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja BKF telah memenuhi ekspektasi.

NKO tersebut merupakan hasil dari nilai BKF dalam memenuhi Sasaran Strategisnya pada 2021 yaitu:

1. Kebijakan fiskal dan sektor keuangan, serta kerjasama ekonomi dan keuangan internasional yang berdaya saing dengan indeks capaian 103,78.
2. Keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang efektif dengan indeks capaian 107,88.
3. Formulasi kebijakan fiskal yang Berkualitas dengan indeks capaian 105,75.
4. Rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, berkelanjutan dan inovatif dengan indeks capaian 105,26.
5. Penguatan diplomasi kerjasama internasional yang inovatif dan kredibel dengan indeks capaian 111,11.
6. Policy knowledge center yang optimal dengan indeks capaian 105,56.
7. *Surveillance* yang akurat dan tepat waktu dengan indeks capaian 102,72.
8. Organisasi dan SDM yang optimal dengan indeks capaian 109.
9. Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal dengan indeks capaian 102,35.
10. Sistem informasi yang andal dengan indeks capaian 120.

### **A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

Laporan Keuangan BA 015 Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Kebijakan Fiskal. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Keuangan BA 015 Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Badan Kebijakan Fiskal. Jumlah satuan kerja di lingkup Badan Kebijakan Fiskal adalah satu satker.

SAI terdiri dari dua sub sistem yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Dalam penerapannya, baik SAK maupun SIMAK BMN menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI.

Sistem ini merupakan aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

*Basis Akuntansi*

**A.4. BASIS AKUNTANSI**

Badan Kebijakan Fiskal menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

*Dasar Pengukuran*

**A.5. DASAR PENGUKURAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Kebijakan Fiskal dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan Akuntansi*

**A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BA 015 Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2021 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kebijakan Fiskal adalah sebagai

berikut:

*Pendapatan-LRA* **(1) Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang berhak menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO* **(2) Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Kebijakan Fiskal tidak terdapat pendapatan yang termasuk pendapatan-LO.

Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(3) Belanja**

*Belanja*

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

#### **(4) Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

#### **(5) Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

##### **a. Aset Lancar**

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan

atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### *Aset Tetap*

##### **b. Aset Tetap**

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2021. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilai berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilai selain Tanah. Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi hasil perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambahan ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dan entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Piutang Jangka Panjang*

**c. Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang antara lain adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian



negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset Lainnya*

**d. Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

**a. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

**b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih*

**(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

*Tabel 3  
Penggolongan Kualitas Piutang*

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

*Penyusutan Aset  
Tetap*

**(9) Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/KMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara

berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.

*Tabel 4  
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (alat music Modern)	4 tahun

*Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berbasis Akrual  
Pertama Kali*

**(10) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintah. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan

akuntansi berbasis akrual. Kedua, Perbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

Realisasi PEN-  
ICT BKF  
Rp61.689.336

**A.7. Pengungkapan atas Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional *Information and Communication Technology* (PEN-ICT)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN), Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemic COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Selain yang masuk dalam kerangka Program PEN, Pemerintah juga melakukan serangkaian kegiatan maupun tindakan terkait untuk mencegah, mengendalikan, dan mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 di lingkungan pemerintah pusat.

Kegiatan-kegiatan PEN-ICT pada BKF khususnya terkait pengelolaan sistem informasi dan teknologi pemerintahan, terdiri dari kebijakan dan rencana strategis teknologi informasi dan pengelolaan portal fiskal dan wiki BKF, dalam kebijakan dan rencana strategis teknologi informasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan diantaranya berupa pelaksanaan evaluasi ruang rapat digital sebagai upaya penguatan sarana dan prasarana ruang rapat untuk mendukung kegiatan *hybrid meeting* di Lingkungan BKF pada kondisi *new normal* saat ini, rapat pembahasan evaluasi dan pengembangan dashboard pemantauan output SIPANTAU (Sistem Informasi Dashboard Pemantauan Project), rapat pembahasan data bloomberg dan rapat pembahasan keamanan informasi.

Adapun terkait pengelolaan portal fiskal dan wiki BKF diantaranya berupa kegiatan pemutakhiran dan pengelolaan Wiki BKF Knowledge, penyiapan, evaluasi hingga pengembangan *front end* dan *back end*

konten dan taksonomi BKF Knowledge Base untuk mendukung pengelolaan *Knowledge Management System* (KMS) pada portal fiskal yang Optimal di lingkungan BKF.

Realisasi kegiatan PEN-ICT pada BKF sebagaimana dimaksud terlihat dalam tabel berikut:

*Tabel 5*  
*Realisasi Kegiatan PEN-ICT BKF TA 2021*

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Kebijakan dan rencana Strategis Teknologi Informasi	21.900.000	15.209.510	69,45
Portal Fiskal dan Wiki BKF	49.400.000	46.688.826	94,51
<b>Realisasi PC-PEN BKF TA 2021</b>	<b>71.300.000</b>	<b>61.898.336</b>	<b>86,81</b>

#### A.8. Pengungkapan Capaian Kinerja BKF

Selama Periode Tahun Anggaran 2021, BKF berhasil mencapai seluruh output strategis yang ditargetkan dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.715.013.566 dari total anggaran Rp2.100.210.000 atau 81,66 persen dari anggaran yang telah ditetapkan.

*Capaian Kinerja*  
*BKF TA 2021*

Realisasi anggaran dan kinerja yang telah dicapai oleh Badan Kebijakan Fiskal pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

*Tabel 6*  
*Realisasi Output Strategis BKF TA 2021*

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan (%)	Target Keluaran	Realisasi Volume keluaran	Progres Capaian Output (%)
1	4673.PBA.001	Perbaikan Iklim Kemudahan Berusaha ( <i>Ease of Doing Business</i> ) dan Investasi	345.100.000	314.066.450	91,01	1	1	100
2	4673.PBA.002	Penyusunan Kajian Produktivitas Modal dan Perbaikan Total <i>Factor Productivity</i> Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi	388.100.000	346.107.800	89,18	1	1	100
3	4673.PBA.003	Kajian kebijakan perpajakan dalam mendukung SDM yang berkualitas dari aspek kesehatan masyarakat	287.500.000	127.771.732	44,44	1	1	100
4	4673.PBA.004	Kajian Efektifitas dan Efisiensi PPnBM di sektor properti	286.496.000	193.236.000	67,45	1	1	100
5	4674.PBA.001	Kajian Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana	793.014.000	733.830.584	92,54	1	1	100
<b>Jumlah</b>			<b>2.100.210.000</b>	<b>1.715.012.566</b>	<b>81,66</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100</b>

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### B.1 Perubahan Pagu BKF

Perubahan  
Anggaran  
Rp27.915.934.000

Selama periode berjalan, Badan Kebijakan Fiskal telah melaksanakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh Penghematan Nasional

Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7  
Perubahan Anggaran BKF Per 31 Desember 2021

	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Perubahan	%
<b>BELANJA</b>				
1. Belanja Pegawai	36.936.710.000	40.786.008.000	3.849.298.000	10,42
2. Belanja Barang	70.882.494.000	40.499.966.000	(30.382.528.000)	(42,86)
3. Belanja Modal	6.202.982.000	4.820.278.000	(1.382.704.000)	(22,29)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>114.022.186.000</b>	<b>86.106.252.000</b>	<b>27.915.934.000</b>	<b>24,48</b>

Revisi tersebut menimbulkan penurunan anggaran sebesar Rp27.915.934.000 atau 24,48% dari anggaran BKF semula yang bersumber dari pengurangan belanja barang sebesar Rp30.382.528.000 atau 42,86% dari anggaran semula dan pengurangan belanja modal sebesar Rp1.382.704.000 atau 22,29% dari anggaran semula.

### B.2 Pendapatan

Realisasi  
Pendapatan  
Rp722.211.705

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp722.211.705. Dalam DIPA Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2021 tidak memiliki estimasi pendapatan. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah adalah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel 8  
Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP

No.	Uraian	Estimasi	Realisasi	% Naik/ (Turun)
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	539.324.286	-
2	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	0	6.652.800	-
3	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	0	29.254.722	-
4	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1.750.000	-
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	54.736.781	-
6	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	90.493.116	-
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>722.211.705</b>	<b>-</b>

Realisasi PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp128.430.464 atau 17,78 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2020. Kenaikan penerimaan pada BKF dikarenakan terdapat pembayaran TGR, Cicilan TGR serta kenaikan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin.

Perbandingan realisasi PNBPN Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 9**  
**Perbandingan Realisasi PNBPN**  
**Per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	Uraian	31 DES 2021	31 DES 2020	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	539.324.286	282.789.799	256.534.487	90,72
2	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	6.652.800	2.772.000	3.880.800	140,00
3	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara T	29.254.722		29.254.722	
4	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.750.000		1.750.000	
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	54.736.781	83.448.980	(28.712.199)	(34,41)
6	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	90.493.116	224.770.462	(134.277.346)	(59,74)
	<b>Jumlah</b>	<b>722.211.705</b>	<b>593.781.241</b>	<b>128.430.464</b>	<b>17,78</b>

### B.3. Belanja

Realisasi Belanja Realisasi belanja Badan Kebijakan Fiskal per kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 10**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja per kegiatan**  
**Tahun Anggaran 2021**

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja	%
<b>CE</b>	<b>Program Kebijakan Fiskal</b>			
4762	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	1.748.381.000	1.722.468.649	98,52
4763	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	4.089.566.000	3.378.356.767	82,61
4764	Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	6.904.578.000	6.308.281.415	91,36
4765	Komunikasi dan Edukasi	2.122.951.000	1.854.799.759	87,37
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM CE</b>	<b>14.865.476.000</b>	<b>13.263.906.590</b>	<b>89,23</b>
<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>			
4672	Legislasi dan Litigasi	10.000.000	-	-
4673	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	21.227.288.000	17.159.114.372	80,84
4674	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	4.598.088.000	4.453.035.797	96,85
4675	Pengelolaan Organisasi dan SDM	43.082.619.000	42.201.981.783	97,96
4676	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	21.250.000	-	-
4677	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	71.300.000	61.898.336	86,81
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM WA</b>	<b>69.010.545.000</b>	<b>63.876.030.288</b>	<b>92,56</b>
<b>09</b>	<b>HIBAH LUAR NEGERI</b>			
<b>CE</b>	<b>Program Kebijakan Fiskal</b>			
4764	Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	243.300.000	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM CE</b>	<b>243.300.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>			
4672	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	1.986.931.000	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM WA</b>	<b>1.986.931.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>86.106.252.000</b>	<b>77.139.936.878</b>	<b>89,59</b>
	Pengembalian Belanja		327.768.000	
	<b>Belanja Netto</b>	<b>86.106.252.000</b>	<b>76.812.168.878</b>	<b>89,21</b>

Realisasi belanja Badan Kebijakan Fiskal pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp76.812.168.878 atau sebesar 89,21 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp327.768.000.

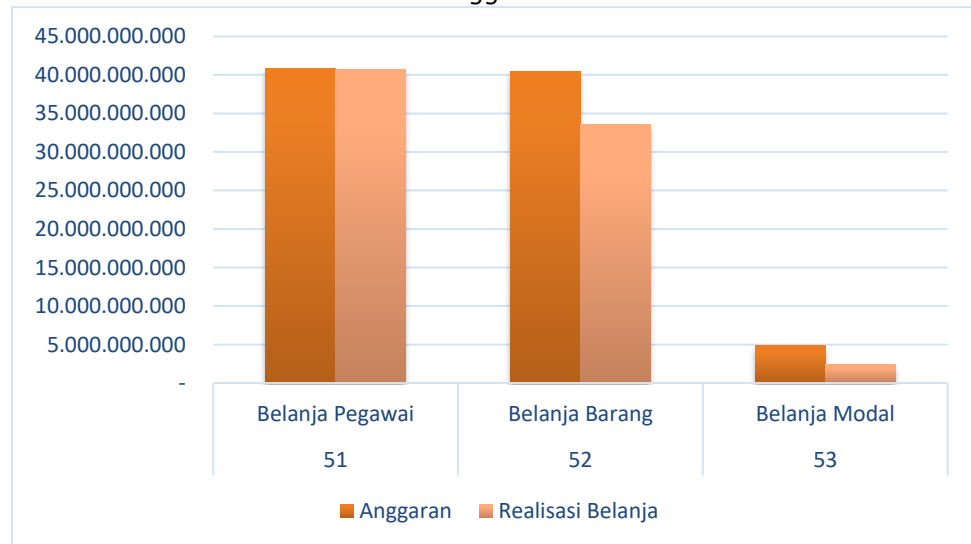
Anggaran dan realisasi belanja menurut jenis belanja Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 11**  
*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja  
Tahun Anggaran 2021*

Kode Jenis Belanja	Uraian	Anggaran	Realisasi Belanja	% Naik / Turun
51	Belanja Pegawai	40.786.008.000	40.758.083.380	99,93
52	Belanja Barang	40.499.966.000	33.601.785.001	82,97
53	Belanja Modal	4.820.278.000	2.452.300.497	50,87
<b>Jumlah</b>		<b>86.106.252.000</b>	<b>76.812.168.878</b>	<b>89,21</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

**Grafik 1**  
*Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja  
Tahun Anggaran 2021*



Realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 mengalami selisih penurunan yang rendah bila dibandingkan Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp166.518.999 atau terjadi penurunan 0,22 persen dari tahun anggaran sebelumnya. Perbandingan realisasi belanja per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 12**  
*Perbandingan realisasi Belanja  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

Kode	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik / (Turun)	
		31 DES 2021	31 DES 2020	Rp	%
51	Belanja Pegawai	40.758.083.380	38.834.127.897	1.923.955.483	4,95
52	Belanja Barang	33.601.785.001	31.300.317.858	2.301.467.143	7,35
53	Belanja Modal	2.452.300.497	6.844.242.122	(4.391.941.625)	(64,17)
<b>Jumlah</b>		<b>76.812.168.878</b>	<b>76.978.687.877</b>	<b>(166.518.999)</b>	<b>(0,22)</b>



**Belanja Pegawai B.3.1 Belanja Pegawai**

Rp40.758.083.380

Belanja Pegawai adalah Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp40.758.083.380 sedangkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp38.834.127.897. Kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar 4,95 persen.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 13**  
**Perbandingan Belanja Pegawai**  
**Per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	31 DES 2021	31 DES 2020	Naik/ (Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	25.897.342.770	25.462.268.820	435.073.950	1,71
Belanja Pembulatan Gaji PNS	420.985	383.874	37.111	9,67
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.763.365.020	1.735.566.354	27.798.666	1,60
Belanja Tunj. Anak PNS	497.331.908	480.791.588	16.540.320	3,44
Belanja Tunj. Struktural PNS	895.640.000	977.440.000	(81.800.000)	(8,37)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.251.530.000	2.959.020.000	292.510.000	9,89
Belanja Tunj. PPh PNS	157.196.603	193.203.101	(36.006.498)	(18,64)
Belanja Tunj. Beras PNS	1.430.005.320	1.212.093.540	217.911.780	17,98
Belanja Uang Makan PNS	4.567.929.000	4.434.999.000	132.930.000	3,00
Belanja Tunj. Umum PNS	741.320.000	801.780.000	(60.460.000)	(7,54)
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	136.273.774		136.273.774	
Belanja Uang Lembur	1.428.426.000	612.689.000	815.737.000	133,14
<b>Realisasi Belanja Bruto</b>	<b>40.766.781.380</b>	<b>38.870.235.277</b>	<b>1.896.546.103</b>	<b>4,88</b>
Pengembalian Belanja	8.698.000	36.107.380	(27.409.380)	(75,91)
<b>Realisasi Belanja Netto</b>	<b>40.758.083.380</b>	<b>38.834.127.897</b>	<b>1.923.955.483</b>	<b>4,95</b>

**Belanja Barang B.3.2. Belanja Barang**

Rp33.601.785.001

Belanja Barang adalah Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp33.601.785.001 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp31.300.317.858. Kenaikan realisasi belanja barang sebesar 7,35 persen antara lain disebabkan oleh perubahan dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan karena pandemi COVID-19.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 14**  
**Perbandingan Belanja Barang**  
**Per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	31 DES 2021	31 DES 2020	Naik/ (Turun)	%
Belanja Barang Operasional	6.149.423.579	5.557.028.296	592.395.283,00	10,66
Belanja Barang Non Operasional	4.333.013.333	5.291.913.711	(958.900.378,00)	(18,12)
Belanja Barang Persediaan	618.514.125	1.899.833.505	(1.281.319.380,00)	-
Belanja Jasa	12.022.301.197	7.960.647.394	4.061.653.803,00	51,02
Belanja Pemeliharaan	4.845.644.519	6.904.780.025	(2.059.135.506,00)	(29,82)
Belanja Perjalanan Dinas DN	4.421.724.964	2.437.353.830	1.984.371.134,00	81,41
Belanja Perjalanan Dinas LN	1.530.233.284	1.262.764.597	267.468.687,00	21,18
<b>Realisasi Belanja Bruto</b>	<b>33.920.855.001</b>	<b>31.314.321.358</b>	<b>2.606.533.643,00</b>	<b>8,32</b>
Pengembalian Belanja	319.070.000	14.003.500	305.066.500	
<b>Realisasi Belanja Netto</b>	<b>33.601.785.001</b>	<b>31.300.317.858</b>	<b>2.301.467.143,00</b>	<b>7,35</b>

*Belanja Modal*

*Rp2.452.300.497*

**B.3.3. Belanja Modal**

Belanja Modal adalah Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp2.452.300.497 dan Rp6.844.242.122. Penurunan realisasi Belanja Modal pada Tahun 2021 adalah sebesar 64,17 persen. Tidak terserapnya Belanja Modal secara maksimal dikarenakan terjadi kegagalan dalam pelaksanaan lelang belanja modal.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 15**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal**  
**Per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	31 DES 2021	31 DES 2020	Naik/ (Turun)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.455.144.497	6.262.907.292	(4.807.762.795)	(76,77)
Belanja Modal Gedung dan Bagunan		4.504.500	(4.504.500)	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	918.156.000	576.830.330	341.325.670	59,17
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya	79.000.000			
<b>Realisasi Belanja Bruto</b>	<b>2.452.300.497</b>	<b>6.844.242.122</b>	<b>(4.391.941.625)</b>	<b>(64,17)</b>

*Belanja Modal*

*Peralatan dan*

*Mesin*

*Rp1.455.144.497*

**B.3.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.455.144.497 yang bersumber dari pembelian transaksi pembelian Intrakomptabel.

**B.3.3.2 Belanja Modal Lainnya**

*Realisasi Belanja*

*Modal Lainnya*

*Rp918.156.000*

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp918.156.000 yang terdiri dari Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Tetap Tak Berwujud.

Realisasi Belanja Aset Tetap lainnya adalah sebesar Rp690.236.000 yang bersumber dari pembelian aset tetap lainnya. Relisasi Belanja Aset Tetap tak Berwujud adalah sebesar Rp227.920.000.

*Belanja*

*Penambahan Nilai  
Aset Tetap Lainnya  
Rp79.0000.000*

**B.3.3.3 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp79.000.000 yang merupakan belanja modal lainnya Aset Tetap Tak Berwujud untuk Pengembangan Langsung.

**B.3.4 Belanja Penanganan Pandemi COVID-19**

*Belanja*

*Penanganan  
Pandemi COVID-19  
Rp1.852.642.398*

BKF mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp2.379.933.000. Dari total alokasi belanja ini Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp 1.058.800.000, Belanja Barang - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp 87.000.000 dan Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp1.234.133.000.

Hingga 31 Desember 2021, realisasi BKF atas Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 adalah sebesar Rp1.852.642.398 yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

*Tabel 16  
Realisasi Belanja  
Penanganan Pandemi COVID-19*

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	%
521131	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	1.058.800.000	1.024.993.409	96,81
521841	Belanja Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	87.000.000	53.682.625	61,70
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.234.133.000	773.966.364	62,71
<b>Jumlah</b>		<b>2.379.933.000</b>	<b>1.852.642.398</b>	<b>77,84</b>

#### **B.4. Catatan Penting Lainnya**

##### **B.4.1 Penerimaan Hibah Luar Negeri BKF**

###### **1. Hibah Proyek *Sustainable Development Financing* (SDF)**

Proyek SDF bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Indonesia dalam efektivitas implementasi kegiatan-kegiatan lingkungan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan, serta biodiversity. Proyek SDF juga membiayai kegiatan *co-benefit* dari pelaksanaan MAPI seperti dukungan pelaksanaan green sukuk Indonesia dan implementasi kajian responsif gender.

Beberapa kegiatan yang dibiayai dari hibah SDF adalah sebagai berikut (i) pelaksanaan *technical assistance* yang meliputi kegiatan *knowledge sharing* dan penyusunan laporan, (ii) pelaksanaan sosialisasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (MAPI) yang dihadiri oleh stakeholder terkait termasuk kementerian/lembaga (K/L) yang mendapatkan mandat untuk melaksanakan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, (iii), memfasilitasi in-house training MAPI yang diadakan di beberapa K/L terkait, (iv) memfasilitasi koordinasi lintas kementerian/lembaga yang terkait dengan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan gender, (v) pengembangan sumber daya manusia (*capacity building*) seperti mengikuti *workshop*/pelatihan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, (vi) dukungan melakukan revidi atas laporan mitigasi perubahan iklim, (vii) memfasilitasi pelaksanaan *workshop* terkait green sukuk, green bond, dan blue bond, (viii) pelaksanaan green sukuk *impact report working group kick meeting*, dan (ix) memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan *focus group discussion* (FGD) studi kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan *responsive gender*.

Proyek akan dilaksanakan di bawah tanggung jawab Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, dengan anggaran sebesar USD620,000 untuk periode September 2014 – Agustus 2017 dan telah diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2022 dengan nilai anggaran menjadi USD1,100,000 yang berasal dari UNDP serta telah mendapat register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan nomor 2Q36JPE4. Pada Tahun Anggaran 2021, telah dilakukan pengesahan realisasi hibah ini di KPPN sebesar Rp 1.428.925.436.

###### **2. Hibah PROSPERA**

Indonesia sedang menghadapi kendala dalam mengumpulkan penerimaan negara untuk membiayai belanja yang terus meningkat dan dalam waktu yang sama, harus tetap menjaga defisit pada batasan tiga persen dari PDB. Untuk itu, Pemerintah Australia akan membantu usaha Pemerintah RI dalam

melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan perpajakan.

GPF Treasury dan AIPEG menyediakan konsultan untuk memberikan rekomendasi demi memperkuat kebijakan penerimaan dan kapabilitas BKF dalam memberikan rekomendasi kebijakan. Konsultan Treasury memberikan input pada beberapa bidang perpajakan, seperti analisis perubahan UU PPN, perpajakan internasional, dan dukungan reformasi pajak jangka menengah.

Dalam hibah PROSPERA tersebut, yang bertindak selaku *Executing Agency* adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sedangkan yang bertindak selaku *Implementing Agency* adalah Kementerian Keuangan. Total biaya PROSPERA diestimasikan sebesar AUD 25.861.319, yang bersumber dari DFAT Australia.

PROSPERA telah mendapatkan penetapan nomor register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan nomor register 23TSV7CA yang berlaku efektif pada bulan Maret 2018 dan mempunyai *closing date* pada bulan Februari 2023.

Pada Tahun Anggaran 2021, telah dilakukan pengesahan realisasi hibah ini di KPPN sebesar Rp 29.802.311.162.

### **3. Hibah Program *Readiness and Preparatory Support Programme* (RPSP)**

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini Kepala Badan Kebijakan Fiskal yang diberikan mandat untuk mewakili Menteri Keuangan sebagai *National Designated Authority the Green Climate Fund* (NDA GCF) untuk Indonesia, telah menerima hibah RPSP. RPSP merupakan program pendanaan dari the *Green Climate Fund* (GCF) dalam rangka memperkuat kapasitas institusional dari NDA GCF di negara-negara berkembang dan untuk meningkatkan kapasitas entitas nasional agar dapat mengoptimalkan peluang dan akses pendanaan program/ proyek perubahan iklim melalui GCF.

Outcomes yang akan dicapai dari hibah RPSP adalah sebagai berikut:

- Outcome 1: Penguatan kapasitas negara. Kegiatan dalam outcome ini mencakup bantuan teknis dalam penyusunan peraturan, petunjuk teknis, dan prosedur terkait NDA GCF, memberikan kapasitas teknis untuk menjalankan Sekretariat NDA GCF, serta mengembangkan *monitoring and evaluation tools* untuk melaporkan kemajuan proyek di Indonesia yang telah disetujui oleh GCF.
- Outcome 2: Pelibatan pemangku kepentingan. Kegiatan dalam outcome ini mencakup pemutakhiran dokumen Program Nasional (*Country Programme Document*), menyusun strategi komunikasi NDA GCF beserta produk komunikasi seperti website, artikel, dan op-ed, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial ke dalam dokumen NDA,

dan penyelenggaraan Annual Participatory Review forum.

- Outcome 3: Direct Access Realized. Ruang lingkup kegiatan ini adalah meningkatkan kesiapan dan kapasitas Direct Access Entity/ DAE (Entitas Terakreditasi Nasional) dan calon DAE untuk dapat mengakses dana GCF dan kegiatan lain yang terkait melalui pengembangan proyek dalam pipeline DAE, dukungan kepada kandidat DAE hingga disetujui GCF, dan pelaksanaan Call for Expression of Interest (EOI) to be DAE. Seperti publikasi Call for Interest to become Direct Access Entity.
- Outcome 4: Access to Finance. Ruang lingkup kegiatan ini adalah meningkatkan peluang pendanaan GCF kepada masyarakat melalui roadshow ke daerah untuk mengidentifikasi proyek perubahan iklim prioritas dan kegiatan lain yang terkait seperti pelaksanaan Call for Project Concept Note.
- Outcome 5: Mobilisasi sektor swasta. Kegiatan dalam outcome ini mencakup lokakarya kepada sektor swasta dan penyusunan studi untuk mendorong investasi sektor swasta dalam proyek adaptasi perubahan iklim, penyusunan Adaptation Facility concept note, dan pelaksanaan berbagai kegiatan peningkatan kesadaran untuk sektor swasta.

Hibah ini berasal dari the Green Climate Fund yang dikelola dan disalurkan melalui *Global Green Growth Institute* (GGGI) selaku mitra pelaksana (*delivery partner*) yang ditetapkan oleh Badan Kebijakan Fiskal. Terkait hal tersebut, GGGI mendukung Badan Kebijakan Fiskal dalam implementasi pelaksanaan aktivitas dan pencapaian *outcomes* dari RPSP. Nilai komitmen hibah RPSP adalah sebesar USD852.322 untuk periode Juni 2019 s.d. Desember 2020 dan telah diperpanjang hingga 30 Juni 2021 serta telah didaftarkan dan mendapat nomor register dari DJPPR dengan nomor 2XEF6JWA. Pada Tahun Anggaran 2021, telah dilakukan pengesahan realisasi hibah ini di KPPN sebesar Rp 5.559.292.937.

#### **4. Hibah Program Readiness and Preparatory Support Programme (RPSP)**

##### **Phase II**

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini Kepala Badan Kebijakan Fiskal yang diberikan mandat untuk mewakili Menteri Keuangan sebagai *National Designated Authority the Green Climate Fund* (NDA GCF) untuk Indonesia, telah menerima hibah RPSP Phase II. RPSP Phase II ini diperoleh dalam rangka kontinuitas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada program RPSP fase pertama dan untuk melakukan beberapa usulan kegiatan baru yang sesuai dengan prioritas nasional. Sebagaimana tujuan dari hibah RPSP, RPSP Phase II juga merupakan program pendanaan dari the *Green Climate Fund* (GCF) dalam rangka memperkuat kapasitas institusional dari NDA GCF di negara-negara berkembang dan untuk meningkatkan kapasitas entitas nasional agar dapat

mengoptimalkan peluang dan akses pendanaan program/ proyek perubahan iklim melalui GCF.

Outcomes yang akan dicapai dari hibah RPSP Phase II adalah sebagai berikut:

- Outcome 1: *Institutional capacity and coordination mechanisms in place to govern and coordinate*. Aktivitas dalam outcome ini mencakup kegiatan penguatan kelembagaan dan kapasitas NDA GCF Indonesia dan mengembangkan mekanisme koordinasi formal antar *climate finance focal points* di Indonesia.
- Outcome 2: *Country Programming process*. Aktivitas dalam outcome ini mencakup Pembaruan periodik terhadap *Country Programme Document* (CPD) sesuai perubahan situasi dan prioritas nasional di masa mendatang, Peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan melalui proses-proses konsultasi, dan integrasi isu-isu dan perspektif gender ke dalam seluruh program kerja serta proses bisnis NDA GCF Indonesia.
- Outcome 3: *Direct Access to climate finance*. Ruang lingkup kegiatan ini adalah meningkatkan jumlah Entitas Terakreditasi Nasional (*Direct Access Entities / DAEs*) Indonesia dan penyelarasan program kerja DAE dengan CPD Indonesia.
- Outcome 4: *Climate finance strategies and project pipeline strengthened*. Ruang lingkup kegiatan ini adalah mengembangkan *Climate Finance Strategy* nasional. *Climate Finance Strategy* menggambarkan lansekap, peluang, dan arahan pendanaan iklim di Indonesia, termasuk gambaran bagaimana posisi serta keterlibatan BPD LH, penyelarasan rencana pengembangan daftar proyek Lembaga Terakreditasi dengan CPD Indonesia, pengembangan nota konsep proyek (*Project Concept Note / PCN*) dalam rangka penguatan daftar proyek perubahan iklim Indonesia, dan penguatan keterlibatan sektor swasta sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam pendanaan perubahan iklim.

Hibah RPSP Phase II ini berasal dari the Green Climate Fund yang dikelola dan disalurkan melalui Global Green Growth Institute (GGGI) selaku mitra pelaksana (*delivery partner*) yang ditetapkan oleh Badan Kebijakan Fiskal. Terkait hal tersebut, GGGI mendukung Badan Kebijakan Fiskal dalam implementasi pelaksanaan aktivitas dan pencapaian *outcomes* dari RPSP Phase II. Nilai komitmen hibah RPSP Phase II adalah sebesar USD998,258 untuk periode Januari 2020 s.d. Desember 2021 serta telah didaftarkan dan mendapat nomor register dari DJPPR dengan nomor 267VJZRA. Pada Tahun Anggaran 2021, telah dilakukan pengesahan realisasi hibah ini di KPPN sebesar Rp 4.407.511.870.

## **5. Hibah Domestic Resources Mobilization for Sustainable Development (DRM)**

BKF bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) dari Jerman pada hibah DRM. Hibah ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas BKF dalam perumusan kebijakan fiskal dan analisis dampak kebijakan pemerintah serta mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan subsidi.

Nilai komitmen hibah DRM adalah sebesar EUR7.500.000,00 untuk periode Februari 2019 s.d. Januari 2023 serta telah didaftarkan dan mendapat nomor register dari DJPPR dengan nomor 2XKPTHPA. Pada Tahun Anggaran 2021, telah dilakukan pengesahan realisasi hibah ini di KPPN sebesar Rp 22.622.756.858.

## **6. Hibah Indonesia Disaster Risk and Insurance (Indorisk)**

Indonesia adalah negara dengan risiko bencana yang tinggi, sehingga memerlukan kesiapan (country readiness) yang komprehensif dan memadai dalam menghadapi bencana, salah satunya dalam bentuk kesiapan pendanaan. Upaya proaktif Pemerintah dalam pendanaan kegiatan mitigasi ini tertuang dalam Strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI). Salah satu instrumen utama Strategi DRFI pemerintahan adalah inovasi skema pendanaan kolaboratif Pooling Fund Bencana (PFB).

Untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam membangun PFB, Grup Bank Dunia telah menyepakati program Investment Project Financing with Performance-Based Conditions (IPF-PBCs) senilai USD500 juta. Program ini akan disertai hibah senilai USD14 juta dari Global Risk Financing Facility (GRiF), dimana USD10 juta dikelola oleh Kementerian Keuangan. Program ini mengawal reformasi kebijakan dan akan digunakan untuk membangun kapasitas keuangan dan kelembagaan PFB serta perbaikan tata kelola pendanaan penanggulangan bencana. Tiga fokus utamanya adalah: (i) pendirian dan operasionalisasi PFB; (ii) peningkatan kesiapsiagaan untuk respons terhadap bencana yang lebih efektif di seluruh instansi pemerintah; dan (iii) pembangunan kapasitas dan sistem PFB untuk mendukung pendanaan penanggulangan bencana secara efektif.

Nilai komitmen hibah Indorisk adalah sebesar USD10,000,000 untuk periode Maret 2021 s.d. Maret 2024 serta telah mendapat nomor register dari DJPPR dengan nomor 27BYVXAA. Pada Tahun Anggaran 2021, tidak ada realisasi hibah Indorisk.



## C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar  
Rp910.640.691

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp910.640.691 dan Rp1.532.668.629. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Badan Kebijakan Fiskal per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 17  
Rincian Aset Lancar  
Per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Aset Lancar	31 DES 2021	31 DES 2020
1	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	45.077.695
2	Piutang Bukan Pajak	9.247.751	5.375.156
3	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	12.610.243	-
4	Persediaan	888.782.697	1.482.215.778
	<b>Jumlah</b>	<b>910.640.691</b>	<b>1.532.668.629</b>

Kas Lainnya dan Setara Kas  
Rp0

#### C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp45.077.695. Saldo kas lainnya pada 31 Desember 2020 merupakan saldo pada virtual account (VA) BPP (LS Bendahara) yang belum dapat ditransaksikan untuk pihak ketiga karena saldo RKK (Rekening Induk) sudah nihil. Per 31 Desember 2021, saldo kas lainnya sudah nol karena sudah tidak ada lagi selisih antara rekening induk dengan rekening virtual seperti pada tahun 2020.

Piutang Bukan Pajak  
Rp9.247.751

#### C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan pajak per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp9.247.751 dan Rp5.375.156. Adapun nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp46.471 dan Rp27.010.

Saldo Piutang Bukan Pajak adalah Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 yang muncul karena terdapat kelebihan pembayaran belanja barang Bulan Desember 2021 dan baru disetor pada tahun 2022. Kelebihan pembayaran belanja barang terjadi karena nilai BAST Bank Garansi atas pembayaran kontrak sewa mesin fotokopi termin Bulan Des 2021 lebih besar dari BAST final atas kontrak tersebut sehingga ada kelebihan yang harus disetorkan kembali oleh rekanan kepada Negara.

Piutang PNBP merupakan jumlah penerimaan Negara bukan pajak yang terutang ditentukan dengan cara ditetapkan oleh Instansi Pemerintah dan dihitung sendiri oleh wajib pajak. Penetapan jumlah PNBP yang terutang oleh instansi pemerintah kedaluwarsa setelah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya PNBP.

**C.1.3. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi**

Bagian Lancar  
Tuntutan  
Perbendaharaan  
Rp12.640.691

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp12.640.691 dan Rp0.

Pada bulan November 2021, telah dicatat piutang TGR (jangka panjang) atas nama Ahmad Bahri Rambe. Piutang ini akan jatuh tempo pada bulan November 2022 sehingga per 31 Desember 2021 diklasifikasikan menjadi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi.

**C.1.4. Persediaan**

Persediaan  
Rp888.782.697

Persediaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp888.782.697 dan Rp1.482.215.778. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 18  
Rincian Persediaan  
Per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	31 DES 2021	31 DES 2020
1	Barang Konsumsi	842.524.687	1.295.919.338
2	Barang untuk Pemeliharaan	46.258.010	186.296.440
<b>Jumlah</b>		<b>888.782.697</b>	<b>1.482.215.778</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal tersebut berada dalam kondisi baik.

Sehubungan dengan penanganan COVID-19, terdapat saldo persediaan pada tanggal neraca yang merupakan persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Rincian Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19 Per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 19**  
**Rincian Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19**  
**Per 31 Desember 2021**

No	Item	Saldo Awal		Mutasi Selama 2021				Saldo Akhir		Sumber
		Jumlah	Nilai Bersih	Masuk	Keluar	Jumlah	Jumlah	Harga per Unit (Rp)	Total Nilai (Rp)	
1	Hand Sanitizer 500ml dan Bracket	0	0	0	0	0	0	0	0	- Saldo Awal
2	Masker Sensi Headloop	0	0	0	0	0	0	0	0	- Saldo Awal
3	Masker IBS Earloop	0	0	0	0	0	0	0	0	- Saldo Awal
4	Refill Hand Sanitizer Merk Onemad	5	10.725.000	0	5	-5	0	0	0	- Saldo Awal
5	Refill Handsanitizer Merk Jhonson 2 liter	4	1.540.000	0	4	-4	0	0	0	- Saldo Awal
6	Dispenser Sabun/Sanitizer	0	0	0	0	0	0	0	0	- Saldo Awal
7	Sarung Tangan Latex Sensi	0	0	0	0	0	0	0	0	- Saldo Awal
8	Masker Sensi Earloop 2	0	0	80	35	45	45	5.940.000	267.300.000	Pembelian
9	Masker Sritex Non Medis	700	6.314.000	0	700	-700	0	0	0	- Saldo Awal
10	Refill Hand Sanitizer Jhonson 2	8	2.640.000	0	8	-8	0	0	0	- Saldo Awal
11	Disinfektan XYZ 5 L	2	1.430.000	0	2	-2	0	0	0	- Saldo Awal
12	Sarung Tangan Latex	6	1.155.000	0	6	-6	0	0	0	- Saldo Awal
13	Disinfektan Merek Snap	0	0	20	20	0	0	0	0	- Pembelian
14	Spray Air dan Surface Merek Saniter 400ml	0	0	60	12	48	48	2.640.000	126.720.000	Pembelian
15	Masker Duckbill Merek Sensi	0	0	25	25	0	0	0	0	- Pembelian
16	Hand Sanitizer Spray 55 ml Merek Antis	0	0	60	60	0	0	0	0	- Pembelian
17	Disinfektan Merek Diversey	0	0	10	6	4	4	880.000	3.520.000	Pembelian
18	Sanitizer Gel Merek Onemed	0	0	10	2	8	8	3.212.000	25.696.000	Pembelian
19	Hand Sanitizer Antis 55ml	0	0	35	30	5	5	67.360	336.800	Pembelian
20	Hand Sanitizer Antis 55ml 2	0	0	1	1	0	0	0	0	- Pembelian
21	Masker Sensi Convex 4Ply Earloop isi 20	0	0	6	6	0	0	0	0	- Pembelian
22	Masker Keuangan Nov 2021	0	0	225	221	4	4	137.500	550.000	Pembelian
23	Masker Putih Nov 2021	0	0	100	100	0	0	0	0	- Pembelian
24	Hand Sanitizer Nov 2021	0	0	11	11	0	0	0	0	- Pembelian
25	Paket Health Kit Pencegahan Covid - 19 di BKF	0	0	250	250	0	0	0	0	- Pembelian
26	APD (Hazmat, Helm, Kacamata, Sepatu Boot, dan Masker)	2	6.600.000	0	0	0	2	6.600.000	13.200.000	Saldo Awal

Aset Tetap

Rp21.965.515.958

## C.2. Aset Tetap

Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp21.965.515.958 dan Rp27.926.386.628 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian aset tetap Badan Kebijakan Fiskal per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 20**  
**Rincian Aset Tetap**  
**Per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	31 DES 2021	31 DES 2020
1	Tanah	4.018.902.000	4.018.902.000
2	Peralatan dan Mesin	86.288.958.023	90.754.061.611
3	Gedung dan Bangunan	3.869.560.997	3.869.560.997
4	Jaringan	1.257.708.832	1.257.708.832
5	Aset Tetap Renovasi	606.020.800	
6	Aset Tetap Lainnya	869.289.679	719.514.479
7	Kontruksi Dalam Pengerjaan	79.904.000	145.464.000
<b>Jumlah</b>		<b>96.990.344.331</b>	<b>100.765.211.919</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(75.024.828.373)	(72.838.825.291)
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>		<b>21.965.515.958</b>	<b>27.926.386.628</b>

Pengurangan nilai aset tetap selain karena adanya beban penyusutan juga

terjadi karena proses penghentian penggunaan BMN dalam rangka tindak lanjut sensus BMN 2018-2020. Detail transaksi akan dijelaskan pada bagian rincian selanjutnya

Tanah

Rp4.018.902.000

### C.2.1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Kebijakan Fiskal per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.018.902.000 dan Rp4.018.902.000. Rincian saldo tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut:

*Tabel 21  
Rincian Tanah  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

No.	Uraian	31 DES 2021	31 DES 2020
1	Tanah Persil	3.897.713.000	3.897.713.000
2	Lapangan	121.189.000	121.189.000
<b>Jumlah</b>		<b>4.018.902.000</b>	<b>4.018.902.000</b>

*Tabel 22  
Rincian Saldo Tanah  
Per 31 Desember 2021*

No.	Kode Barang	Lokasi	Luas m <sup>2</sup>	Nilai
1	2010102003	Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-A1, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi.	290	3.478.135.000
2	2010102003	Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-306, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi.	45	419.578.000
3	2010307009	Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-306, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi.	13	121.189.000
<b>Jumlah</b>			<b>348</b>	<b>4.018.902.000</b>

Saldo Tanah milik BKF per 31 Desember 2021 seluas 348 m<sup>2</sup> / Rp2.598.368.000 terdiri dari 2 kelompok, yaitu Tanah Persil dan Lapangan.

Tanah persil sendiri terdiri dari 2 bidang, yaitu Tanah Bangunan Gudang seluas 290 m<sup>2</sup> / Rp2.204.518.000. yang berlokasi di Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-A1, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi digunakan sebagai gedung Arsip BKF dan Tanah Bangunan Gudang seluas 45 m<sup>2</sup> / Rp305.573.000 yang berlokasi di Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-306, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi. Terdapat koreksi luas tanah pada aset tanah bangunan garasi sebesar 15 m<sup>2</sup> setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penyesuaian sertifikat tanah.

Sedangkan untuk kelompok Lapangan terdiri dari 1 sub-sub kelompok yaitu Tanah untuk Jalan Khusus/Komplek seluas 13 m<sup>2</sup> / Rp88.277.000 yang berlokasi di Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-306, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi. Seluruh bidang tanah milik Badan Kebijakan Fiskal telah dilakukan sertifikasi sesuai detail nilai dan penggunaan sebagai berikut:

TANAH								
No.	Nama dan Kode Barang	No. KIB	Luas (m2)	Lokasi	Tanggal Perolehan	Nilai	Bukti Kepemilikan	Status
1	Tanah Bangunan Gudang (2010102003)	1	290	Kav. B-50-A-1 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat	1/1/1980	3,478,135,000	Sertifikat Nomor 10.05.02.05.4.003.84	digunakan untuk Bangunan Gudang Tertutup Permanen yaitu Gedung Arsip
2	Tanah Bangunan Gudang (2010102003)	2	45	Kav. B-50-306 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat	1/1/1980	419,578,000	Sertifikat Nomor 10.05.02.05.4.003.59	digunakan untuk perluasan Bangunan Gudang Tertutup Permanen yaitu Gedung Arsip
3	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek (2010307009)	3	13	Kav. B-50-306 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat	1/1/1980	121,189,000	Sertifikat Nomor 10.05.02.05.4.003.59	digunakan untuk jalan khusus/Komplek
Jumlah						Rp. 4,018,902,000		

Peralatan dan

Mesin

Rp86.288.958.023

### C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp86.288.958.023 dan Rp90.754.061.611. Perubahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp. 90.754.061.611</b>
Mutasi Tambah:	
- Penambahan Saldo Awal	Rp. 0
- Pembelian (101)	Rp. 1.455.144.497
- Hibah Masuk	Rp. 0
- Reklasifikasi Masuk (107)	Rp. 1.292.499.800
Mutasi Kurang	
- Transfer Keluar (302)	Rp. 12.640.000
- Reklasifikasi Keluar (304)	Rp. 1.292.499.800
- Penghentian Aset dari Penggunaan (401)	Rp. 5.907.608.085
<b>Saldo Per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp. 86.288.958.023</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	<b>Rp. 73.821.900.297</b>
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp. 12.467.057.726</b>

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin sebagai berikut:

## Transaksi Penambahan dari Pembelian

Alat Bantu	Rp.	-
Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	-
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rp.	-
Alat Bengkel Bermesin	Rp.	-
Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp.	-
Alat Ukur	Rp.	1.182.500
Alat Kantor	Rp.	285.204.000
Alat Rumah Tangga	Rp.	764.189.997
Alat Studio	Rp.	196.350.000
Alat Komunikasi	Rp.	26.840.000
Peralatan Pemancar	Rp.	7.068.000
Alat Kedokteran	Rp.	-
Unit Alat Laboratorium	Rp.	-
Alat Laboratorium Standarisasi	Rp.	-
Kalibrasi & Instrumentasi	Rp.	-
Alat Khusus Kepolisian	Rp.	-
Komputer Unit	Rp.	122.210.000
Peralatan Komputer	Rp.	52.100.000
Alat SAR	Rp.	-
Alat Kerja Penerbangan	Rp.	-
Unit Alat Peralatan Proses/Produksi	Rp.	-
Peralatan Olah Raga	Rp.	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.455.144.497</b>

Selain transaksi pembelian dimaksud, rincian penambahan nilai Peralatan dan Mesin dari hasil reklasifikasi aset tetap sebagai tindak lanjut pengawasan dan pengendalian penatausahaan BMN sebagai berikut

Alat Bantu	Rp.	-
Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	-
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rp.	-
Alat Bengkel Bermesin	Rp.	-
Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp.	5.830.000
Alat Ukur	Rp.	-
Alat Kantor	Rp.	1.286.669.800
Alat Rumah Tangga	Rp.	-
Alat Studio	Rp.	-
Alat Komunikasi	Rp.	-
Peralatan Pemancar	Rp.	-
Alat Kedokteran	Rp.	-
Unit Alat Laboratorium	Rp.	-
Alat Laboratorium Standarisasi	Rp.	-
Kalibrasi & Instrumentasi	Rp.	-
Alat Khusus Kepolisian	Rp.	-
Komputer Unit	Rp.	-
Peralatan Komputer	Rp.	-
Alat SAR	Rp.	-
Alat Kerja Penerbangan	Rp.	-
Unit Alat Peralatan Proses/Produksi	Rp.	-
Peralatan Olah Raga	Rp.	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.292.499.800</b>

Adapun mutasi kurang peralatan dan mesin terjadi akibat transaksi transfer keluar tablet PC berupa pengalihan penggunaan 1 unit Tablet PC senilai Rp12.640.000 kepada Sekretariat Jenderal Kekayaan Negara c.q. LMAN berdasarkan BAST-1/KF.1/2021 tanggal 6 April 2021. Selebihnya, dilakukan transaksi reklasifikasi keluar sebagai pasangan transaksi reklasifikasi masuk pengawasan dan pengendalian penatausahaan BMN dan reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya sebagai tindak lanjut proses pemindahtanganan BMN dalam proses penghapusan. Pengurangan BMN Peralatan dan Mesin melalui reklasifikasi keluar dan penghentian penggunaan BMN melalui transaksi reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya sebagai berikut:

a. Transaksi Pengurangan dari penghentian penggunaan aset tetap

Alat Bantu	Rp.	-
Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	237.067.000
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rp.	-
Alat Bengkel Bermesin	Rp.	-
Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp.	-
Alat Ukur	Rp.	-
Alat Kantor	Rp.	56.036.115
Alat Rumah Tangga	Rp.	334.219.430
Alat Studio	Rp.	-
Alat Komunikasi	Rp.	-
Peralatan Pemancar	Rp.	-
Alat Kedokteran	Rp.	-
Unit Alat Laboratorium	Rp.	-
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Rp.	-
Alat Khusus Kepolisian	Rp.	-
Komputer Unit	Rp.	5.280.285.540
Peralatan Komputer	Rp.	-
Alat SAR	Rp.	-
Alat Kerja Penerbangan	Rp.	-
Unit Alat Peralatan Proses/Produksi	Rp.	-
Peralatan Olah Raga	Rp.	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.907.608.085</b>

b. Transaksi Reklasifikasi Keluar

Alat Bantu	Rp.	-
Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	-
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rp.	-
Alat Bengkel Bermesin	Rp.	-
Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp.	-
Alat Ukur	Rp.	-
Alat Kantor	Rp.	-
Alat Rumah Tangga	Rp.	-
Alat Studio	Rp.	-
Alat Komunikasi	Rp.	-
Peralatan Pemancar	Rp.	-
Alat Kedokteran	Rp.	-
Unit Alat Laboratorium	Rp.	-
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Rp.	5.830.000
Alat Khusus Kepolisian	Rp.	19.525.000
Komputer Unit	Rp.	-
Peralatan Komputer	Rp.	-
Alat SAR	Rp.	-
Alat Kerja Penerbangan	Rp.	1.267.144.800
Unit Alat Peralatan Proses/Produksi	Rp.	-
Peralatan Olah Raga	Rp.	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.292.499.800</b>

Saldo Peralatan dan Mesin termasuk Barang Milik Negara yang digunakan dalam mengatasi pandemi COVID-19 selain persediaan dan KDP yang masih bersaldo sampai dengan periode pelaporan BMN pada 31 Desember 2021. Berikut adalah daftar BMN dimaksud, yaitu:

Tabel 23

Rincian Peralatan dan Mesin dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 Per 31 Desember 2021

No	Kode BMN	Nama Barang	31 Desember 2020				31 Desember 2021				Sumber Perolehan
			Intra - komptabel		Ekstra - komptabel		Intra - komptabel		Ekstra - komptabel		
			unit	Rp	unit	Rp	unit	Nilai	unit	Nilai	
1	3030308012	Termometer Standar	2	7.073.000	-	-	3	8.255.500	-	-	Pembelian
2	3150302005	Tenda	1	47.374.800	-	-	1	47.374.800	-	-	Pembelian
3	3060102105	Weapon & Metal Detector	1	63.250.000	-	-	1	63.250.000	-	-	Pembelian
4	3070101119	Pulse Oximeter	-	-	-	-	-	-	2	1.506.100	Pembelian
5	3070101155	UV Sterilizer	5	29.639.500	-	-	5	29.639.500	1	700.900	Pembelian
6	3050105017	Mesin Absensi	10	143.000.000	-	-	10	143.000.000	-	-	Pembelian

Pengadaan pembelian tersebut menggunakan belanja modal Peralatan dan Mesin Penanganan COVID dengan kode pelaksanaan anggaran 532119.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan  
Rp3.869.560.997

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp3.869.560.997. Tidak terdapat mutasi nilai aset gedung dan bangunan selama periode pelaporan.



Rincian saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada tabel berikut:

<b>Saldo Per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp. 3.869.560.997</b>
Mutasi tambah:	
- Koreksi Manual (209)	Rp. 0
- Pengembangan Nilai Aset	Rp. 0
<b>Saldo Per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp. 3.869.560.997</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	Rp. 581.529.043
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp. 3.288.031.954</b>

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan sebagai berikut:

*Tabel 24*  
*Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan BKF*  
*Per 31 Desember 2021*

No.	Nama dan Kode Barang	No. KIB	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Tanggal Perolehan	Nilai (Rp)	Bukti Kepemilikan	Status
1	Bangunan Gudang Tertutup Permanen (4010102001)	2	386	Kav. B-50-A-1 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat	01/01/1984	987.541.000	Sertifikat Nomor 10.05.02.05.4.003.84	digunakan sebagai Gedung Arsip
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen (4010102001)	3	27	Kav. B-50-306 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat	01/01/1980	691.660.997	Sertifikat Nomor 10.05.02.05.4.003.59	digunakan sebagai Gedung Arsip
3	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen (4010202004)	3	120	Jalan Sakti IV No. 10, Kemanggisan Jakarta Barat	15/03/1984	329.872.000	IMB No. 01412/IMB/1/985	ditempati oleh Drs. Suhadi, pensiunan BKF. Tanah di man bangunan berdiri adalah milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
4	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen (4010202004)	4	320	Jalan Sanjaya Buntu No.1, Jakarta Selatan	31/12/2005	1.860.487.000	Belum diperoleh dari Biro Umum Setjen / SPTJM	ditempati oleh Kepala BKF, a.n. Febrio Kacaribu SIP Nomor Kep-16/KF/2020
<b>Jumlah</b>						<b>3.869.560.997</b>		

#### C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

*Jalan, Irigasi dan Jaringan*  
*Rp1.257.708.832*

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.257.708.832. Tidak terdapat mutasi nilai jalan irigasi dan jaringan pada tahun anggaran 2021. Nilai buku jalan, irigasi, dan jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp636.309.799 yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp621.399.033.

<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp. 1.257.708.832</b>
Mutasi tambah:	
- Pembelian	Rp. -
- Transfer Masuk	Rp. -
Mutasi kurang:	
- Koreksi pencatatan nilai/kuantitas	Rp. -
- Reklasifikasi Keluar	Rp. -
- Transfer Keluar	Rp. -
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp. 1.257.708.832</b>
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2020	Rp. 621.399.033
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp. 636.309.799</b>

Aset Tetap  
Renovasi  
Rp606.020.800

### C.2.5. Aset Tetap Renovasi

Saldo Aset Tetap Renovasi Per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp606.020.800 dan Rp0. Aset Tetap Renovasi merupakan aset tetap yang terbentuk akibat renovasi atas Aset Tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi Aset Tetap.

<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp. -</b>
Mutasi tambah:	
- Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 606.020.800
- Koreksi Manual	Rp. -
Mutasi kurang:	
- Transfer Keluar	Rp. -
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp. 606.020.800</b>
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2020	Rp. -
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp. 606.020.800</b>

Aset Tetap Renovasi yang dibentuk pada Badan Kebijakan Fiskal berupa Gedung dan Bangunan dalam Renovasi hasil pekerjaan renovasi gedung RM Notohamiprodo lantai 3 dalam rangka piloting ruang kerja berkonsep Activity Based Workplace. Aset Tetap Renovasi dimaksud direncanakan untuk ditransfer kepada satuan kerja pemilik aset pada Tahun Anggaran 2022.

Konstruksi Dalam  
Pengerjaan  
Rp79.904.000.

### C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp79.904.000 dan Rp145.464.000. Saldo awal nilai konstruksi dalam pengerjaan pada periode pelaporan merupakan nilai pengelolaan kegiatan perencanaan konstruksi renovasi gedung kantor Badan Kebijakan Fiskal dan perencanaan konstruksi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya untuk Gedung kantor Badan Kebijakan Fiskal. Adapun Rincian saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada tabel berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp.</b>	<b>145.464.000</b>
Mutasi tambah:		
- Perolehan KDP (502)	Rp.	-
- Pengembangan KDP (503)	Rp.	540.460.800
Mutasi kurang:		
- Penghapusan/Penghentian KDP (505)	Rp.	-
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP (105)	Rp.	606.020.800
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp.</b>	<b>79.904.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2021	Rp.	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp.</b>	<b>79.904.000</b>

Pada tahun 2020 telah direncanakan pekerjaan konstruksi berupa Renovasi Ruang Kerja dalam rangka implementasi Activity Based Workplace (ABW) pada lantai 3 Gedung R.M Notohamiprodo serta konstruksi Peralatan dan Mesin Panel Surya Atap Gedung Kantor RM Notohamiprodo. Namun demikian, sesuai kebijakan penanganan COVID-19, belanja modal Gedung dan belanja modal Peralatan Mesin mengalami realokasi anggaran. Sampai dengan 31 Desember 2020 telah dilakukan perencanaan awal konstruksi melalui pengadaan konsultan perencana konstruksi untuk pekerjaan dimaksud secara terpisah. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sesuai biaya perencanaan atas konstruksi dimaksud.

Biaya konsultan perencana untuk pekerjaan konstruksi pembangkit listrik tenaga surya pada atap gedung RM Notohamiprodo dicatat sebagai peralatan dan mesin dalam pengerjaan untuk selanjutnya diselesaikan menjadi aset tetap peralatan dan mesin. Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 serta arahan untuk melakukan analisa teknis struktur bangunan gedung, maka pelaksanaan konstruksi pembangkit listrik tenaga surya pada atap gedung RM Notohamiprodo ditunda ke tahun anggaran 2022.

Gedung Kantor BKF merupakan aset Gedung dan Bangunan yang tercatat pada unit eselon I Sekretariat Jenderal, sehingga biaya perencanaan atas renovasi gedung dicatat sebagai aset tetap lainnya dalam pengerjaan, untuk kemudian diselesaikan menjadi Aset Tetap Renovasi dan ditransfer keluar ke satker pemilik Gedung. Sehubungan dengan refocusing anggaran TA 2020 untuk penanganan pandemi COVID-19, maka pelaksanaan konstruksi renovasi gedung kantor dilakukan pada TA 2021. Pelaksanaan konstruksi renovasi dilakukan melalui kontrak pengerjaan pada 13 Juli 2021 berdasarkan S-8/PPK/PBJ/KF.15/2021. Pelaksanaan pekerjaan direncanakan selama 90 hari kerja sejak 14 Juli 2021 hingga 11 Oktober 2021. Selanjutnya hasil pekerjaan dicatat sebagai pengembangan Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan, dan kemudian diselesaikan menjadi Aset Tetap Renovasi dan menjadi penambah dan pengurang nilai KDP Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan.

Aset Tetap Lainnya  
Rp869.289.679

### C.2.7. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp869.289.679 dan Rp719.514.479 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan.

<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp. 719.514.479</b>
Mutasi tambah:	
- Pembelian (101)	Rp. 149.775.200
Mutasi kurang:	
- Reklasifikasi Keluar	Rp. -
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp. 869.289.679</b>
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2020	Rp. -
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp. 869.289.679</b>

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya sebagai berikut:

Transaksi Penambahan dari Pembelian

Bahan Perpustakaan Tercetak	Rp. 127.576.100
Kartografi, Naskah, dan Lukisan	Rp. 22.199.100
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 149.775.200</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini

Akm. Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp75.024.828.373.

### C.2.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah Rp75.024.828.373. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 tersaji pada Tabel 24.

Tabel 25  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
Per 31 Desember 2021

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	86.288.958.023	73.821.900.297	12.467.057.726
2	Gedung dan Bangunan	3.869.560.997	581.529.043	3.288.031.954
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.257.708.832	621.399.033	636.309.799
4	Aset Tetap Renovasi	606.020.800	-	606.020.800
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	79.904.000	-	79.904.000
5	Aset Tetap Lainnya	869.289.679	-	869.289.679
	<b>Total</b>	<b>92.971.442.331</b>	<b>75.024.828.373</b>	<b>17.946.613.958</b>

### C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya  
Rp3.052.519.720

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.052.519.720 dan Rp5.931.022.904 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Secara ringkas, aset lainnya pada Badan Kebijakan Fiskal terdiri atas Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain berupa Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

Perubahan nilai aset lainnya pada periode pelaporan diakibatkan adanya penghentian penggunaan aset tetap sehingga menimbulkan transaksi penambahan aset lain-lain berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan serta pengusulan penghapusan atas BMN yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan sehingga menimbulkan transaksi pengurangan aset lain-lain.

Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut terdiri dari:

*Tabel 26*  
*Rincian Aset Lainnya*  
*Per 31 Desember 2021 dan 2020*

No.	Uraian	31 DES 2021	31 DES 2020
1	Aset Tak Berwujud	3.039.924.720	2.733.004.720
2	Aset Lain-Lain	12.595.000	3.198.018.184
	<b>Jumlah</b>	<b>3.052.519.720</b>	<b>5.931.022.904</b>
	Akumulasi Penyusutan	2.523.069.961	5.135.876.399
	<b>Nilai Buku</b>	<b>529.449.759</b>	<b>795.146.505</b>

Aset Tak Berwujud  
Rp3.039.924.720.

#### C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.039.924.720 dan Rp2.733.004.720. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Kebijakan Fiskal berupa *software* komputer yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Adapun rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 27**  
**Rincian Aset Tak Berwujud**  
**Per 31 Desember 2021**

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	3.039.924.720
<b>Jumlah</b>		<b>3.039.924.720</b>

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut :

<b>Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp. 2.733.004.720</b>
Mutasi tambah:	
- Pembelian (101)	Rp. 227.920.000
- Pengembangan Nilai Aset Langsung (202)	Rp. 79.000.000
Mutasi kurang:	
- Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp. 0
<b>Nilai perolehan per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp. 3.039.924.720</b>
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	Rp. 2.510.474.961
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp. 529.449.759</b>

### C.3.2. Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain*  
*Rp12.595.000*

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp12.595.000 dan Rp3.198.018.184. Aset lain-lain adalah Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Kebijakan Fiskal.

Perubahan nilai perolehan aset lain-lain pada periode pelaporan diakibatkan adanya penghapusan BMN yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan. Adapun detail transaksi perubahan aset lain-lain ialah sebagai berikut:

<b>Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp. 3.198.018.184</b>
Mutasi tambah:	
- Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lain	Rp. 5.907.608.085
Mutasi kurang:	
- Penghapusan	Rp. 3.198.018.184
- Pencatatan Barang yang mau dihapuskan	Rp. 5.895.013.085
<b>Nilai perolehan per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp. 12.595.000</b>
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	Rp. 12.595.000
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp. 0</b>

Transaksi penambahan dari reklasifikasi aset tetap ke aset lain

Alat Bantu	Rp.	0
Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	237.067.000
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rp.	0
Alat Bengkel Bermesin	Rp.	0
Alat Kantor	Rp.	56.036.115
Alat Rumah Tangga	Rp.	334.219.430
Alat Studio	Rp.	0
Alat Komunikasi	Rp.	0
Peralatan Pemancar	Rp.	0
Komputer Unit	Rp.	5.280.285.540
Peralatan Komputer	Rp.	0
Aset Tak Berwujud	Rp.	0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.907.608.085</b>

Transaksi pengurangan dari transaksi penghapusan BMN hasil sensus 2018-2019 ialah sebagai berikut:

Alat Bantu	Rp.	139.489.099
Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	2.585.200.000
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rp.	29.865.000
Alat Bengkel Bermesin	Rp.	0
Alat Kantor	Rp.	48.336.193
Alat Rumah Tangga	Rp.	183.598.764
Alat Studio	Rp.	753.500
Alat Komunikasi	Rp.	210.054.578
Peralatan Pemancar	Rp.	0
Komputer Unit	Rp.	0
Peralatan Komputer	Rp.	721.050
Aset Tak Berwujud	Rp.	0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.198.018.184</b>

Transaksi Pengurangan dari usulan barang rusak berat ke pengelola/pencatatan barang yang mau dihapuskan ialah sebagai berikut:

Alat Bantu	Rp.	0
Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	237.067.000
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rp.	0
Alat Bengkel Bermesin	Rp.	0
Alat Kantor	Rp.	56.036.115
Alat Rumah Tangga	Rp.	321.624.430
Alat Studio	Rp.	0
Alat Komunikasi	Rp.	0
Peralatan Pemancar	Rp.	0
Komputer Unit	Rp.	5.280.285.540
Peralatan Komputer	Rp.	0
Aset Tak Berwujud	Rp.	0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.895.013.085</b>

Akm. Penyusutan  
Aset lainnya  
Rp2.523.069.961.

### C.3.3. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah Rp2.523.069.961. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Tabel 28  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya  
Per 31 Desember 2021

No.	Uraian	31 DES 2021	31 DES 2020
1	Aset Tak Berwujud	3.039.924.720	2.733.004.720
2	Aset Lain-Lain	12.595.000	3.198.018.184
	<b>Jumlah</b>	<b>3.052.519.720</b>	<b>5.931.022.904</b>
	Akumulasi Penyusutan	2.523.069.961	5.135.876.399
	<b>Nilai Buku</b>	<b>529.449.759</b>	<b>795.146.505</b>

### C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Utang kepada  
Pihak ketiga  
Rp2.635.656

#### C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp2.635.656 dan Rp151.173.448. Saldo per 31 Desember 2021 berasal dari belanja barang yang masih harus dibayar berupa tagihan listrik dan air bulan Desember. Pembayaran baru dilakukan di bulan Januari 2022.

### C.5. Ekuitas

Ekuitas  
Rp23.402.970.752

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp23.402.970.752 dan Rp30.103.028.314. Saldo ekuitas per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp6.700.057.562 atau 22,26 persen dari tahun anggaran sebelumnya. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



**D. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN OPERASIONAL****Pendapatan**

Operasional

Rp8.402.800

**D.1. PENDAPATAN OPERASIONAL**

Nilai Pendapatan Operasional per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8.402.800 dan Rp2.772.000.

**Beban Operasional**

Rp147.270.158.408

**D.2. BEBAN OPERASIONAL**

Nilai Beban Operasional per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp147.270.158.408 dan Rp122.470.513.527.

**Beban Pegawai**

Rp40.671.574.892

**D.2.1. Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp40.671.574.892 dan Rp38.868.442.985. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian beban pegawai untuk Per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel berikut:

*Tabel 29*  
*Rincian Beban Pegawai*  
*Per 31 Desember 2021 dan 2020*

Uraian	31 DES 2021	31 DES 2020	Naik/ (Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	25.818.280.950	25.489.137.240	329.143.710	1,29
Beban Pembulatan Gaji PNS	412.205	392.654	19.551	4,98
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.761.052.690	1.737.878.684	23.174.006	1,33
Beban Tunj. Anak PNS	496.715.110	481.408.386	15.306.724	3,18
Beban Tunj. Struktural PNS	893.480.000	979.600.000	(86.120.000)	(8,79)
Beban Tunj. Fungsional PNS	3.249.780.000	2.960.770.000	289.010.000	9,76
Beban Tunj. PPh PNS	156.757.843	193.641.861	(36.884.018)	(19,05)
Beban Tunj. Beras PNS	1.430.005.320	1.212.093.540	217.911.780	17,98
Beban Uang Makan PNS	4.567.929.000	4.434.999.000	132.930.000	3,00
Beban Tunj. Umum PNS	741.160.000	801.940.000	(60.780.000)	(7,58)
Beban Uang Lembur	1.428.426.000	612.689.000	815.737.000	133,14
Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	136.273.774			
<b>Realisasi Beban Bruto</b>	<b>40.680.272.892</b>	<b>38.904.550.365</b>	<b>1.775.722.527</b>	<b>4,56</b>
Pengembalian Beban	8.698.000	36.107.380	(27.409.380)	(75,91)
<b>Realisasi Beban Netto</b>	<b>40.671.574.892</b>	<b>38.868.442.985</b>	<b>1.803.131.907</b>	<b>4,64</b>

**Beban Persediaan**

Rp991.941.651

**D.2.2. Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp991.941.651 dan Rp2.055.287.759. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan

maupun tidak dipasarkan.

Rincian beban persediaan untuk Per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 30**  
**Rincian Beban Persediaan**  
**Per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	31 DES 2021	31 DES 2020	Naik/ (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	991.941.651	2.055.287.759	(1.063.346.108)	(51,74)
<b>Realisasi Belanja Netto</b>	<b>991.941.651</b>	<b>2.055.287.759</b>	<b>(1.063.346.108)</b>	<b>(51,74)</b>

*Beban Barang dan  
Jasa*  
*Rp85.983.480.541*

### D.2.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp85.983.480.541 dan Rp61.235.579.112. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian beban jasa untuk Per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 31**  
**Rincian Beban Barang dan Jasa**  
**Per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	31 DES 2021	31 DES 2020	Naik/ (Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	4.289.903.377	3.787.912.678	501.990.699	13,25
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	5.858.493	7.847.710	(1.989.217)	(25,35)
Beban Honor Operasional Satuan kerja	799.955.500	894.650.000	(94.694.500)	(10,58)
Beban Barang Operasional Lainnya	25.316.000	112.971.550	(87.655.550)	(77,59)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.024.993.409	657.165.358	367.828.051	55,98
Beban Bahan	1.340.508.859	2.882.953.720	(1.857.960.311)	(64,45)
Beban Honor Output Kegiatan	1.690.830.000	1.526.699.400	186.190.541	12,20
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.301.674.474	882.260.591	419.413.883	47,65
Beban Langganan Listrik	27.884.142	28.538.249	(654.107)	(2,33)
Beban Langganan Telepon	53.328.473	77.995.555	(24.667.082)	(31,64)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	131.131.406	865.600	130.265.806	151,13
Beban Langganan Air	790.100	139.725.612	(138.935.512)	(17,52)
Beban Jasa Konsultan	2.238.815.200	2.166.903.800	71.911.400	3,32
Beban Sewa	1.760.346.091	1.474.625.416	285.720.675	19,38
Beban Jasa Profesi	2.087.819.615	2.065.868.500	21.951.115	1,06
Beban Jasa Lainnya	68.742.772.238	44.028.145.774	24.714.626.464	56,13
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	773.966.364	513.797.099	260.169.265	50,66
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	3.396.800		3.396.800	100,00
<b>Realisasi Beban Bruto</b>	<b>86.299.290.541</b>	<b>61.248.926.612</b>	<b>23.687.013.931</b>	<b>38,67</b>
Pengembalian Beban	315.810.000	13.347.500	302.462.500	2.266,06
<b>Realisasi Beban Netto</b>	<b>85.983.480.541</b>	<b>61.235.579.112</b>	<b>23.384.551.431</b>	<b>38,19</b>

*Beban*  
*Pemeliharaan*  
*Rp5.065.650.074*

### D.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.065.650.074 dan Rp6.949.759.031. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk Per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel berikut:

*Tabel 32*  
*Rincian Beban Pemeliharaan*  
*Per 31 Desember 2021 dan 2020*

Uraian	31 DES 2021	31 DES 2020	Naik/ (Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.231.099.065	1.643.123.462	(412.024.397)	(33,47)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.400.999.374	4.952.475.438	(1.551.476.064)	(45,62)
Beban Pemeliharaan Jaringan	9.504.000	35.310.000	(25.806.000)	(271,53)
Beban Pemeliharaan Lainnya	71.049.880	19.881.125	51.168.755	72,02
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	352.997.755	298.969.006	54.028.749	15,31
<b>Realisasi Beban Netto</b>	<b>5.065.650.074</b>	<b>6.949.759.031</b>	<b>(1.884.108.957)</b>	<b>(37,19)</b>

*Beban Perjalanan Dinas*  
*Rp5.948.698.248*

#### **D.2.5. Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.948.698.248 dan Rp33.104.405.484. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel berikut:

*Tabel 33*  
*Rincian Beban Perjalanan Dinas*  
*Per 31 Desember 2021 dan 2020*

Uraian	31 DES 2021	31 DES 2020	Naik/ (Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	1.084.220.094	894.415.324	189.804.770	21,22
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	136.336.000	300.816.000	(164.480.000)	(54,68)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.571.175.050	700.770.000	1.870.405.050	266,91
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	629.993.820	541.352.506	88.641.314	16,37
Beban Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	1.530.233.284	1.262.764.597	267.468.687	21,18
<b>Realisasi Belanja Bruto</b>	<b>5.951.958.248</b>	<b>3.700.118.427</b>	<b>2.251.839.821</b>	<b>60,86</b>
Pengembalian Belanja	3.260.000	656.000	2.604.000	396,95
<b>Realisasi Belanja Netto</b>	<b>5.948.698.248</b>	<b>3.699.462.427</b>	<b>2.249.235.821</b>	<b>60,80</b>

Beban Penyusutan  
dan Amortisasi  
Rp8.608.730.173

#### D.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8.608.730.173 dan Rp9.662.079.017. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 34  
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 DES 2021	31 DES 2020	Naik/ (Turun)	%
B. Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.851.223.013	9.013.046.914	(1.161.823.901)	(12,89)
B. Penyusutan Gedung dan Bangunan	154.688.160	156.441.037	(1.752.877)	(1,12)
B. Penyusutan Jaringan	28.942.754	28.942.754	-	0,00
B. Amortisasi Software	572.616.746	463.648.312	108.968.434	23,50
B. Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	1.259.500			
<b>Realisasi Belanja Netto</b>	<b>8.608.730.173</b>	<b>9.662.079.017</b>	<b>(1.163.576.778)</b>	<b>(12,04)</b>

Beban Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih  
Rp82.829

#### D.2.7. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp82.829 dan (Rp96.804). Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 35  
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
Per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 DES 2021	31 DES 2020	Naik/ (Turun)	%
B. Penyisihan Piutang Lainnya	19.461		19.461	
B. Penyisihan Piutang Tak Tertagih	63.368	(96.804)	160.172	165,46
<b>Realisasi Belanja Netto</b>	<b>82.829</b>	<b>(96.804)</b>	<b>179.633</b>	<b>185,56</b>

Surplus/Defisit dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp722.347.711

### D.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 36  
Rincian Surplus/Defisit  
Per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 DES 2021	31 DES 2020	Naik/ (Turun)	%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	539.324.286	282.789.799	256.534.487	90,72
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		107.302.864	(107.302.864)	-
Surplus/ (Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar	539.324.286	175.486.935	363.837.351	207,33
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	181.756.064	291.331.556	(109.575.492)	(37,61)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		22.116.350	(22.116.350)	(100,00)
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	181.756.064	269.215.206	(87.459.142)	(32,49)
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	721.080.350	444.702.141	276.378.209	62,15

## E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

<i>Ekuitas Awal</i> <i>Rp30.103.028.314</i>	<b>E.1. Ekuitas Awal</b> Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp30.103.028.314 dan Rp35.332.490.924.
<i>Surplus(defisit) LO</i> <i>(Rp146.540.675.258)</i>	<b>E.2. Surplus (Defisit) LO</b> Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah defisit sebesar Rp146.540.675.258 dan Rp122.023.039.386. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.
<i>Jumlah Penyesuaian</i> <i>Nilai Tahun Berjalan</i> <i>(Rp65.397.740)</i>	<b>E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan</b> Jumlah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp65.397.740) dan Rp30.439.937. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan periode Desember 2021 merupakan nilai koreksi aset tetap non revaluasi.
<i>Transaksi Antar</i> <i>Entitas</i> <i>Rp139.906.015.436</i>	<b>E.4. Transaksi Antar Entitas</b> Jumlah Transaksi Antar Entitas periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp139.906.015.436 dan Rp116.763.136.839.
<i>Kenaikan/ Penurunan</i> <i>Ekuitas</i> <i>(Rp6.698.796.537)</i>	<b>E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas</b> Jumlah Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp6.698.796.537 dan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar adalah Rp5.229.462.610.
<i>Ekuitas Akhir</i> <i>Rp23.402.970.752</i>	<b>E.6. Ekuitas Akhir</b> Ekuitas Akhir merupakan selisih antara Ekuitas Awal (setelah ditambah dengan Surplus/(Defisit) LO) dengan transaksi atas entitas. Jumlah Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp23.402.970.752 dan Rp30.103.028.314.

## **F. PENGUNGKAPAN – PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1. Tuntutan Ganti Rugi**

#### **1. Kasus kerugian negara a.n. Ahmad Bahri Rambe**

Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada Tahun 2017 menetapkan kerugian negara berdasarkan Surat Penetapan Kerugian Negara sebesar Rp56.250.000 a.n. Ahmad Bahri Rambe. Sekretaris BKF telah mengusulkan penerbitan Surat Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR) melalui surat kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan (Rocankeu) nomor SR-16/KF.1/2017 tanggal 24 Oktober 2017 hal Usulan Penerbitan SPGR a.n. Sdr. Ahmad Bahri Rambe.

Hingga akhir tahun 2018 Sdr. Ahmad Bahri Rambe belum berhasil dihubungi, baik melalui sambungan telepon ataupun pada alamat sesuai data yang ada di BKF, tetapi dalam media sosial Facebook masih aktif.

Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara (TAPKN) Rocankeu telah melakukan rapat pembahasan usulan penerbitan SPGR dan merekomendasikan untuk melakukan perbaikan dasar penetapan dan besaran nilai kerugian negara a.n. Sdr. Ahmad Bahri Rambe melalui surat Kepala Rocankeu nomor S-226/SJ.1/2018 tanggal 18 Mei 2018.

Pada tanggal 5 Juni 2018 telah dilakukan pertemuan antara wakil dari BKF, Biro Perencanaan dan Keuangan serta Biro SDM dan disepakati bahwa diperlukan surat penegasan dari Biro SDM mengenai perhitungan kerugian negara dimaksud, khususnya mengenai masa wajib kerja yang digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara.

Sekretaris BKF melalui Surat Nomor S-327/KF.1/2018 tanggal 25 Juni 2018 telah menyampaikan perbaikan besaran serta simulasi perhitungan kerugian negara a.n. Ahmad Bahri Rambe kepada Biro SDM untuk mendapatkan surat penegasan penetapan besaran kerugian negara.

Biro SDM melalui surat SR-386/SJ.5/2018 tanggal 3 September 2018 hal tanggapan atas Penyelesaian Besaran Kerugian Negara Sdr. Ahmad Bahri Rambe, menyampaikan besaran nilai kerugian negara yang diperhitungkan adalah sebesar Rp15.208.333.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.01/2014 dalam Proses Penyelesaian Tuntutan Ganti rugi perlu

ditetapkan nilai kerugian negara melalui surat penetapan nilai kerugian negara. Per 31 Desember 2019 Kepala BKF telah menetapkan kembali dengan Surat Penetapan Nilai Kerugian Negara senilai Rp15.208.333.

BKF berhasil mengetahui keberadaan tempat bekerja yang bersangkutan dan mencari kontak personal yang bersangkutan melalui jaringan alumni STAN dan akhirnya dapat berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Sdr. Ahmad Bahri Rambe menyatakan kesediaan untuk membayar ganti rugi dengan mekanisme mencicil selama 12 bulan dan menyetujui SKTJM yang telah ditandatangani per tanggal 7 September 2021 dengan pembayaran secara mencicil yang dimulai Bulan November 2021.

Pembayaran angsuran per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.534.722,00 sehingga masih terdapat saldo kerugian negara sebesar Rp12.673.611,00.

## **2. Kasus kerugian negara a.n. Dewi Setyaningrum**

Indikasi kerugian negara muncul sejak SK Pemberhentian Dewi Setyaningrum ditetapkan dengan KMK-3/SJ.55/UP.7/2021 tanggal 30 Desember 2020 (TMT akhir September 2020).

Tim TKPN BKF melakukan pemeriksaan atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal dengan hasil pemeriksaan Kerugian Negara tanggal 27 Januari 2021 dan menyimpulkan bahwa terjadi kerugian negara berupa masa ikatan dinas Diploma III STAN yang belum selesai dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) disebabkan karena perbuatan melawan hukum dari Saudara Dewi Setyaningrum (NIP 198812022009122003) Penata Muda (Gol III/a) jabatan Pelaksana pada Badan Kebijakan Fiskal.

Hasil pemeriksaan kerugian negara tersebut telah dilaporkan oleh Kepala BKF kepada Menteri Keuangan melalui Nota Dinas Nomor ND-491/KF.1/2021 tanggal 29 Maret 2021. Atas kerugian tersebut, telah diterbitkan SKTJM yang telah ditandatangani oleh Dewi Setyaningrum pada tanggal 8 Maret 2021. Pada tanggal 6 April 2021, yang bersangkutan telah membayar lunas seluruh kerugian tersebut dengan kode NTPN EDAF76U8E2FGQSTV ke kas negara.

## **3. Kasus kerugian negara a.n. Endra Sulistyono**

Indikasi kerugian negara muncul sejak Sdr. Endra Sulistyono yang merupakan pegawai pada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, BKF mengajukan permohonan pemberhentian melalui Nota Dinas Rahasia nomor ND-411/KF.5/2021 pada tanggal 15 September 2021 perihal Permohonan Berhenti sebagai PNS dan mengajukan pengunduran diri dari PNS dan



jabatan yang diembannya.

Tim TKPN BKF yang ditetapkan melalui KMK-55/MK.10.2021 untuk penyelesaian kerugian Endra Sulistyono melakukan pemeriksaan atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal dengan hasil pemeriksaan Kerugian Negara tanggal 29 September 2021 menyimpulkan bahwa terjadinya kekurangan uang milik negara a.n. Endra Sulistyono dengan NIP 199206282014111001, Pengatur Tk.I (Gol II/d) sebesar Rp19.720.000 yang mengakibatkan kerugian negara. Yang bersangkutan bersedia dan telah melunasi TGR tersebut sebelum mengundurkan diri yaitu pada tanggal 27 November 2021 dengan kode billing 820211127248013.

## F.2 Kegiatan Prioritas Nasional BKF

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, pada Kementerian Keuangan unit Badan Kebijakan Fiskal (BKF) terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I, III, dan VI.

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut.

**PN I** : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pagu Anggaran PN I adalah Rp1.019.696.000 dan total realisasi sebesar Rp853.410.250. Kegiatan dalam PN I ini antara lain sebagai berikut.

No	Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
1	Perbaikan Iklim Kemudahan Berusaha ( <i>Ease of Doing Business</i> ) dan Investasi	345.100.000	314.066.450	Rekomendasi	1	1	100
2	Penyusunan Kajian Produktivitas Modal dan Perbaikan Total <i>Factor Productivity</i> Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi	388.100.000	346.107.800	Rekomendasi	1	1	100
3	Kajian Efektifitas dan Efisiensi PPnBM di sektor properti	286.496.000	193.236.000	Rekomendasi	1	1	100
<b>Jumlah</b>		<b>1.019.696.000</b>	<b>853.410.250</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100</b>

**PN III** : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Pagu Anggaran PN III adalah Rp287.500.000. dan total realisasi sebesar Rp122.771.732. Kegiatan dalam PN III antara lain sebagai berikut.

No	Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
1	Kajian kebijakan perpajakan dalam mendukung SDM yang berkualitas dari aspek kesehatan masyarakat	287.500.000	127.771.732	Rekomendasi	1	1	100
<b>Jumlah</b>		<b>287.500.000</b>	<b>127.771.732</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>

**PN VI** : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Pagu Anggaran PN VI adalah Rp793.014.000 dan total realisasi sebesar Rp733.830.584. Kegiatan dalam PN VI antara lain sebagai berikut.

No	Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
1	Kajian Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana	793.014.000	733.830.584	Rekomendasi	1	1	100
<b>Jumlah</b>		<b>793.014.000</b>	<b>733.830.584</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>

### F.3 Kegiatan PEN-ICT pada BKF

Kegiatan-kegiatan PEN-ICT pada BKF adalah kegiatan yang secara khusus terkait pengelolaan sistem informasi dan teknologi pemerintahan, terdiri dari kebijakan dan rencana strategis teknologi informasi dan pengelolaan portal fiskal dan wiki BKF.

Dalam kebijakan dan rencana strategis teknologi informasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan diantaranya berupa pelaksanaan evaluasi ruang rapat digital sebagai upaya penguatan sarana dan prasarana ruang rapat untuk mendukung kegiatan *hybrid meeting* di Lingkungan BKF pada kondisi *new normal* saat ini, rapat pembahasan evaluasi dan pengembangan dashboard pemantauan output SIPANTAU (Sistem Informasi Dashboard Pemantauan Project), rapat pembahasan data bloomberg dan rapat pembahasan keamanan informasi.

Adapun terkait pengelolaan portal fiskal dan wiki BKF diantaranya berupa kegiatan pemutakhiran dan pengelolaan Wiki BKF Knowledge, penyiapan, evaluasi hingga pengembangan *front end* dan *back end* konten dan taksonomi BKF Knowledge Base untuk mendukung pengelolaan *Knowledge Management System* (KMS) pada portal fiskal yang Optimal di lingkungan BKF.

Realisasi belanja kegiatan PEN-ICT pada BKF pada tahun 2021 adalah sebesar Rp61.898.336 dari alokasi anggaran sebesar RP71.300.000 atau 86,81 persen

dari total anggaran. Jumlah realisasi tersebut tidak menggunakan akun khusus COVID-19 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

*Tabel 37  
Realisasi Kegiatan PE-ICT BKF  
Per 31 Desember 2021*

Akun	Alokasi Anggaran/ DIPA	Realisasi anggaran	%
<b>4677.FAB.001 Kebijakan dan rencana Strategis Teknologi Informasi</b>			
521211 Belanja Bahan	3.900.000	2.809.510	72,04
522151 Belanja Jasa Profesi	18.000.000	12.400.000	68,89
<b>Jumlah</b>	<b>21.900.000</b>	<b>15.209.510</b>	<b>69,45</b>
<b>4677.FAB.002 Portal Fiskal dan Wiki BKF</b>			
521211 Belanja Bahan	6.900.000	5.546.326	80,38
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	20.000.000	19.992.500	99,96
522151 Belanja Jasa Profesi	22.500.000	21.150.000	94,00
<b>Jumlah</b>	<b>49.400.000</b>	<b>46.688.826</b>	<b>94,51</b>
<b>Jumlah Kegiatan PEN BKF</b>	<b>71.300.000</b>	<b>61.898.336</b>	<b>86,81</b>



**BADAN KEBIJAKAN FISKAL  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI**

Gd. R.M. Notohamiprodjo  
Jln. Dr. Wahidin No 1  
Jakarta Pusat 10710



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
 ESELON I : 12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Kode Lap : LRA.F.W.1  
 Tanggal : 16/02/22 10:11 PM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lra\_face\_es1\_komparatif--

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	722,211,705	722,211,705	0	0	593,781,241	593,781,241	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>0</b>	<b>722,211,705</b>	<b>722,211,705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593,781,241</b>	<b>593,781,241</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>				0				0
	BELANJA PEGAWAI	40,786,008,000	40,758,083,380	(27,924,620)	100	39,137,370,000	38,834,127,897	(303,242,103)	99
	BELANJA BARANG	40,499,966,000	33,601,785,001	(6,898,180,999)	83	57,620,124,000	31,300,317,858	(26,319,806,142)	54
	BELANJA MODAL	4,820,278,000	2,452,300,497	(2,367,977,503)	51	7,047,823,000	6,844,242,122	(203,580,878)	97
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA (B I + B II)</b>	<b>86,106,252,000</b>	<b>76,812,168,878</b>	<b>(9,294,083,122)</b>	<b>89</b>	<b>103,805,317,000</b>	<b>76,978,687,877</b>	<b>(26,826,629,123)</b>	<b>74</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				0				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN  
S.D BULAN DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
UNIT ESELON I : 12

KEMENTERIAN KEUANGAN  
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Kode Lap : LRA.B.S.  
Tanggal : 16/02/22 10:11  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_prog\_giat\_es1 --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
CE	Program Kebijakan Fiskal							
4762	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	8,673,561,000	1,748,381,000	1,722,468,649	0	1,722,468,649	98.52	25,912,351
4763	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	10,982,879,000	4,089,566,000	3,378,356,767	310,022,500	3,068,334,267	75.03	1,021,231,733
4764	Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	14,475,704,000	6,904,578,000	6,308,281,415	6,067,500	6,302,213,915	91.28	602,364,085
4765	Komunikasi dan Edukasi	6,242,557,000	2,122,951,000	1,854,799,759	0	1,854,799,759	87.37	268,151,241
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CE	40,374,701,000	14,865,476,000	13,263,906,590	316,090,000	12,947,816,590	88.05	<b>1,917,659,410</b>
WA	Program Dukungan Manajemen							
4672	Legislasi dan Litigasi	172,260,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
4673	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	26,963,271,000	21,227,288,000	17,159,114,372	2,980,000	17,156,134,372	80.82	4,071,153,628
4674	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	5,409,299,000	4,598,088,000	4,453,035,797	0	4,453,035,797	96.85	145,052,203
4675	Pengelolaan Organisasi dan SDM	40,783,485,000	43,082,619,000	42,201,981,783	8,698,000	42,193,283,783	97.94	889,335,217
4676	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	126,070,000	21,250,000	0	0	0	0	21,250,000
4677	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	193,100,000	71,300,000	61,898,336	0	61,898,336	86.81	9,401,664
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	73,647,485,000	69,010,545,000	63,876,030,288	11,678,000	63,864,352,288	60.403	<b>5,146,192,712</b>
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	114,022,186,000	83,876,021,000	77,139,936,878	327,768,000	76,812,168,878	71.462	<b>7,063,852,122</b>
09	HIBAH LUAR NEGERI							
CE	Program Kebijakan Fiskal							
4764	Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	0	243,300,000	0	0	0	0	243,300,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CE	0	243,300,000	0	0	0	0	<b>243,300,000</b>

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN  
S.D BULAN DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
UNIT ESELON I : 12

KEMENTERIAN KEUANGAN  
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Kode Lap : LRA.B.S.  
Tanggal : 16/02/22 10:11  
Halaman : 2

Prg ID : lap\_lra\_bel\_prog\_giat\_es1 --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
WA	Program Dukungan Manajemen							
4673	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	0	1,986,931,000	0	0	0	0	1,986,931,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	0	1,986,931,000	0	0	0	0	<b>1,986,931,000</b>
	JUMLAH BELANJA HIBAH LUAR NEGERI	0	2,230,231,000	0	0	0	0	<b>2,230,231,000</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>114,022,186,000</b>	<b>86,106,252,000</b>	<b>77,139,936,878</b>	<b>327,768,000</b>	<b>76,812,168,878</b>	<b>59.55</b>	<b>9,294,083,122</b>

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19  
 MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
 TINGKAT ESELON I  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
 ESELON I : 12

KEMENTERIAN KEUANGAN  
 BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Kode Lap : LRA.B.S.  
 Tanggal : 16/02/22 10:11  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_covid\_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	876,000,000	1,058,800,000	1,024,993,409	0	1,024,993,409	96.81	33,806,591
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	876,000,000	1,058,800,000	1,024,993,409	0	1,024,993,409	96.81	33,806,591
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	186,000,000	87,000,000	53,682,625	0	53,682,625	61.7	33,317,375
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	186,000,000	87,000,000	53,682,625	0	53,682,625	61.7	33,317,375
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,011,900,000	1,234,133,000	773,966,364	0	773,966,364	62.71	460,166,636
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,011,900,000	1,234,133,000	773,966,364	0	773,966,364	62.71	460,166,636
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,073,900,000	2,379,933,000	1,852,642,398	0	1,852,642,398	77.84	527,290,602
	JUMLAH BELANJA	2,073,900,000	2,379,933,000	1,852,642,398	0	1,852,642,398	77.84	527,290,602



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 12

KEMENTERIAN KEUANGAN  
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Kode Lap : LRA.P.E1.1  
Tanggal : 16/02/22 10:11  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	539,324,286	0	539,324,286	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	6,652,800	0	6,652,800	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	545,977,086	0	545,977,086	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	29,254,722	0	29,254,722	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	29,254,722	0	29,254,722	
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,750,000	0	1,750,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	1,750,000	0	1,750,000	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	54,736,781	0	54,736,781	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	90,493,116	0	90,493,116	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	145,229,897	0	145,229,897	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	722,211,705	0	722,211,705	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	722,211,705	0	722,211,705	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 12

KEMENTERIAN KEUANGAN  
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Kode Lap : LRA.B.S.  
Tanggal : 16/02/22 10:11  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	24,869,616,000	25,898,000,000	25,897,342,770	0	25,897,342,770	100	657,230
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	468,000	468,000	420,985	0	420,985	89.95	47,015
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,575,266,000	1,764,000,000	1,763,365,020	0	1,763,365,020	99.96	634,980
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	469,898,000	498,000,000	497,331,908	0	497,331,908	99.87	668,092
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,080,882,000	896,000,000	895,640,000	540,000	895,100,000	99.9	900,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,974,466,000	3,252,000,000	3,251,530,000	1,150,000	3,250,380,000	99.95	1,620,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	99,605,000	158,000,000	157,196,603	0	157,196,603	99.49	803,397
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,200,190,000	1,431,000,000	1,430,005,320	0	1,430,005,320	99.93	994,680
511129	Belanja Uang Makan PNS	3,490,000,000	4,568,000,000	4,567,929,000	0	4,567,929,000	100	71,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	832,710,000	742,000,000	741,320,000	6,495,000	734,825,000	99.03	7,175,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	36,593,101,000	39,207,468,000	39,202,081,606	8,185,000	39,193,896,606	99.99	13,571,394
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511511	Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	55,769,000	150,000,000	136,273,774	0	136,273,774	90.85	13,726,226
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	55,769,000	150,000,000	136,273,774	0	136,273,774	90.85	13,726,226
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	287,840,000	1,428,540,000	1,428,426,000	513,000	1,427,913,000	99.96	627,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	287,840,000	1,428,540,000	1,428,426,000	513,000	1,427,913,000	99.99	627,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	36,936,710,000	40,786,008,000	40,766,781,380	8,698,000	40,758,083,380	99.95	27924620
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4,750,984,000	4,436,634,000	4,293,300,177	0	4,293,300,177	96.77	143,333,823
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,000,000	12,000,000	5,858,493	0	5,858,493	48.82	6,141,507
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,214,575,000	1,214,575,000	799,955,500	0	799,955,500	65.86	414,619,500
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	102,000,000	36,000,000	25,316,000	0	25,316,000	70.32	10,684,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	876,000,000	1,058,800,000	1,024,993,409	0	1,024,993,409	96.81	33,806,591
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	6,955,559,000	6,758,009,000	6,149,423,579	0	6,149,423,579	90.99	608,585,421
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	3,476,080,000	1,766,822,000	1,340,508,859	0	1,340,508,859	75.87	426,313,141
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,296,480,000	1,732,260,000	1,690,830,000	311,730,000	1,379,100,000	79.61	353,160,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,449,100,000	1,781,541,000	1,301,674,474	0	1,301,674,474	73.06	479,866,526
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	7,221,660,000	5,280,623,000	4,333,013,333	311,730,000	4,021,283,333	82.05	1,259,339,667
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,028,000,000	879,520,000	564,831,500	0	564,831,500	64.22	314,688,500
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	186,000,000	87,000,000	53,682,625	0	53,682,625	61.7	33,317,375

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 12

KEMENTERIAN KEUANGAN  
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Kode Lap : LRA.B.S.  
Tanggal : 16/02/22 10:11  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	2,214,000,000	966,520,000	618,514,125	0	618,514,125	63.99	348,005,875
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	30,000,000	30,000,000	28,595,086	0	28,595,086	95.32	1,404,914
522112	Belanja Langganan Telepon	144,000,000	84,000,000	69,570,338	0	69,570,338	82.82	14,429,662
522113	Belanja Langganan Air	2,400,000	2,400,000	788,900	0	788,900	32.87	1,611,100
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	144,000,000	144,000,000	131,131,406	0	131,131,406	91.06	12,868,594
522131	Belanja Jasa Konsultansi	1,592,262,000	2,505,917,000	2,238,815,200	0	2,238,815,200	89.34	267,101,800
522141	Belanja Sewa	1,404,000,000	1,811,715,000	1,769,640,313	0	1,769,640,313	97.68	42,074,687
522151	Belanja Jasa Profesi	2,476,558,000	2,813,424,000	2,087,819,615	4,080,000	2,083,739,615	74.06	729,684,385
522191	Belanja Jasa Lainnya	8,918,786,000	5,052,937,000	4,921,973,975	0	4,921,973,975	97.41	130,963,025
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,011,900,000	1,234,133,000	773,966,364	0	773,966,364	62.71	460,166,636
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	15,723,906,000	13,678,526,000	12,022,301,197	4,080,000	12,018,221,197	87.89	1,660,304,803
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,085,750,000	1,900,139,000	1,231,099,065	0	1,231,099,065	64.79	669,039,935
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	216,000,000	216,000,000	132,992,200	0	132,992,200	61.57	83,007,800
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,277,500,000	3,880,634,000	3,400,999,374	0	3,400,999,374	87.64	479,634,626
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	48,000,000	16,800,000	9,504,000	0	9,504,000	56.57	7,296,000
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	20,000,000	72,000,000	71,049,880	0	71,049,880	98.68	950,120
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	5,647,250,000	6,085,573,000	4,845,644,519	0	4,845,644,519	79.63	1,239,928,481
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	7,104,431,000	1,941,676,000	1,084,220,094	0	1,084,220,094	55.84	857,455,906
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	882,058,000	302,260,000	130,816,000	0	130,816,000	43.28	171,444,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8,051,249,000	2,919,191,000	2,576,695,050	3,260,000	2,573,435,050	88.16	345,755,950
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,991,130,000	734,700,000	629,993,820	0	629,993,820	85.75	104,706,180
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	22,028,868,000	5,897,827,000	4,421,724,964	3,260,000	4,418,464,964	74.97	1,479,362,036
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	11,091,251,000	1,832,888,000	1,530,233,284	0	1,530,233,284	83.49	302,654,716
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	11,091,251,000	1,832,888,000	1,530,233,284	0	1,530,233,284	83.49	302,654,716
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	70,882,494,000	40,499,966,000	33,920,855,001	319,070,000	33,601,785,001	83.76	6898180999
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,738,600,000	3,586,921,000	1,455,144,497	0	1,455,144,497	40.57	2,131,776,503
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	4,738,600,000	3,586,921,000	1,455,144,497	0	1,455,144,497	40.57	2,131,776,503
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	1,464,382,000	1,154,357,000	918,156,000	0	918,156,000	79.54	236,201,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
 MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
 TINGKAT ESELON I  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
 ESELON I : 12

KEMENTERIAN KEUANGAN  
 BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Kode Lap : LRA.B.S.  
 Tanggal : 16/02/22 10:11  
 Halaman : 3  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau	0	79,000,000	79,000,000	0	79,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	1,464,382,000	1,233,357,000	997,156,000	0	997,156,000	80.85	236,201,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	6,202,982,000	4,820,278,000	2,452,300,497	0	2,452,300,497	50.87	2367977503
	JUMLAH BELANJA	114,022,186,000	86,106,252,000	77,139,936,878	327,768,000	76,812,168,878	89.59	9,294,083,122

LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
ESELON I : 12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Kode Lap : LO.ES1  
Tanggal : 16/02/22 10:11  
Halaman : 1  
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM  
Prog ID : lap\_lo\_es1 --

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	8,402,800	2,772,000	5,630,800	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	8,402,800	2,772,000	5,630,800	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	8,402,800	2,772,000	5,630,800	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	40,671,574,892	38,868,442,985	1,803,131,907	-
Beban Persediaan	991,941,651	2,055,287,759	(1,063,346,108)	-
Beban Barang dan Jasa	85,983,480,541	61,235,579,112	24,747,901,429	-
Beban Pemeliharaan	5,065,650,074	6,949,759,031	(1,884,108,957)	-
Beban Perjalanan Dinas	5,948,698,248	3,699,462,427	2,249,235,821	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	-
Beban Bunga	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
ESELON I : 12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Kode Lap : LO.ES1  
Tanggal : 16/02/22 10:11  
Halaman : 2  
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM  
Prog ID : lap\_lo\_es1 --

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	8,608,730,173	9,662,079,017	(1,053,348,844)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	82,829	(96,804)	179,633	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>147,270,158,408</b>	<b>122,470,513,527</b>	<b>24,799,644,881</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(147,261,755,608)</b>	<b>(122,467,741,527)</b>	<b>(24,794,014,081)</b>	<b>-</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	539,324,286	175,486,935	363,837,351	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	539,324,286	282,789,799	256,534,487	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	107,302,864	(107,302,864)	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	181,756,064	269,215,206	(87,459,142)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	181,756,064	291,331,556	(109,575,492)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	22,116,350	(22,116,350)	-
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>721,080,350</b>	<b>444,702,141</b>	<b>276,378,209</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(146,540,675,258)</b>	<b>(122,023,039,386)</b>	<b>(24,517,635,872)</b>	<b>-</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(146,540,675,258)</b>	<b>(122,023,039,386)</b>	<b>(24,517,635,872)</b>	<b>-</b>

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN TAHUN 2020  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
ESELON I : 12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Kode Lap : Lpe.es1  
Tanggal : 16/02/22 10:11  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lpe\_es1

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	30,103,028,314	35,332,490,924	(5,229,462,610)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(146,540,675,258)	(122,023,039,386)	(24,517,635,872)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(65,397,740)	30,439,937	(95,837,677)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(65,397,740)	30,439,937	(95,837,677)	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	139,906,015,436	116,763,136,839	23,142,878,597	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(6,700,057,562)	(5,229,462,610)	(1,470,594,952)	-
EKUITAS AKHIR	23,402,970,752	30,103,028,314	(6,700,057,562)	-

**NERACA**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 12

BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Tgl. Cetak 16/02/2022 10:10 PM  
lap\_neraca\_es1\_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	45,077,695	(45,077,695)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	9,294,222	5,402,166	3,892,056	72.05
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(46,471)	(27,010)	(19,461)	72.05
<b>PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)</b>	<b>9,247,751</b>	<b>5,375,156</b>	<b>3,872,595</b>	<b>72.05</b>
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	12,673,611	0	12,673,611	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(63,368)	0	(63,368)	0.00
<b>BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)</b>	<b>12,610,243</b>	<b>0</b>	<b>12,610,243</b>	<b>0.00</b>
Persediaan	888,782,697	1,482,215,778	(593,433,081)	(40.04)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>910,640,691</b>	<b>1,532,668,629</b>	<b>(622,027,938)</b>	<b>(40.58)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	4,018,902,000	4,018,902,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	86,288,958,023	90,754,061,611	(4,465,103,588)	(4.92)
Gedung dan Bangunan	3,869,560,997	3,869,560,997	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,257,708,832	1,257,708,832	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	1,475,310,479	719,514,479	755,796,000	105.04
Konstruksi Dalam Pengerjaan	79,904,000	145,464,000	(65,560,000)	(45.07)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(75,024,828,373)	(72,838,825,291)	(2,186,003,082)	3.00
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>21,965,515,958</b>	<b>27,926,386,628</b>	<b>(5,960,870,670)</b>	<b>(21.34)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tak Berwujud	3,039,924,720	2,733,004,720	306,920,000	11.23
Aset Lain-lain	12,595,000	3,198,018,184	(3,185,423,184)	(99.61)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(2,523,069,961)	(5,135,876,399)	2,612,806,438	(50.87)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>529,449,759</b>	<b>795,146,505</b>	<b>(265,696,746)</b>	<b>(33.41)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>23,405,606,408</b>	<b>30,254,201,762</b>	<b>(6,848,595,354)</b>	<b>(22.64)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	2,635,656	151,173,448	(148,537,792)	(98.26)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>2,635,656</b>	<b>151,173,448</b>	<b>(148,537,792)</b>	<b>(98.26)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>2,635,656</b>	<b>151,173,448</b>	<b>(148,537,792)</b>	<b>(98.26)</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	23,402,970,752	30,103,028,314	(6,700,057,562)	(22.26)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>23,402,970,752</b>	<b>30,103,028,314</b>	<b>(6,700,057,562)</b>	<b>(22.26)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>23,402,970,752</b>	<b>30,103,028,314</b>	<b>(6,700,057,562)</b>	<b>(22.26)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>23,405,606,408</b>	<b>30,254,201,762</b>	<b>(6,848,595,354)</b>	<b>(22.64)</b>



**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER 1 JANUARI 2021 (SALDO AWAL)**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015      KEMENTERIAN KEUANGAN  
 UNIT ORGANISASI                               : 12                      BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Tgl. Cetak 16/02/2022

*lap\_neraca\_percobaan\_sawal\_akrual\_es1 --rekon17*

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	45,077,695	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	5,402,166	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	27,010
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,295,919,338	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	186,296,440	0
0.0	131111	Tanah	4,018,902,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	90,754,061,611	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,869,560,997	0
0.0	134113	Jaringan	1,257,708,832	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	719,514,479	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	145,464,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	71,819,528,129
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	426,840,883
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	592,456,279
0.0	162151	Software	2,733,004,720	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	3,198,018,184	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	3,198,018,184
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,937,858,215
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	86,508,488
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	19,587,265
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	45,077,695
0.0	391111	Ekuitas	0	30,103,028,314
<b>JUMLAH</b>			<b>108,228,930,462</b>	<b>108,228,930,462</b>

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER DESEMBER 2021**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN KEUANGAN  
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Tgl. Cetak 16/02/2022 10:10 PM  
lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	114211	Uang Muka Belanja Pegawai (prepayment)	0	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	9,294,222	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	12,673,611	0
0.0	115613	Piutang dari Uang Persediaan yang akan Diterima	0	0
0.0	115614	Piutang dari Tambahan Uang Persediaan yang akan Diterima	0	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	46,471
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	63,368
0.0	117111	Barang Konsumsi	842,524,687	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	46,258,010	0
0.0	131111	Tanah	4,018,902,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	86,288,958,023	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,869,560,997	0
0.0	134113	Jaringan	1,257,708,832	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	606,020,800	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	869,289,679	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	79,904,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	73,821,900,297
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	581,529,043
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	621,399,033
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	0
0.0	162151	Software	3,039,924,720	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	12,595,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	12,595,000
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	2,510,474,961
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	2,635,656
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	76,812,168,878
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	722,211,705	0
0.0	313211	Transfer Keluar	4,740,000	0
0.0	391111	Ekuitas	0	30,103,028,314
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	65,397,740	0

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER DESEMBER 2021**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN KEUANGAN  
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Tgl. Cetak 16/02/2022 10:10 PM  
lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	63,820,798,263
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	539,324,286
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	6,652,800
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	41,928,333
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,750,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	54,736,781
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	85,090,950
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	25,818,280,950	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	412,205	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,761,052,690	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	496,715,110	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	893,480,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	540,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3,249,780,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	1,150,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	156,757,843	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,430,005,320	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	4,567,929,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	741,160,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	6,495,000
3.0	511511	Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	136,273,774	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	1,428,426,000	0
3.1	512211	Pengembalian Beban Uang Lembur	0	513,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	4,289,903,377	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,858,493	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	799,955,500	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	25,316,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,024,993,409	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,340,508,859	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,690,830,000	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	311,730,000
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,301,674,474	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	27,884,142	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	53,328,473	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	790,100	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	131,131,406	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	2,238,815,200	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,760,346,091	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	2,087,819,615	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	4,080,000

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER DESEMBER 2021**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
 UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN KEUANGAN  
 BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Tgl. Cetak 16/02/2022 10:10 PM  
 lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	68,742,772,238	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	773,966,364	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,231,099,065	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,400,999,374	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	9,504,000	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	71,049,880	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	1,084,220,094	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	136,336,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,571,175,050	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	3,260,000
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	629,993,820	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1,530,233,284	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7,851,223,013	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	154,688,160	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	28,942,754	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	572,616,746	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,259,500	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	991,941,651	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	352,997,755	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	19,461	0
3.0	594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	63,368	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	3,396,800	0
<b>JUMLAH</b>			<b>249,343,890,434</b>	<b>249,343,890,434</b>

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER DESEMBER 2021**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
 UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN KEUANGAN  
 BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Tgl. Cetak 16/02/2022 10:10 PM  
 lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	9,294,083,122	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	722,211,705	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	25,898,000,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	468,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,764,000,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	498,000,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	896,000,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	3,252,000,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	158,000,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	1,431,000,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	4,568,000,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	742,000,000
2.0	511511	Allotment Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	0	150,000,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	1,428,540,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	4,436,634,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	12,000,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	1,214,575,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	36,000,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,058,800,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	1,766,822,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	1,732,260,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	1,781,541,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	879,520,000
2.0	521841	Allotment Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	87,000,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	30,000,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	84,000,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	2,400,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	144,000,000
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	2,505,917,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	1,811,715,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	2,813,424,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	5,052,937,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,234,133,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	1,900,139,000
2.0	523112	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	216,000,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	3,880,634,000
2.0	523133	Allotment Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	16,800,000
2.0	523199	Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	72,000,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	1,941,676,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	302,260,000

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER DESEMBER 2021**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN KEUANGAN  
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Tgl. Cetak 16/02/2022 10:10 PM  
lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	2,919,191,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	734,700,000
2.0	524219	Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	1,832,888,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	3,586,921,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	1,154,357,000
2.0	536121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0	79,000,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	539,324,286
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	6,652,800
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	29,254,722
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,750,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	54,736,781
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	90,493,116
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	25,897,342,770	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	420,985	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,763,365,020	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	497,331,908	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	895,640,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	540,000
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,251,530,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	1,150,000
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	157,196,603	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,430,005,320	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	4,567,929,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	741,320,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	6,495,000
3.0	511511	Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	136,273,774	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	1,428,426,000	0
3.1	512211	Pengembalian Belanja Uang Lembur	0	513,000
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4,293,300,177	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,858,493	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	799,955,500	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	25,316,000	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,024,993,409	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,340,508,859	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,690,830,000	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	311,730,000
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,301,674,474	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	564,831,500	0

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER DESEMBER 2021**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
 UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN KEUANGAN  
 BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Tgl. Cetak 16/02/2022 10:10 PM  
 lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	53,682,625	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	28,595,086	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	69,570,338	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	788,900	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	131,131,406	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	2,238,815,200	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,769,640,313	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	2,087,819,615	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	4,080,000
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	4,921,973,975	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	773,966,364	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,231,099,065	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	132,992,200	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,400,999,374	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	9,504,000	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	71,049,880	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,084,220,094	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	130,816,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,576,695,050	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	3,260,000
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	629,993,820	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1,530,233,284	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,455,144,497	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	918,156,000	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	79,000,000	0
<b>JUMLAH</b>			<b>87,156,231,705</b>	<b>87,156,231,705</b>

### FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan  
 Eselon I : Badan Kebijakan Fiskal  
 Wilayah : Kantor Pusat  
 Satuan Kerja : Badan Kebijakan Fiskal  
 No. Dokumen : Kartu Penyesuaian Reklasifikasi Piutang TGR  
 Tanggal/Periode : 31 Des 2021  
 Tahun Anggaran : Tahun 2021  
 Keterangan : Reklasifikasi Piutang TGR menjadi piutang lancar

**Kategori Penyesuaian**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka          | <input type="checkbox"/> Koreksi Antarbeban                        |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka              | <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi      |
| <input type="checkbox"/> Beban yang Masih Harus Dibayar       | <input type="checkbox"/> Pelepasan Aset Tetap                      |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang                   | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang        |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang                  | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek         |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan                           | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk                            |
| <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan          | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar                           |
| <input type="checkbox"/> Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca                      |
| <input type="checkbox"/> Persediaan                           | <input type="checkbox"/> Koreksi                                   |

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115421	Bagian Lancar Tagihan TGR	13.940.972,00	
	K	152111	Piutang Tagihan TP/TGR		13.940.972,00
			<i>mencatat penghapusan saldo penyisihan piutang lainnya 30 Juni 2021</i>		
2	D	152111	Piutang Tagihan TP/TGR	13.940.972,00	
	K	115421	Bagian Lancar Tagihan TGR		13.940.972,00
			<i>menghapus jurnal reklasifikasi untuk diganti dengan jurnal baru</i>		
3	D	115421	Bagian Lancar Tagihan TGR	12.673.611,00	
	K	152111	Piutang Tagihan TP/TGR		12.673.611,00
			<i>mencatat reklasifikasi Bag. Lancar TGR Ahmad Bahri Rambe</i>		

Dibuat oleh  Rofiatul Mahmudah Tanggal : 31 Des 2021	Disetujui oleh  Abdul Aziz Tanggal : 31 Des 2021	Direkam oleh  Rofiatul Mahmudah Tanggal : 31 Des 2021
--	--	---



**FORMULIR MEMO PENYESUAIAN**

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan  
 Eselon I : Badan Kebijakan Fiskal  
 Wilayah : Kantor Pusat  
 Satuan Kerja : Badan Kebijakan Fiskal  
 No. Dokumen : Kartu Penyesuaian Penyisihan Piutang  
 Tanggal/Periode : 31 Des 2021  
 Tahun Anggaran : Tahun 2021  
 Keterangan : Penyesuaian Penyisihan Piutang lainnya dan Piutang TGR

**Kategori Penyesuaian**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka          | <input type="checkbox"/> Koreksi Antarbeban                        |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka              | <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi      |
| <input type="checkbox"/> Beban yang Masih Harus Dibayar       | <input type="checkbox"/> Pelepasan Aset Tetap                      |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang                   | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang        |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang                  | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek         |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan                           | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk                            |
| <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan          | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar                           |
| <input type="checkbox"/> Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca                      |
| <input type="checkbox"/> Persediaan                           | <input type="checkbox"/> Koreksi                                   |

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	116212	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya	4.758,00	
	K	594212	Belanja Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya <i>mencatat penghapusan saldo penyisihan piutang lainnya 30 Juni 2021</i>		4.758,00
2	D	594212	Belanja Penyisihan Piutang tak tertagih - Piutang Lainnya	46.471,00	
	K	116212	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya <i>mencatat penyisihan piutang lainnya tahun 2021</i>		46.471,00
3	D	594411	Beban Penyisihan Piut. Tdk tertagih - Bag. Lancar TP/TGR	69.704,00	
	K	116421	Penyisihan Piutang Tdk tertagih - Bag. Lancar TGR <i>mencatat penyisihan Bag. Lancar TGR Ahmad Bahri Rambe</i>		69.704,00
4	D	156311	Penyisihan Piutang tak tertagih - Piutang TGR	69.705,00	
	K	594931	Belanja Penyisihan Piutang tak tertagih - Piutang TGR <i>mencatat jurnal balik penyisihan piutang jangka panjang TGR</i>		69.705,00
5	D	116421	Penyisihan Piutang Tdk tertagih - Bag. Lancar TGR	69.704,00	
	K	594411	Beban Penyisihan Piut. Tdk tertagih - Bag. Lancar TP/TGR <i>menghapus jurnal penyisihan piutang TGR untuk diganti dengan jurnal baru</i>		69.704,00
6	D	594411	Beban Penyisihan Piut. Tdk tertagih - Bag. Lancar TP/TGR	63.368,00	
	K	116421	Penyisihan Piutang Tdk tertagih - Bag. Lancar TGR <i>mencatat penyisihan Bag. Lancar TGR Ahmad Bahri Rambe</i>		63.368,00

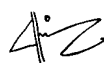
Dibuat oleh



Rofiatul Mahmudah

Tanggal : 31 Des 2021

Disetujui oleh



Abdul Aziz

Tanggal : 31 Des 2021

Direkam oleh



Rofiatul Mahmudah

Tanggal : 31 Des 2021




**FORMULIR MEMO PENYESUAIAN**

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan  
 Eselon I : Badan Kebijakan Fiskal  
 Wilayah : Kantor Pusat  
 Satuan Kerja : Badan Kebijakan Fiskal  
 No. Dokumen : Kartu Penyesuaian Pengakuan Piutang Lainnya atas Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Des 2021  
 Tanggal/Periode : 31 Des 2021  
 Tahun Anggaran : Tahun 2021  
 Keterangan : Reklasifikasi akun Prepaid menjadi Piutang Lainnya

**Kategori Penyesuaian**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka          | <input type="checkbox"/> Koreksi Antarbeban                        |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka              | <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi      |
| <input type="checkbox"/> Beban yang Masih Harus Dibayar       | <input type="checkbox"/> Pelepasan Aset Tetap                      |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang                   | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang        |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang                  | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek         |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan                           | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk                            |
| <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan          | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar                           |
| <input type="checkbox"/> Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca                      |
| <input type="checkbox"/> Persediaan                           | <input type="checkbox"/> Koreksi                                   |

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115212	Piutang Lainnya	9.294.222,00	
	K	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)		9.294.222,00
			<i>mencatat penghapusan saldo penyisihan piutang lainnya 30 Juni 2021</i>		

Dibuat oleh	Disetujui oleh	Direkam oleh
		
Rofiatul Mahmudah	Abdul Aziz	Rofiatul Mahmudah
Tanggal : 31 Des 2021	Tanggal : 31 Des 2021	Tanggal : 31 Des 2021




**FORMULIR MEMO PENYESUAIAN**

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan  
 Eselon I : Badan Kebijakan Fiskal  
 Wilayah : Kantor Pusat  
 Satuan Kerja : Badan Kebijakan Fiskal  
 No. Dokumen : Kartu Penyesuaian Belanja yang Masih Harus Dibayar  
 Tanggal/Periode : Desember 2021  
 Tahun Anggaran : Tahun 2021  
 Keterangan : Mencatat beban akrual 2021

**Kategori Penyesuaian**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka          | <input type="checkbox"/> Koreksi Antarbeban                        |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka              | <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi      |
| <input type="checkbox"/> Beban yang Masih Harus Dibayar       | <input type="checkbox"/> Pelepasan Aset Tetap                      |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang                   | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang        |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang                  | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek         |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan                           | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk                            |
| <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan          | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar                           |
| <input type="checkbox"/> Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca                      |
| <input type="checkbox"/> Persediaan                           | <input type="checkbox"/> Koreksi                                   |

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522111	Belanja Langganan Listrik	2.564.156,00	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus dibayar		2.564.156
			<i>mencatat penghapusan saldo penyisihan piutang lainnya 30 Juni 2021</i>		
2	D	522113	Belanja Langganan Air		
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus dibayar	71.500,00	
			<i>mencatat Tagihan PDAM pemakaian Des'21</i>		71.500,00

Dibuat oleh	Disetujui oleh	Direkam oleh
		
Rofiatul Mahmudah	Abdul Aziz	Rofiatul Mahmudah
Tanggal : 31 Des 2021	Tanggal : 31 Des 2021	Tanggal : 31 Des 2021




## FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan  
 Eselon I : Badan Kebijakan Fiskal  
 Wilayah : Kantor Pusat  
 Satuan Kerja : Badan Kebijakan Fiskal  
 No. Dokumen : Kartu Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran per 1 Oktober 2021  
 Tanggal/Periode : 1 Oktober 2021  
 Tahun Anggaran : Tahun 2021  
 Keterangan : Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran

### Kategori Penyesuaian

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka<br><input type="checkbox"/> Pendapatan yang Masih Harus Diterima<br><input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka<br><input type="checkbox"/> Beban yang Masih Harus Dibayar<br><input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang<br><input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang<br><input type="checkbox"/> Penyusutan<br><input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan<br><input type="checkbox"/> Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran<br><input type="checkbox"/> Persediaan | <input type="checkbox"/> Koreksi Antarbeban<br><input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi<br><input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi<br><input type="checkbox"/> Pelepasan Aset Tetap<br><input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang<br><input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek<br><input type="checkbox"/> Transfer Masuk<br><input type="checkbox"/> Transfer Keluar<br><input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca<br><input type="checkbox"/> Koreksi |
|--|--|

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111821	Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	8.579.560.066	
	K	219961	Utang pajak BP yang belum disetor		8.579.560.066
			<i>Jurnal balik atas pengeluaran saldo tukin Sept dan PPh-nya dari kas lainnya BP karena akan dicatat Satker Setjen</i>		

Dibuat oleh  Rofiatul Mahmudah Tanggal : 1 Oktober 2021	Disetujui oleh  Abdul Aziz Tanggal : 1 Oktober 2021	Direkam oleh  Rofiatul Mahmudah Tanggal : 1 Oktober 2021
--	---	--


## FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan  
 Eselon I : Badan Kebijakan Fiskal  
 Wilayah : Kantor Pusat  
 Satuan Kerja : Badan Kebijakan Fiskal  
 No. Dokumen : Kartu Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran per 30 Sept 2021  
 Tanggal/Periode : 30 Sept 2021  
 Tahun Anggaran : Tahun 2021  
 Keterangan : Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran

### Kategori Penyesuaian

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka<br><input type="checkbox"/> Pendapatan yang Masih Harus Diterima<br><input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka<br><input type="checkbox"/> Beban yang Masih Harus Dibayar<br><input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang<br><input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang<br><input type="checkbox"/> Penyusutan<br><input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan<br><input type="checkbox"/> Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran<br><input type="checkbox"/> Persediaan | <input type="checkbox"/> Koreksi Antarbeban<br><input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi<br><input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi<br><input type="checkbox"/> Pelepasan Aset Tetap<br><input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang<br><input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek<br><input type="checkbox"/> Transfer Masuk<br><input type="checkbox"/> Transfer Keluar<br><input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca<br><input type="checkbox"/> Koreksi |
|--|--|

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	219961	Utang pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetor	8.579.560.066	
	K	111821	Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran		8.579.560.066
			<i>Mencatat pengeluaran saldo Tukin dan PPh-nya dari kas lainnya BP karena akan dicatat Satker Setjen</i>		

Dibuat oleh  Rofiatul Mahmmudah Tanggal : 30 Sept. 2021	Disetujui oleh  Abdul Aziz Tanggal : 30 Sept. 2021	Direkam oleh  Rofiatul Mahmmudah Tanggal : 30 Sept. 2021
---	--	--

## FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan  
 Eselon I : Badan Kebijakan Fiskal  
 Wilayah : Kantor Pusat  
 Satuan Kerja : Badan Kebijakan Fiskal  
 No. Dokumen : Kartu Penyesuaian Piutang Jangka Panjang per 30 Jun 2018  
 Tanggal/Periode : 30 Sept 2021  
 Tahun Anggaran : Tahun 2021  
 Keterangan : Pencatatan Piutang TGR

### Kategori Penyesuaian

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka          | <input type="checkbox"/> Koreksi Antarbeban                        |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka              | <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi      |
| <input type="checkbox"/> Beban yang Masih Harus Dibayar       | <input type="checkbox"/> Pelepasan Aset Tetap                      |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang                   | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang        |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang                  | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek         |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan                           | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk                            |
| <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan          | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar                           |
| <input type="checkbox"/> Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca                      |
| <input type="checkbox"/> Persediaan                           | <input type="checkbox"/> Koreksi                                   |

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	15.208.333	
	K	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Non Bendahara		15.208.333
			<i>mencatat SKTJM TGR a.n. Ahmad Bahri Rambe</i>		

Dibuat oleh



Rofiatul Mahmudah

Tanggal 30 Sept. 2021

Disetujui oleh



Abdul Aziz

Tanggal 30 Sept. 2021

Direkam oleh



Rofiatul Mahmudah

Tanggal 30 Sept. 2021

### FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan  
Eselon I : Badan Kebijakan Fiskal  
Wilayah : Kantor Pusat  
Satuan Kerja : Badan Kebijakan Fiskal  
No. Dokumen : Kartu Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran per 1 Juli 2021  
Tanggal/Periode : 1 Juli 2021  
Tahun Anggaran : Tahun 2021  
Keterangan : Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran

#### Kategori Penyesuaian

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka          | <input type="checkbox"/> Koreksi Antarbeban                        |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka              | <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi      |
| <input type="checkbox"/> Beban yang Masih Harus Dibayar       | <input type="checkbox"/> Pelepasan Aset Tetap                      |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang                   | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang        |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang                  | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek         |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan                           | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk                            |
| <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan          | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar                           |
| <input type="checkbox"/> Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca                      |
| <input type="checkbox"/> Persediaan                           | <input type="checkbox"/> Koreksi                                   |

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111821	Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	903.426.086	
	K	219961	Utang pajak BP yang belum disetor		903.426.086
			<i>Jurnal balik atas pengeluaran saldo Utang Pajak Tukin Juli dari kas lainnya BP karena akan dicatat Satker Setjen</i>		

Dibuat oleh



Rofiatul Mahmudah

Tanggal : 1 Juli 2021

Disetujui oleh



Abdul Aziz

Tanggal : 1 Juli 2021

Direkam oleh



Rofiatul Mahmudah

Tanggal : 1 Juli 2021


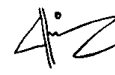

### FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan  
 Eselon I : Badan Kebijakan Fiskal  
 Wilayah : Kantor Pusat  
 Satuan Kerja : Badan Kebijakan Fiskal  
 No. Dokumen : Kartu Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran per 30 Jun 2021  
 Tanggal/Periode : 30 Juni 2021  
 Tahun Anggaran : Tahun 2021  
 Keterangan : Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran

**Kategori Penyesuaian**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka          | <input type="checkbox"/> Koreksi Antarbeban                        |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka              | <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi      |
| <input type="checkbox"/> Beban yang Masih Harus Dibayar       | <input type="checkbox"/> Pelepasan Aset Tetap                      |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang                   | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang        |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang                  | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek         |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan                           | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk                            |
| <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan          | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar                           |
| <input type="checkbox"/> Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca                      |
| <input type="checkbox"/> Persediaan                           | <input type="checkbox"/> Koreksi                                   |

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	219961	Utang pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetor	903.426.086	
	K	111821	Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran		903.426.086
			<i>Mencatat pengeluaran utang pajak tukin Juli dari kas lainnya BP karena akan dicatat Setjen</i>		

Dibuat oleh  Rofiatul Mahmmudah Tanggal : 30 Juni 2021	Disetujui oleh  Abdul Aziz Tanggal : 30 Juni 2021	Direkam oleh  Rofiatul Mahmmudah Tanggal : 30 Juni 2021
--	---	---



## FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan  
 Eselon I : Badan Kebijakan Fiskal  
 Wilayah : Kantor Pusat  
 Satuan Kerja : Badan Kebijakan Fiskal  
 No. Dokumen : Kartu Penyisihan Piutang per 30 Jun 2021  
 Tanggal/Periode : 30 Jun 2021  
 Tahun Anggaran : Tahun 2021  
 Keterangan : Penyisihan Piutang

**Kategori Penyesuaian**

- Pendapatan Diterima di Muka
- Pendapatan yang Masih Harus Diterima
- Belanja Dibayar di Muka
- Beban yang Masih Harus Dibayar
- Penyisihan Piutang
- Penghapusan Piutang
- Penyusutan
- Kas di Bendahara Penerimaan
- Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
- Persediaan
- Koreksi Antarbeban
- Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
- Pelepasan Aset Tetap
- Pembentukan Piutang Jangka Panjang
- Pembentukan Piutang Jangka Pendek
- Transfer Masuk
- Transfer Keluar
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	116212	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya	22.252	
	K	594212	Belanja Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya		22.252,00
			<i>Penyesuaian Penyisihan Piutang Lainnya Sem I 2021</i>		

Dibuat oleh

Disetujui oleh

Direkam oleh





### FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan  
Eselon I : Badan Kebijakan Fiskal  
Wilayah : Kantor Pusat  
Satuan Kerja : Badan Kebijakan Fiskal  
No. Dokumen : Kartu Penyesuaian Piutang Jangka Pendek per 30 Juni 2021  
Tanggal/Periode : 30 Juni 2021  
Tahun Anggaran : Tahun 2021  
Keterangan : Penyesuaian Piutang Jangka Pendek

**Kategori Penyesuaian**

- Pendapatan Diterima di Muka
- Pendapatan yang Masih Harus Diterima
- Belanja Dibayar di Muka
- Beban yang Masih Harus Dibayar
- Penyisihan Piutang
- Penghapusan Piutang
- Penyusutan
- Kas di Bendahara Penerimaan
- Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
- Persediaan
- Koreksi Antarbeban
- Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
- Pelepasan Aset Tetap
- Pembentukan Piutang Jangka Panjang
- Pembentukan Piutang Jangka Pendek
- Transfer Masuk
- Transfer Keluar
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	5.402.166,00	
	K	115212	Piutang Lainnya		5.402.166,00
			<i>Mencatat penerimaan pelunasan piutang lainnya</i>		

Dibuat oleh

Rofiatul Mahmudah

Tanggal : 30 Juni 2021

Disetujui oleh

Abdul Aziz

Tanggal : 30 Juni 2021

Direkam oleh

Rofiatul Mahmudah

Tanggal : 30 Juni 2021

**FORMULIR MEMO PENYESUAIAN**

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan  
 Eselon I : Badan Kebijakan Fiskal  
 Wilayah : Kantor Pusat  
 Satuan Kerja : Badan Kebijakan Fiskal  
 No. Dokumen : Kartu Jurnal Balik per 30 Jun 2021  
 Tanggal/Periode : Jan - Jun 2021  
 Tahun Anggaran : Tahun 2021  
 Keterangan : Jurnal Balik Semester I 2021

**Kategori Penyesuaian**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka          | <input type="checkbox"/> Koreksi Antarbeban                        |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka              | <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi      |
| <input type="checkbox"/> Beban yang Masih Harus Dibayar       | <input type="checkbox"/> Pelepasan Aset Tetap                      |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang                   | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang        |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang                  | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek         |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan                           | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk                            |
| <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan          | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar                           |
| <input type="checkbox"/> Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca                      |
| <input type="checkbox"/> Persediaan                           | <input type="checkbox"/> Koreksi                                   |

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus dibayar	3.275.100,00	
	K	522111	Belanja Langganan Listrik		3.275.100,00
			<i>Mencatat Jurnal Balik Tagihan listrik pemakaian Des'20</i>		
2	D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus dibayar	4.162.684,00	
	K	522112	Belanja Langganan Telepon		4.162.684,00
			<i>Mencatat Jurnal Balik Tagihan telepon pemakaian Des'20</i>		
3	D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus dibayar	12.079.181,00	
	K	522112	Belanja Langganan Telepon		12.079.181,00
			<i>Mencatat Jurnal Balik Tagihan telepon pemakaian Des'20</i>		
4	D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus dibayar	70.300,00	
	K	522113	Belanja Langganan Air		70.300,00
			<i>Mencatat Jurnal Balik Tagihan PDAM pemakaian Des'20</i>		
5	D	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus dibayar	86.508.488,00	
	K	511111	Belanja Gaji Pokok PNS		79.061.820,00
	K	511119	Belanja pembulatan gaji PNS		8.780,00
	K	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		2.312.330,00
	K	511122	Belanja Tunj. Anak PNS		616.798,00
	K	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		2.160.000,00
	K	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		1.750.000,00
	K	511125	Belanja Tunj. PPh PNS		438.760,00
	K	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		160.000,00
			<i>Mencatat Jurnal Balik Kekurangan Pembayaran Gaji Tahun 2020</i>		

Dibuat oleh	Disetujui oleh	Direkam oleh
		
Rofiatul Mahmudah	Abdul Aziz	Rofiatul Mahmudah
Tanggal : 30 Juni 2021	Tanggal : 30 Juni 2021	Tanggal : 30 Juni 2021

**TINGKAT UAPPA-ESELON 1**

**PERIODE TA 2021 AUDITED**

Kode BA dan Nama BA : (015) Kementerian Keuangan

Kode Es1 dan Nama Es1: (12) Badan Kebijakan Fiskal

Objek Penelaahan	Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
<b>KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN</b>			
<b>Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE face	√		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
<b>Laporan Keuangan Tambahan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Neraca Percobaan Akrual	√		Ada
2. Neraca Percobaan Kas	√		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	√		Ada
<b>KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&amp;LK</b>			
	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2020?	√		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&amp;LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
<b>KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI</b>			
<b>Neraca Balance</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah Satker Neracanya tidak balance? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance"		√	Tidak
<b>Saldo antar Laporan</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>			
<b>NERACA PERCOBAAN AKRUAL</b>			
<b>PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada"? (Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref)		√	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		√	Tidak
<b>TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN</b>			
<b>AKUN ASET (1xxxxx)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah akun Aset (1xxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.		√	Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)		√	Tidak
<b>Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
<b>AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
<b>Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>

1. Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ya/Tidak
2. Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2020? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan)	N/A		Ya
3. Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		N/A	Tidak
<i>Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i>			
4. Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211 ?	N/A		Ya
<b>AKUN EKUITAS (3xxxxx)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah akun 391117-Penyediaan Nilai Persediaan		√	Tidak
2. Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		√	Tidak
3. Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap		√	Tidak
4. Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		√	Ada/Tidak
5. Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya	N/A		Ya
6. Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	N/A		Ya
<i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon</i>			
<b>Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)</b>			
1. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK			-
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&amp;LK (menu monitoring &gt;&gt; Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i>			
2. Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan			-
<b>AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)</b>			
<b>Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)</b>			
1. Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?		√	Tidak
<b>Ketepatan penggunaan Akun PNBP Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)</b>			
1. Adakah akun 423xxx		√	Tidak
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		√	Tidak
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		√	Tidak
4. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		√	Tidak
<b>Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN</b>			
1. Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		√	Tidak
<b>Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas</b>			
1. Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/ Keajaasan terdapat pada Kementerian Kesehatan		√	Tidak
2. Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		√	Tidak
<b>Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)</b>			
1. Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah	Ya	√	Tidak
<b>Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)</b>			
1. Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?	Ya	√	Ya/Tidak
2. Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		N/A	Ya/Tidak
<b>AKUN BELANJA (5xxxxx)</b>			
1. Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?	Ya	√	Tidak

TELAAH TERKAIT BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		N/A	Ada/Tidak
2. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? ( <i>cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal</i> )		N/A	Ya
<b>Jika TIDAK Memiliki Satker BLU</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU		√	Tidak
2. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		√	Tidak
3. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
<b>Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			-
2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			-
3. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			-
4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?	√		Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>			
5. Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)		√	Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>			
6. Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?	√		Ya/Tidak
7. Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid- 19?	√		Ya
<b>LAPORAN OPERASIONAL</b>			
<b>Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		√	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak
3. Adakah beban bunga		√	Tidak
4. Adakah beban subsidi		√	Tidak
5. Adakah beban hibah		√	Tidak
6. Adakah beban transfer		√	Tidak
7. Adakah beban lain-lain		√	Tidak
<b>Pengecekan saldo Normal</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya ( <i>saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi</i> )		√	Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	√		Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
<b>Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang ( <i>Jk.Pendek dan Jk.Panjang</i> ) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang ( <i>Jk.Pendek dan Jk.Panjang</i> ) = Beban Penyisihan Piutang LO	√		Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			
<b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>			
	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"		√	Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya</i>			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>			
<b>Pengecekan akun koreksi</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			

1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?	√		Ya
<b>Contoh 1 :</b> Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.			
<b>Contoh 2 :</b> Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan			
<b>NERACA</b>			
	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?		√	Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>			
3. Dari kolom perbandingan antara 31 Desember 2020 dengan 30 September 2021 adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		√	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2020, Apakah demikian?		√	Ya
<b>TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN</b>			
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
<b>Pengecekan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	√		Ya
<b>Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Pyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Pyisihan TP/TGR (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√		Ada
<b>Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ada
<b>Pengecekan persediaan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	√		Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
<b>Pengecekan penyusutan aset tetap</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&amp;LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
<b>Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat &amp; Beban Bansos</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?		N/A	Ya
7. Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?		N/A	Ya
<b>Pengecekan Jurnal Akrua</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x) ?	√		Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?		√	Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas ( ) ?	√		Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		√	Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?	√		Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca	√		Ada
<b>KESESUAIAN DENGAN L-BMN</b>			

<b>Rekon Internal LKKL dengan L-BMN</b>	<b>Ya/Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?		√	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2021 di e-Rekon&LK?	√		Tidak
<i>Pada e-Rekon&amp;LK G2 lihat menu "Monitoring BMN&gt;&gt; Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
3. Apakah menurut e-Rekon-Ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?		√	Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?		N/A	Ya
<b>Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. ( <i>Masuk ke Aplikasi e-Rekon&amp;LK, kemudian pilih "daftar BMN"</i> )		√	
<b>MENU DAFTAR BMN</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?		√	Tidak
2. Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)		-	
3. Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)		-	
4. Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?		√	Tidak
5. Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)		-	
6. Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)		-	
<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b>			
	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah Pagu Minus? ( <i>Cek melalui e-Rekon-Ik menu daftar &gt;&gt; pagu minus"</i> )		√	Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja " <i>tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?</i>		√	Tidak
<b>Pengecekan TDK</b>			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?		√	Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS		√	Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
<i>e-Rekon&amp;LK Menu Monitoring &gt;&gt; Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>			



## SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.

Satker Konsolidasian	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2019 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?			
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?			
Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2020			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara <i>Stock Opname</i> Persediaan ?	√		Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAKTI telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	√		Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		√	Tidak
4. Apakah PNPB telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	√		Ya
5. Adakah PNPB digunakan langsung?		√	Tidak
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	√		Ya
8. ....			Ya

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	√		Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	√		Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	√		Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	√		Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	N/A		Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
6. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?	N/A		Ya
7. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	√		Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	√		Ya
9. Apakah belanja dalam rangkai penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?	√		Ya

## ANALISIS LAINNYA

Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional	√		Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah Langsung Barang	√		Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Tahun 2020 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2020	√		Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir ( <i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i> )	√		Ya

## Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas Refocussing kegiatan/Relokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19	√		
2. Jika terdapat Refocussing kegiatan/Relokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L			Rp306.033.000

3.	Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19		N/A
4.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19		N/A
5.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19		N/A
6.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19	√	
<b>Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
7.	Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19		N/A
8.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19		N/A
9.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19	√	
<b>Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19		N/A
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		N/A
<b>Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		N/A
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19	√	
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19	√	
	d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan .....		
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		N/A
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		N/A
<i>Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&amp;LK.</i>			

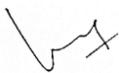
## LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

1. Total Aset per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 22,64% dibandingkan dengan Total Aset per 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan karena adanya penghentian Aset Tetap berupa peralatan dan mesin, penghapusan Aset Tetap Lainnya, dan penurunan persediaan, serta penurunan kas lainnya dan setara kas.
3. Terdapat 5 Hibah Jasa Langsung yang masih aktif per 31 Desember 2021 antara lain:
  1. Sustainable Development Financing (SDF) dari UNDP
  2. Domestic Resource Mobilization For Sustainable Development (DRM) dari GIZ
  3. Implementation of green Fund Readiness and Preparatory Support Programme (RPSP) Phase I dari GGGI
  4. Implementation of green Fund Readiness and Preparatory Support Programme (RPSP) Phase II dari GGGI
  5. Prospera dari DFAT
4. Piutang TGR an. Sdr. Ahmad Bahri Rambe sudah diungkapkan dalam Neraca Badan Kebijakan Fiskal per 30 September 2021 berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari pihak yang bersangkutan yang ditandatangani pada tanggal 7 September 2021. Piutang ini diklasifikasikan sebagai piutang lancar per 31 Desember 2021 karena akan jatuh tempo pada bulan November 2022.
5. Pending Temuan BA-015 berupa kasus Rumah Negara di Kemanggisan yang dikuasai Pihak Ketiga dengan update tindak lanjut berupa :
  - a. Pada tanggal 29 Agustus 2020, BKF telah mengirimkan Surat Kepada Penghuni Rumah Negara (Bapak Suhadi Hadiwidjojo) Nomor S-92/KF.1/2020 hal Tindak Lanjut Penertiban Administrasi Penghunian Rumah Negara. Pada Surat tersebut BKF meminta penghuni rumah mengikuti peraturan yang berlaku sehingga penghunian Rumah Negara dapat sesuai dengan peruntukannya.
  - b. Pada tanggal 04 Juni 2021 Penghuni Rumah Negara (Bapak Suhadi) melakukan komunikasi melalui Telepon dengan Sekretaris BKF dalam rangka merespon Surat BKF Nomor S-67/KF.1/2021 hal Penertiban Penghunian Rumah Negara Golongan II di Lingkungan BKF
  - c. Menindaklanjuti hasil komunikasi dengan Bapak Suhadi, BKF mengirimkan Surat Nomor S-74/KF.1/2021 tanggal 10 Juni 2021 hal Koordinasi Lanjutan Penertiban Penghunian Rumah Negara BKF. Pada Surat tersebut, BKF menegaskan bahwa proses perubahan status Rumah Negara dari golongan II ke golongan III tidak dapat ditindaklanjuti
  - d. Berdasarkan hasil rapat dengan Biro Madan dan Biro Cankeu, temuan tersebut akan dialihkan penyelesaiannya kepada Biro Madan selaku koordinator tingkat kementerian.
6. Sehubungan dengan perubahan metode penilaian persediaan dari metode harga perolehan terakhir (HPT) menjadi First In First Out (FIFO) yang dihitung mulai Januari 2021, maka akun beban penyesuaian persediaan dan pendapatan penyesuaian persediaan sudah tidak muncul dalam Neraca Percobaan Akrual maupun Laporan Operasioanal BKF
7. Dalam rangka penanganan pandemi covid-19, BKF mengalokasikan anggaran dalam bentuk akun khusus penanganan pandemi covid-19 dengan total anggaran sebesar Rp2.379.933.000. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk belanja barang operasional, belanja barang persediaan, dan belanja jasa penanganan pandemi covid-19.
8. Terdapat Saldo Akun Piutang Lainnya pada Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.294.222. Akun ini muncul karena adanya pembayaran kontrak sewa mesin fotokopi termin Desember yang menggunakan Bank Garansi, kemudian nilai BAST Final atas kontrak tersebut lebih kecil dari BAST Bank Garansi sehingga terdapat kelebihan pembayaran belanja barang yang harus disetor ke negara. Kelebihan belanja tersebut akan disetor oleh rekanan pada tahun 2022. Berdasarkan arahan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DJPB), pengembalian belanja tahun 2021 yang baru diterima pada tahun 2022 dicatat sebagai piutang lainnya per 31 Desember 2021.

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,



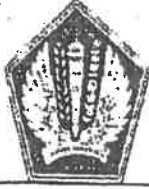
( Nanang Zainal Arifin )  
NIP.197002181996031001

Jakarta, 2022

Penelaah,



( Rofiatul Mahmudah )  
NIP.199605242018012001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA II

JALAN WAHIDIN II NO.3 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3845208, 3840519, FAKSIMILE (021) 3845208

Nomor : S-2295/WPb.12/KP.0230/2015  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Persetujuan Kembali Atas Pembukaan Rekening  
Milik Badan Kebijakan Fiskal

28 Mei 2015

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kebijakan Fiskal  
Jakarta

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan surat Saudara tanggal 22 Mei 2015 Nomor:S-133/KF.1/2015, dengan ini kami memberikan persetujuan pembukaan rekening sebagaimana terlampir.

Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.

Selanjutnya Saudara diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban sebagai berikut :
  - a. Melaporkan perubahan nama rekening pada kesempatan pertama kepada KPPN Jakarta II
  - b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN Jakarta II paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
  - c. Menyajikan rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
  - d. Menutup rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan rekening kepada Kuasa BUN penerbit ijin rekening.
  - e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak rekening digolongkan dalam rekening pasif.
2. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan rekening apabila :
  - a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal penerbitan surat persetujuan ini kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.
  - b. Tidak Menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN Jakarta II.
  - c. Rekening tidak digunakan sesuai tujuan pembukaan.

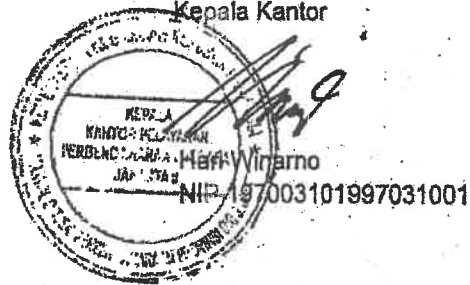
---

Terima kasih anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan sesuatu imbalan berupa apapun kepada petugas layanan kami

- d. Terjadi penyalahgunaan atas rekening yang disetujui Kuasa BUN.
3. Setelah melakukan perubahan penamaan rekening di bank mitra, satuan kerja mengajukan permohonan perubahan data supplier kepada KPPN Jakarta II c.q. Seksi Pencairan Dana dengan berpedoman pada PER-58/PB/2013.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

A.n. Menteri Keuangan,  
Kepala Kantor



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan  
c.q Direktur Pengelolaan Kas Negara
2. Setjen Kementerian Keuangan

---

Terima kasih anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan sesuatu imbalan berupa apapun kepada petugas layanan kami

**Daftar Persetujuan Kembali Atas Rekening Yang Telah Dibuka  
Badan Kebijakan Fiskal**

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening Baru	Bank/ Kantor Pos	Tujuan Pembukaan Rekening	Keterangan
1.	Penampungan Gaji Pegawai Depkeu	0507-01-000151-30-0	BPg 019 BKF	BRI KCP Depkeu	Menampung untuk keperluan Tukin	



Widyaiswara Menteri Keuangan,  
Badan Kebijakan Fiskal

Winarno

NIP. 197003101997031001

Terima kasih anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan sesuatu imbalan berupa apapun kepada petugas layanan kami



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI DKI JAKARTA**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 JAKARTA**  
**II**

JL. DR. WAHIDIN 2 NO. 3, JAKARTA 10710; TELEPON (021) 3453089; FAKSIMILI (021) 3845206;  
SUREL : KPPN.JAKARTA2@GMAIL.COM; LAMAN : WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/JAKARTA2

Nomor : S-721/WPB.12/KP.02/2020 4 Februari 2020  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran :  
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Induk Operasional Atas Nama Badan  
Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI (411880)

Yth. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga dan surat Bapak tanggal 30 Januari 2020 Nomor S-12/KF.1/2020 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Induk, dengan ini disampaikan bahwa:

- 1 Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Induk pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk keperluan menampung dana operasional.  
Rekening tersebut akan diberi nama: **RKK BKF Kemenkeu RI OPS.**
- 2 Surat persetujuan ini berlaku selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan.  
Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala Kantor Pelayanan  
Perbendaharaan Negara Tipe A1  
Jakarta II



Ditandatangani secara elektronik  
Hari Winarno

Tembusan:  
Direktur Pengelolaan Kas Negara





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI DKI JAKARTA**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA II**

JL. DR. WAHIDIN 2 NO. 3, JAKARTA 10710; TELEPON (021) 3453089; FAKSIMILI (021) 3845206;  
SUREL : KPPN.JAKARTA2@GMAIL.COM; LAMAN : WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/JAKARTA2

Nomor : S-765/WPB.12/KP.02/2020 10 Februari 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 lembar  
Hal : Persetujuan dan Pembukaan Rekening Satker Lingkup Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI (411880)

Yth. Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga dan surat Bapak tanggal 31 Januari 2020 Nomor S-13/KF.1/2020 hal Permohonan Persetujuan dan Pembukaan Rekening Satker, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan sejumlah 1 (satu) Rekening Satker lingkup badan Kebijakan Fiskal.
2. Selanjutnya dimohon bantuan Bapak untuk:
  - a. membuka Rekening Satker dan mengkonsolidasikan pada Rekening Induk sebagaimana terlampir;
  - b. menyampaikan laporan pembukaan dan kelengkapan Rekening Satker berupa kartu debit, *user dashboard*, dan *Cash Management System (CMS)* serta informasi Rekening Satker kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker sebagaimana terlampir; dan
  - c. menyampaikan laporan atas pelaksanaan huruf a dan b kepada kami, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
Hari Winarno

Tembusan:  
Direktur Pengelolaan Kas Negara







## **BERITA ACARA REKONSILIASI**

Nomor: BAR-158538/WPB.11/KP.019/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara BADAN KEBIJAKAN FISKAL (411880) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2021.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	86,106,252,000	86,106,252,000	0
2	Belanja	77,139,936,878	77,139,936,878	0
3	Pengembalian Belanja	-327,768,000	-327,768,000	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	722,211,705	722,211,705	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	63,820,798,263	63,820,798,263	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Budi Hartadi  
NIP.197004141997031001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,  
Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan  
Keuangan

Abdul Aziz  
NIP.198612082015021001

## Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: BADAN KEBIJAKAN FISKAL (411880)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2021 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Pagu Anggaran

SiAP : 86,106,252,000

SAI/SA-BUN : 86,106,252,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

### 2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

### 3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 77,139,936,878

SAI/SA-BUN : 77,139,936,878

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

### 4. Pengembalian Belanja

SiAP : -327,768,000

SAI/SA-BUN : -327,768,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

### 5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 722,211,705

SAI/SA-BUN : 722,211,705

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

### 6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

### 7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 63,820,798,263

SAI/SA-BUN : 63,820,798,263

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Budi Hartadi  
NIP.197004141997031001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,  
Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan  
Keuangan

Abdul Aziz  
NIP.198612082015021001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

**Bulan: Desember 2021**

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 23 November 2020 , DIPA-015.12.1.411880/2021

Unit Organisasi : (12) BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Tahun : 2021

Provinsi/Kabupaten/Kota : (01.51) DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT

KPPN : (019) JAKARTAII

Satuan Kerja : (411880) BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00225/SSP/411880/2021

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>BP Kas, BPP , dan UM</b>	9.962.976.608,00	11.175.723.773,00	21.138.700.381,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	8.759.837.280,00	6.542.018.048,00	15.301.855.328,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	18.420.000,00	9.650.000,00	28.070.000,00	0,00
	3. BP BPP	1.184.719.328,00	4.624.055.725,00	5.808.775.053,00	0,00
<b>B</b>	<b>BP Selain Kas</b>	9.962.976.608,00	7.513.719.748,00	17.476.696.356,00	0,00
	1. BP UP*)	177.998.181,00	250.928.911,00	428.927.092,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	2.735.800.000,00	2.735.800.000,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	1.304.814.504,00	3.602.425.061,00	4.907.239.565,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	924.565.776,00	924.565.776,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	8.480.163.923,00	0,00	8.480.163.923,00	0,00

\*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

\*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00 (terlampir salinan rekening koran)
<b>3. Jumlah Kas</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
<b>3. Selisih Kas</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

- 1.
- 2.



KOTA JAKARTA PUSAT, Desember 2021

Bendahara Pengeluaran

DHANDI SURYA MIHARJA

Penata Muda 198410152007011002

## Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Jumat tanggal 31 bulan Desember tahun 2021, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100124118801000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00225/SSP/411880/2021

### I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

#### A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3	Saldo BP BPP	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2)		Rp.	0

#### B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	0
2	Saldo BP TUP	Rp.	0
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4	Saldo Pajak	Rp.	0
5	Saldo Hibah	Rp.	0
5	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
6 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5)		Rp.	0

#### C. Selisih pembukuan (A4-B6)

Rp. 0

### II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

#### A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
3 Jumlah Kas (A1+A2)		Rp.	0

#### B. Selisih Kas (IA-II.A.3)

Rp. 0

### III. Hasil Rekonsiliasi Internal

#### A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a. Saldo UP	Rp.	0
	b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP		Rp.	0
2	a. Saldo TUP	Rp.	0
	b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP		Rp.	0
3	Saldo Lainnya	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)		Rp.	0

#### B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	0
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
4 Jumlah (B1+B2+B3)		Rp.	0

#### C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA

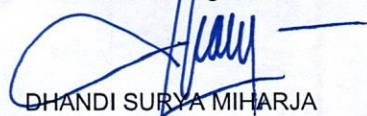
(III.A.4-III.B.4) Rp. 0

### IV. Penjelasan atas selisih

#### A. Selisih Kas (II.B)

#### B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa  
Bendahara Pengeluaran

  
DHANDI SURYA MIHARJA

Penata Muda 198410152007011002

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran  
Pembuat Komitmen

  
SEKRETARIAT  
NANANG ZAINAL ARIFIN  
NIP 197002181996031001

**Laporan Saldo Rekening  
Badan Kebijakan Fiskal  
Desember 2021**

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Kode Rekening	Surat Izin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo	
					Nomor	Tanggal			
1.	050701000151300	RPL 019 BKF UNTUK DANA TUKIN	BRI KCP Depkeu	30	S-2295/WPB.12/KP.0230/2015	28 Mei 2015	01 Desember 2021	Rp	-
2.	1030007676741	RKK BKF KEMENKEU OPS	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. - KCP Jakarta KPPN II	20	S-721/WPB.12/KP.02/2020	04 Februari 2020	31 Desember 2021	Rp	-
3.	8100124118801000	BPG 019 BKF	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. - KCP Jakarta KPPN II	20	S-765/WPB.12/KP.02/2020	10 Februari 2020	30 Desember 2021	Rp	-
4.	8100124118801001	BPP 019 BKF	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. - KCP Jakarta KPPN II	21	S-765/WPB.12/KP.02/2020	10 Februari 2020	31 Desember 2021	Rp	-
5.	8100124118801002	BPP 019 BKF	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. - KCP Jakarta KPPN II	21	S-765/WPB.12/KP.02/2020	10 Februari 2020	29 Desember 2021	Rp	-
6.	8100124118801003	BPP 019 BKF	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. - KCP Jakarta KPPN II	21	S-765/WPB.12/KP.02/2020	10 Februari 2020	29 Desember 2021	Rp	-
7.	8100124118801004	BPP 019 BKF	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. - KCP Jakarta KPPN II	21	S-765/WPB.12/KP.02/2020	10 Februari 2020	30 Desember 2021	Rp	-
8.	8100124118801005	BPP 019 BKF	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. - KCP Jakarta KPPN II	21	S-765/WPB.12/KP.02/2020	10 Februari 2020	31 Desember 2021	Rp	-
9.	8100124118801006	BPP 019 BKF	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. - KCP Jakarta KPPN II	21	S-765/WPB.12/KP.02/2020	10 Februari 2020	31 Desember 2021	Rp	-
10.	8100124118801007	BPP 019 BKF	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. - KCP Jakarta KPPN II	21	S-765/WPB.12/KP.02/2020	10 Februari 2020	29 Desember 2021	Rp	-
11.	8100124118801008	BPP 019 BKF	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. - KCP Jakarta KPPN II	21	S-765/WPB.12/KP.02/2020	10 Februari 2020	28 Desember 2021	Rp	-
12.	8100124118801009	BPP 019 BKF	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. - KCP Jakarta KPPN II	21	S-765/WPB.12/KP.02/2020	10 Februari 2020	20 Desember 2021	Rp	-

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Kode Rekening	Surat Izin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo
					Nomor	Tanggal		
13.	8100124118801010	BPP 019 BKF	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. - KCP Jakarta KPPN II	21	S-765/WPB.12/KP.02/2020	10 Februari 2020	30 Desember 2021	Rp -

Bendahara Pengeluaran



Dhandi Surya Miharja



LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
 POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2021  
 TAHUN ANGGARAN 2021

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
 UAPPB- : 12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Tanggal : 25/01/22 9:13 PM  
 Halaman : 1  
 Kode Lap : lap\_bmn\_neraca\_sawal\_e

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	1,295,919,338
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	186,296,440
131111	Tanah	4,018,902,000
132111	Peralatan dan Mesin	90,754,061,611
133111	Gedung dan Bangunan	3,869,560,997
134113	Jaringan	1,257,708,832
135121	Aset Tetap Lainnya	719,514,479
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	145,464,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(71,819,528,129)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(426,840,883)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(592,456,279)
162151	Software	2,733,004,720
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	3,198,018,184
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(3,198,018,184)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1,937,858,215)
<b>J U M L A H</b>		<b>30,203,748,911</b>

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
 POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
 TAHUN ANGGARAN 2021

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
 UAPPB- : 12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Tanggal : 25/01/22 9:12 PM  
 Halaman : 1  
 Kode Lap : lap\_bmn\_neraca\_face\_es

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	389,130,036
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	(93,780,420)
131111	Tanah	4,018,902,000
132111	Peralatan dan Mesin	86,288,958,023
133111	Gedung dan Bangunan	3,869,560,997
134113	Jaringan	1,257,708,832
135111	Aset Tetap Renovasi	606,020,800
135121	Aset Tetap Lainnya	869,289,679
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	79,904,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(73,821,900,297)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(581,529,043)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(621,399,033)
162151	Software	3,039,924,720
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	12,595,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(12,595,000)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(2,510,474,961)
<b>J U M L A H</b>		<b>22,790,315,333</b>

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
UAPPB-E1 : 12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Tanggal : 25/01/22 9:12 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	348	4,018,902,000	0	0	0	0	348	4,018,902,000
20101	TANAH PERSIL	335	3,897,713,000	0	0	0	0	335	3,897,713,000
20103	LAPANGAN	13	121,189,000	0	0	0	0	13	121,189,000
132111	Peralatan dan Mesin	7,231	90,754,061,611	202	2,747,644,297	462	7,212,747,885	6,971	86,288,958,023
30103	ALAT BANTU	19	5,901,845,766	0	0	0	0	19	5,901,845,766
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	76	13,621,213,000	0	0	16	237,067,000	60	13,384,146,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	19	41,800,000	0	0	0	0	19	41,800,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2	8,470,000	1	5,830,000	0	0	3	14,300,000
30303	ALAT UKUR	8	40,008,210	1	1,182,500	0	0	9	41,190,710
30501	ALAT KANTOR	1,217	12,400,645,089	31	1,571,873,800	13	56,036,115	1,235	13,916,482,774
30502	ALAT RUMAH TANGGA	4,083	22,534,631,375	154	764,189,997	23	334,219,430	4,214	22,964,601,942
30601	ALAT STUDIO	123	1,615,117,849	7	196,350,000	0	0	130	1,811,467,849
30602	ALAT KOMUNIKASI	179	244,014,100	1	26,840,000	0	0	180	270,854,100
30603	PERALATAN PEMANCAR	3	69,574,000	1	7,068,000	0	0	4	76,642,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	15	43,994,500	0	0	0	0	15	43,994,500
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	3	12,282,000	0	0	0	0	3	12,282,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	1	5,830,000	0	0	1	5,830,000	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	2	19,525,000	0	0	2	19,525,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	1,081	16,528,292,197	2	122,210,000	406	5,292,925,540	677	11,357,576,657
31002	PERALATAN KOMPUTER	391	16,014,689,425	4	52,100,000	0	0	395	16,066,789,425
31503	ALAT SAR	1	47,374,800	0	0	0	0	1	47,374,800
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	1	1,267,144,800	0	0	1	1,267,144,800	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	3	317,589,500	0	0	0	0	3	317,589,500
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	3	11,550,000	0	0	0	0	3	11,550,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	1	8,470,000	0	0	0	0	1	8,470,000
133111	Gedung dan Bangunan	4	3,869,560,997	0	0	0	0	4	3,869,560,997
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	1,679,201,997	0	0	0	0	2	1,679,201,997
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	2	2,190,359,000	0	0	0	0	2	2,190,359,000
134113	Jaringan	8	1,257,708,832	0	0	0	0	8	1,257,708,832
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	3	94,835,000	0	0	0	0	3	94,835,000
50302	INSTALASI AIR KOTOR	1	452,325,337	0	0	0	0	1	452,325,337
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	1	541,932,000	0	0	0	0	1	541,932,000
50310	INSTALASI LAIN	3	168,616,495	0	0	0	0	3	168,616,495
135111	Aset Tetap Renovasi	0	0	1	606,020,800	0	0	1	606,020,800
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	1	606,020,800	0	0	1	606,020,800

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
UAPPB-E1 : 12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Tanggal : 25/01/22 9:12 PM  
Halaman : 2  
Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135121	Aset Tetap Lainnya	1,289	719,514,479	111	149,775,200	0	0	1,400	869,289,679
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1,276	645,313,979	105	127,576,100	0	0	1,381	772,890,079
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	13	74,200,500	6	22,199,100	0	0	19	96,399,600
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	384	3,198,018,184	457	5,907,608,085	840	9,093,031,269	1	12,595,000
30103	ALAT BANTU	5	139,489,099	0	0	5	139,489,099	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	8	2,585,200,000	16	237,067,000	24	2,822,267,000	0	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	6	29,865,000	0	0	6	29,865,000	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	23	48,336,193	13	56,036,115	36	104,372,308	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	239	183,598,764	23	334,219,430	261	505,223,194	1	12,595,000
30601	ALAT STUDIO	1	753,500	0	0	1	753,500	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	101	210,054,578	0	0	101	210,054,578	0	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	405	5,280,285,540	405	5,280,285,540	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	1	721,050	0	0	1	721,050	0	0
<b>TOTAL</b>			103,817,766,103		9,411,048,382		16,305,779,154		96,923,035,331

LAPORAN BARANG PENGGUNA  
EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
UAPPB-E1 : 12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Tanggal : 25/01/22 9:14 PM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_ekstra\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	774	188,481,220	46	21,977,499	1	225,500	819	210,233,219
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	8	5,016,000	0	0	0	0	8	5,016,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	2	842,600	0	0	2	842,600
30501	ALAT KANTOR	77	17,981,000	2	1,470,500	1	225,500	78	19,226,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	572	140,631,260	32	14,933,899	0	0	604	155,565,159
30601	ALAT STUDIO	47	18,065,300	7	2,523,500	0	0	54	20,588,800
30602	ALAT KOMUNIKASI	2	1,599,400	0	0	0	0	2	1,599,400
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	3	2,207,000	0	0	3	2,207,000
31503	ALAT SAR	68	5,188,260	0	0	0	0	68	5,188,260
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	97	23,772,000	1	225,500	98	23,997,500	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1	100,000	0	0	1	100,000	0	0
30501	ALAT KANTOR	5	1,072,500	1	225,500	6	1,298,000	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	89	22,027,500	0	0	89	22,027,500	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	2	572,000	0	0	2	572,000	0	0
TOTAL			212,253,220		22,202,999		24,223,000		210,233,219

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
UAPPB-E1 : 12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Tanggal : 25/01/22 9:12 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	348	4,018,902,000	0	0	0	0	348	4,018,902,000
20101	TANAH PERSIL	335	3,897,713,000	0	0	0	0	335	3,897,713,000
20103	LAPANGAN	13	121,189,000	0	0	0	0	13	121,189,000
132111	Peralatan dan Mesin	8,005	90,942,542,831	248	2,769,621,796	463	7,212,973,385	7,790	86,499,191,242
30103	ALAT BANTU	19	5,901,845,766	0	0	0	0	19	5,901,845,766
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	76	13,621,213,000	0	0	16	237,067,000	60	13,384,146,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	27	46,816,000	0	0	0	0	27	46,816,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2	8,470,000	1	5,830,000	0	0	3	14,300,000
30303	ALAT UKUR	8	40,008,210	3	2,025,100	0	0	11	42,033,310
30501	ALAT KANTOR	1,294	12,418,626,089	33	1,573,344,300	14	56,261,615	1,313	13,935,708,774
30502	ALAT RUMAH TANGGA	4,655	22,675,262,635	186	779,123,896	23	334,219,430	4,818	23,120,167,101
30601	ALAT STUDIO	170	1,633,183,149	14	198,873,500	0	0	184	1,832,056,649
30602	ALAT KOMUNIKASI	181	245,613,500	1	26,840,000	0	0	182	272,453,500
30603	PERALATAN PEMANCAR	3	69,574,000	1	7,068,000	0	0	4	76,642,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	15	43,994,500	3	2,207,000	0	0	18	46,201,500
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	3	12,282,000	0	0	0	0	3	12,282,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	1	5,830,000	0	0	1	5,830,000	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	2	19,525,000	0	0	2	19,525,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	1,081	16,528,292,197	2	122,210,000	406	5,292,925,540	677	11,357,576,657
31002	PERALATAN KOMPUTER	391	16,014,689,425	4	52,100,000	0	0	395	16,066,789,425
31503	ALAT SAR	69	52,563,060	0	0	0	0	69	52,563,060
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	1	1,267,144,800	0	0	1	1,267,144,800	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	3	317,589,500	0	0	0	0	3	317,589,500
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	3	11,550,000	0	0	0	0	3	11,550,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	1	8,470,000	0	0	0	0	1	8,470,000
133111	Gedung dan Bangunan	4	3,869,560,997	0	0	0	0	4	3,869,560,997
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	1,679,201,997	0	0	0	0	2	1,679,201,997
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	2	2,190,359,000	0	0	0	0	2	2,190,359,000
134113	Jaringan	8	1,257,708,832	0	0	0	0	8	1,257,708,832
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	3	94,835,000	0	0	0	0	3	94,835,000
50302	INSTALASI AIR KOTOR	1	452,325,337	0	0	0	0	1	452,325,337
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	1	541,932,000	0	0	0	0	1	541,932,000
50310	INSTALASI LAIN	3	168,616,495	0	0	0	0	3	168,616,495
135111	Aset Tetap Renovasi	0	0	1	606,020,800	0	0	1	606,020,800
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	1	606,020,800	0	0	1	606,020,800

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
UAPPB-E1 : 12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Tanggal : 25/01/22 9:12 PM

Halaman : 2

Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135121	Aset Tetap Lainnya	1,289	719,514,479	111	149,775,200	0	0	1,400	869,289,679
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1,276	645,313,979	105	127,576,100	0	0	1,381	772,890,079
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	13	74,200,500	6	22,199,100	0	0	19	96,399,600
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	481	3,221,790,184	458	5,907,833,585	938	9,117,028,769	1	12,595,000
30103	ALAT BANTU	5	139,489,099	0	0	5	139,489,099	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	8	2,585,200,000	16	237,067,000	24	2,822,267,000	0	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	6	29,865,000	0	0	6	29,865,000	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1	100,000	0	0	1	100,000	0	0
30501	ALAT KANTOR	28	49,408,693	14	56,261,615	42	105,670,308	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	328	205,626,264	23	334,219,430	350	527,250,694	1	12,595,000
30601	ALAT STUDIO	1	753,500	0	0	1	753,500	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	103	210,626,578	0	0	103	210,626,578	0	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	405	5,280,285,540	405	5,280,285,540	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	1	721,050	0	0	1	721,050	0	0
<b>TOTAL</b>			104,030,019,323		9,433,251,381		16,330,002,154		97,133,268,550

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA  
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan  
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
UAPPB-E1 : 12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Tanggal : 25/01/22 9:13 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_kdp\_es1

AKUN NERACA/ SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2021	PENAMBAHAN	KDP YANG MENJADI ASET DEFINITIF	JUMLAH S/D 31 DESEMBER 2021	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	145,464,000	540,460,800	606,020,800	79,904,000	
7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	79,904,000	0	0	79,904,000	
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
7010101005	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	65,560,000	540,460,800	606,020,800	0	
<b>TOTAL</b>		145,464,000	540,460,800	606,020,800	79,904,000	



LAPORAN BARANG PEMBANTU PENGGUNA ESELON I  
 ASET TAK BERWUJUD  
 RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
 UAPPB-E1 : 12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Tanggal : 25/01/22 9:13 PM  
 Halaman : 1  
 Kode Lap : lap\_atb\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO S.D 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162151	Software	32	2,733,004,720	7	306,920,000	0	0	39	3,039,924,720
80101	ASET TAK BERWUJUD	32	2,733,004,720	7	306,920,000	0	0	39	3,039,924,720
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			2,733,004,720		306,920,000		0		3,039,924,720

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Tanggal : 25/01/22 9:13 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_es1

UAPA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
UAPA-Es1 : 12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2021					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
132111	Peralatan dan Mesin	86,288,958,023	71,819,528,129	7,851,223,013	(5,848,850,845)	73,821,900,297	12,467,057,726
30103	ALAT BANTU	5,901,845,766	4,479,925,736	865,603,832	0	5,345,529,568	556,316,198
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	13,384,146,000	9,085,572,010	1,523,485,147	(237,067,000)	10,371,990,157	3,012,155,843
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	41,800,000	36,478,750	3,547,500	0	40,026,250	1,773,750
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	14,300,000	5,225,000	2,860,000	4,081,000	12,166,000	2,134,000
30303	ALAT UKUR	41,190,710	29,395,290	5,365,370	0	34,760,660	6,430,050
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	13,916,482,774	10,031,317,902	1,066,788,255	1,230,633,685	12,328,739,842	1,587,742,932
30502	ALAT RUMAH TANGGA	22,964,601,942	20,078,945,811	994,351,280	(332,959,930)	20,740,337,161	2,224,264,781
30601	ALAT STUDIO	1,811,467,849	1,075,545,404	203,205,090	0	1,278,750,494	532,717,355
30602	ALAT KOMUNIKASI	270,854,100	217,048,600	18,827,500	0	235,876,100	34,978,000
30603	PERALATAN PEMANCAR	76,642,000	3,948,500	7,310,800	0	11,259,300	65,382,700
30701	ALAT KEDOKTERAN	43,994,500	14,447,950	8,798,900	0	23,246,850	20,747,650
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	12,282,000	12,282,000	0	0	12,282,000	0
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	0	0	0	0	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	0	2,040,500	0	(2,040,500)	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	19,525,000	0	(19,525,000)	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	11,357,576,657	11,363,451,388	1,955,395,065	(5,288,185,540)	8,030,660,913	3,326,915,744
31002	PERALATAN KOMPUTER	16,066,789,425	13,808,368,828	1,170,346,874	0	14,978,715,702	1,088,073,723
31503	ALAT SAR	47,374,800	23,687,400	23,687,400	0	47,374,800	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	0	1,203,787,560	0	(1,203,787,560)	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	317,589,500	317,589,500	0	0	317,589,500	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	11,550,000	2,475,000	1,650,000	0	4,125,000	7,425,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	8,470,000	8,470,000	0	0	8,470,000	0
133111	Gedung dan Bangunan	3,869,560,997	426,840,883	154,688,160	0	581,529,043	3,288,031,954
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1,679,201,997	185,507,392	85,735,734	0	271,243,126	1,407,958,871
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	2,190,359,000	241,333,491	68,952,426	0	310,285,917	1,880,073,083
134113	Jaringan	1,257,708,832	592,456,279	28,942,754	0	621,399,033	636,309,799
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	94,835,000	48,998,083	3,161,166	0	52,159,249	42,675,751
50302	INSTALASI AIR KOTOR	452,325,337	164,843,051	12,233,288	0	177,076,339	275,248,998
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	541,932,000	209,998,650	13,548,300	0	223,546,950	318,385,050
50310	INSTALASI LAIN	168,616,495	168,616,495	0	0	168,616,495	0
135111	Aset Tetap Renovasi	606,020,800	0	0	0	0	606,020,800
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	606,020,800	0	0	0	0	606,020,800
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	12,595,000	3,198,018,184	1,259,500	(3,186,682,684)	12,595,000	0
30103	ALAT BANTU	0	139,489,099	0	(139,489,099)	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	2,585,200,000	0	(2,585,200,000)	0	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Tanggal : 25/01/22 9:13 PM

Halaman : 2

Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_es1

UAPA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
UAPA-Es1 : 12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2021					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	29,865,000	0	(29,865,000)	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	0	48,336,193	0	(48,336,193)	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	12,595,000	183,598,764	1,259,500	(172,263,264)	12,595,000	0
30601	ALAT STUDIO	0	753,500	0	(753,500)	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	210,054,578	0	(210,054,578)	0	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	721,050	0	(721,050)	0	0
	JUMLAH	92,034,843,652	76,036,843,475	8,036,113,427	(9,035,533,529)	75,037,423,373	16,997,420,279

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA  
EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
TAHUN ANGGARAN 2021**

UAPA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
UAPA-Es1 : 12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Tanggal : 25/01/22 9:14 PM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_ekstra\_es

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2021					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
132111	Peralatan dan Mesin	210,233,219	111,555,844	30,027,392	(225,500)	141,357,736	68,875,483
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	5,016,000	2,508,000	2,508,000	0	5,016,000	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR	842,600	0	84,260	0	84,260	758,340
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	19,226,000	11,576,800	2,305,350	(225,500)	13,656,650	5,569,350
30502	ALAT RUMAH TANGGA	155,565,159	84,438,574	20,948,192	0	105,386,766	50,178,393
30601	ALAT STUDIO	20,588,800	7,684,270	3,641,010	0	11,325,280	9,263,520
30602	ALAT KOMUNIKASI	1,599,400	159,940	319,880	0	479,820	1,119,580
30701	ALAT KEDOKTERAN	2,207,000	0	220,700	0	220,700	1,986,300
31503	ALAT SAR	5,188,260	5,188,260	0	0	5,188,260	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	23,772,000	0	(23,772,000)	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	100,000	0	(100,000)	0	0
30501	ALAT KANTOR	0	1,072,500	0	(1,072,500)	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	22,027,500	0	(22,027,500)	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	572,000	0	(572,000)	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>210,233,219</b>	<b>135,327,844</b>	<b>30,027,392</b>	<b>(23,997,500)</b>	<b>141,357,736</b>	<b>68,875,483</b>

**LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA ESELON I  
ASET TAK BERWUJUD  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
TAHUN ANGGARAN 2021**

UAPB : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

UAPPB-E1 : 12

BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Tanggal : 25/01/22 9:13 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_amor\_es1

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2021						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	BEBAN AMORTISASI	AKUMULASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
162151	Software		39	3,039,924,720	1,937,858,215	572,616,746	0	2,510,474,961	529,449,759
80101	ASET TAK BERWUJUD		39	3,039,924,720	1,937,858,215	572,616,746	0	2,510,474,961	529,449,759
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		0	0	0	0	0	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD		0	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>			39	3,039,924,720	1,937,858,215	572,616,746	0	2,510,474,961	529,449,759

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
UAPPB-E1 : 12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Tanggal : 25/01/22 9:14 PM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_persediaan\_es1

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	38,178,160
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	257,400
1010301003	Penjepit Kertas	16,216,948
1010301004	Penghapus/Korektor	1,695,100
1010301005	Buku Tulis	3,491,950
1010301006	Ordner Dan Map	157,609,830
1010301007	Penggaris	1,650
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	(243,870)
1010301009	Pita Mesin Ketik	(906,800)
1010301010	Alat Perekat	(859,870)
1010301011	Stadler HD	904,180
1010301012	Staples	(51,260)
1010301014	Barang Cetak	(6,440,000)
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	23,263,978
1010302001	Kertas HVS	63,551,520
1010302002	Berbagai Kertas	(22,629,100)
1010302004	Amplop	25,908,860
1010302005	Kop Surat	24,138,400
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	(59,187,700)
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	(12,375,000)
1010304003	Pita Printer	18,323,900
1010304004	Tinta/Toner Printer	66,529,560
1010304006	USB/Flash Disk	2,707,600
1010304011	CD/DVD	(1,650,000)
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	18,318,300
1010306010	Batu Baterai	14,592,600
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	17,783,700
Jumlah Barang Konsumsi		389,130,036
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	(550,000)
1010305006	Alat Pengikat	1,058,200
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	(92,237,780)
1010305009	Alat Untuk Makan Dan Minum	(6,697,240)
1010305012	Pengharum Ruangan	(105,600)
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	4,752,000
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		(93,780,420)
<b>TOTAL</b>		<b>295,349,616</b>

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
UAPPB-E1 : 12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Tanggal : 25/01/22 9:13 PM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_persediaan\_es1\_kel

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
117111	Barang Konsumsi	
10103	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	389,130,036
	<b>Jumlah ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR</b>	<b>389,130,036</b>
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
10103	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	-93,780,420
	<b>Jumlah ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR</b>	<b>-93,780,420</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>295,349,616</b>



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN KEBIJAKAN FISKAL  
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN FISKAL**

GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3812203 PESAWAT 7030/31; FAKSIMILI (021) 3848049 SITUS [www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id)

**BERITA ACARA  
PEMERIKSAAN FISIK PERSEDIAAN (*STOCK OPNAME*)  
TAHUN ANGGARAN 2021 BADAN KEBIJAKAN FISKAL  
NOMOR : BA- /KF.15/2021**

Pada hari ini Jumat tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Yusmal Nikho  
NIP : 197906192000121001  
Jabatan : Kepala Bagian Umum, selaku Atasan Langsung Pejabat Pengurus Persediaan di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Rahyo Setyo Wibowo  
NIP : 198009052001121005  
Jabatan : Kepala Subbagian Manajemen Aset dan Layanan Pengadaan pada Bagian Umum, selaku Pejabat Pengurus Persediaan di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** telah melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang yang diterima dari hasil pengadaan maupun penerimaan lainnya yang sah baik dari segi jumlah, mutu, spesifikasi dan kondisi barang yang dikelola dan disimpan oleh **PIHAK KEDUA**, yaitu sebagaimana dimaksud daftar terlampir.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

Rahyo Setyo Wibowo  
NIP 198009052001121005

Muhammad Yusmal Nikho  
NIP 197906192000121001



**LAMPIRAN BA STOCK OPNAME**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2021 TAHUN**  
**ANGGARAN : 2021**

NAMA UAKPB : BADAN KEBIJAKAN FISKAL  
 KODE UAKPB : 015.12.0199.411880

KODE	URAIAN	JUMLAH S/D 31-12-2021
	<b>ALAT TULIS</b>	
000001	Pensil Hitam Steadler 2B	0
000002	Signpen Boxy	229
000004	Signpen Balliner	29
000005	Signpen Faster	0
000006	Signpen Snowman Marker	0
000007	Spidol Artline 500	0
000008	Spidol Artline 70	0
000010	Stabilo Boss	240
000013	Signpen Bertali (Pulpen Meja)	0
000015	Ballpoin Gell	0
000016	Ballpoint Faster C6*	100
000019	Pensil 2B Faber Castle*	0
000020	Spidol Permanent G-12 Snowman*	21
000021	Spidol Whiteboard Snowman*	2
000024	Ballpoint Balliner*	0
000026	Spidol Whiteboard Snowman PCS	5
000027	Ballpoint Boldliner	0
000028	Stabillo Kenko Warna Mix	3
000029	Sarasa Clip Pen 0.5 mm	0
000030	Sarasa Clip Pen 0.7 mm	27
000031	Sarasa Clip Pen 1.0 mm	25
000032	Pulpen Balliner Pilot 0.8 mm Biru dus	61
000033	Pulpen Balliner Pilot 0.8 mm hitam dus	21
000034	Spidol Boardmarker Hitam Snowman	21
	<b>TINTA TULIS, TINTA STEMPEL</b>	
000004	Tinta Stempel	13
	<b>PENJEPIT KERTAS</b>	
000001	Binder Clip Lion No. 105	3,152
000002	Binder Clip Lion No. 107	132
000003	Binder Clip Lion No. 111	5,040
000004	Binder Clip Lion No. 200	57
000005	Binder Clip Lion No. 260	43
000006	Paper Clip Sea Gull	0
000007	Push Pin (Paku Sterofoam)	112
000008	Paper Clip Warna Warni	336
000009	binder clip kenko no 155	1,584
000013	Joyko trigonal Clips No. 1*	30
000014	Joyko Trigonal Clips No.3*	58

000018	Push Pin Kenko	92
000019	Paper Clip Warna Warni Kenko	31
	<b>PENGHAPUS/KOREKTOR</b>	
000002	Karet Penghapus Steadhler	0
000004	Tinta Penghapus Putih (Tipp Ex)	56
000007	Penghapus Pensil Staedtler 526 b lusin	14
000008	Kenko Whiteboard Eraser With Magnet	56
	<b>BUKU TULIS</b>	
000002	Buku Ekspedisi	105
000007	Buku Kuitansi BKF	9
000008	Buku Kuitansi Kas Sementara	48
000064	Buku Folio Hardcover isi 100	60
000065	Buku Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok - Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2020	0
000066	Dummy Buku Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal Tahun 2020	0
000067	Buku Laporan Tinjauan Ekonomi dan Fiskal Edisi II 2019	0
000068	Tambahan Buku Tinjauan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Edisi I 2019	0
000069	Buku Tinjauan Ekonomi dan Fiskal Edisi II Bahasa Inggris 2019	0
000070	Tambahan Buku Tinjauan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal tahun 2019 dalam rangka Sosialisasi Kebijakan Fiskal	0
000071	Buku Tinjauan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal (Edisi III) Bahasa Inggris	0
000073	Buku Tinjauan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Edisi IV 2019	0
000074	Buku Laporan Tinjauan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Edisi IV 2019 Bahasa Inggris	0
000075	Buku Petunjuk Tata Naskah Dinas Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2019	0
000076	Booklet Transformasi Organisasi BKF	0
000077	Laporan Belanja Perpajakan 2017 - 2018	0
000079	Buku Agenda 2020	0
000080	Buku KEM PPKF Tahun 2021	0
000081	Tambahan Buku KEM PPKF Tahun 2021	0
000082	Pencetakan TEKF Edisi I Tahun 2020	0
000083	Pencetakan TEKF Edisi II Tahun 2020	0
000084	Pencetakan TEKF Edisi III Tahun 2020	0
000085	Buku TEKF Edisi 1 2021	0
000086	Pencetakan Pidato Tanggapan Menteri Keuangan 2021	0
000087	Buku TEKF Edisi II Tahun 2021	0
000088	Pencetakan Buku TEKF Edisi III Tahun 2021	0
	<b>ORDNER DAN MAP</b>	
000001	Box File	0
000004	Odner Bantex	0
000007	Snelheckter Plastik	105
000009	Stopmap Bufallow Diamond	100
000011	Stopmap Semi Eksekutif BKF	23,300
000012	Stopmap Eksekutif BKF	150
000015	Odner Bambi King	0
000020	Color Divider A4 6013 (20 Indexes)	120

000021	Plastik Bantex	75
000022	Odner A5 1403	0
000024	Map L F4 transparan	179
000025	Map L transparan Daichi A4	15
000026	Bantek clip file A4	350
000027	Bantek clip file F4	900
000028	Hang map Bantex	13
000034	Map Durable Duraclips A4*	0
000036	King Jim Business File A4	0
000037	PP Pocket Fil Folio 0.6 mm	100
000038	Map Folder Arsip	3,500
000039	Map Gantung Hijau Merk Fujita	8
000040	King Jim D-Ring 691	40
000041	King Jim D-Ring 692	40
000042	PP Pocket File Bantex Folio 2044	0
000043	Odner Bantex 1401 Biru F4	12
000044	Bantex Clip File 3261 Folio Biru	300
	<b>PENGGARIS</b>	
000001	Garisan Alumunium 30 cm	48
000002	Garisan Alumunium 50 cm	0
000003	Garisan Plastik 30 cm	20
000004	Garisan Plastik 50 cm	12
	<b>CUTTER (ALAT TULIS KANTOR)</b>	
000001	Isi Silet Cutter A-300	79
000002	Isi Silet Cutter L-500	0
000004	Peraut Pensil Besar	9
000005	Pisau Cutter A-300	108
000006	Pisau Cutter L-500	144
000008	Isi Cutter Besar L-150 Kenko	325
	<b>PITA MESIN KETIK</b>	<b>0</b>
000004	Pita Mesin tik Swallow	0
000007	Pita Penghapus Royal	0
000008	Pita Mesin Ketik Royal SE 700 DS	0
000010	pita mesin tik nakajima ax-150	0
	<b>ALAT PEREKAT</b>	
000001	Celotip Band	16
000002	Celotip Bening Besar	0
000003	Celotip Bening Kecil	0
000004	Celotip Band uk. 24 mm	94
000005	Celotip Band uk. 35 mm	0
000006	Lem O'Glue	0
000007	Lem Lem Pasta UHU Stick	0
000009	Celotip Band Cokelat	0
000010	Double Celotip 1'	145
000011	Celotip Bening 3	0
000012	Double Celotip 1/2"	48
000015	Lem Kertas*	240
000019	celotip band hitam	0

000020	celotip band daimaru	0
000021	Celotip Band Hitam Kenko	0
000022	Celotip Band Hitam Daimaru 48mm x 12mm	2
000023	Lem Stick Joyko GS-09	10
000024	Double Tape Kenko 2 Inchi (48mm)	38
000025	Lakban Bening 45 mm Daimaru	51
	<b>STADLER HD</b>	
000001	Heckmachine HD-3R	0
000002	Heckmachine HD-10R	62
000007	Steples Isi 3-IM	300
000008	Steples Isi 10-IM	60
	<b>STAPLES</b>	
000002	Staples Sedang Merk Max*	17
000003	Heckmachine HD 10R	5
000004	Staples Kecil Kenko HD-10D	53
	<b>ISI STAPLES</b>	<b>0</b>
000001	Isi Staples No.10*	0
	<b>BARANG CETAKAN</b>	<b>0</b>
000001	Kartu Nama Pejabat	0
000002	Kartu Nama Pegawai	0
000003	Materai 6000	0
000006	Kalender Meja 2020	0
000007	Kalender Dinding 2020	0
000008	Materai 2020	0
000009	Cetak Stiker Lantai Lift	0
	<b>ALAT TULIS KANTOR LAINNYA</b>	
000002	Bantalan stempel	15
000003	Gunting Besar	60
000008	Perporator No. 220	0
000009	Perporator No. 85	0
000011	Spiral Kawat 3/16(No.3)	750
000012	Spiral Kawat 1/4(No.4)	1,500
000013	Spiral Kawat 5/16(No.5)	600
000014	Spiral Kawat 3/8(No.6)	1,000
000015	Spiral Kawat 7/16(No.7)	500
000016	Spiral Kawat 1/2(No.8)	750
000018	Stempel BKF	11
000019	Stiker Post-it 3x3	0
000023	Tali Name Tag Pegawai BKF	0
000024	Tempat Celotip (Tape Dispenser)	34
000025	Tempat Paper Clip	59
000026	Transparan Paper Folio	670
000027	Tempat Pensil	70
000029	Stiker Post It Sign Here	0
000036	RF ID Card	0
000044	Spiral Kawat No. 16	40
000045	Spiral Kawat No. 20	50
000047	Tempat Kertas	36

000048	Stiker Post It 6 colors x 50 sheet	302
000049	Gunting Kecil	108
000050	clipboard with cover	0
000051	post it 3M 3x3 kuning	1
000052	Post It 654*	5
000059	Pembatas Besi Buku Merk Lion	0
000060	Post It Sign Here 3M	0
000061	Post It Sign Here Per Buah	184
000062	Tempat Pensil Hitam Jaring	0
000063	Post it Mark n Notes	352
	<b>KERTAS HVS</b>	
000002	Kertas HVS Berwarna 70 gr uk. A4	1,230
000003	Kertas FC uk. Folio Bola Dunia 70 gr	165
000008	Kertas FC A4 70 gr Paper One	2
000009	Kertas FC Folio 70 gr Paper One	0
000010	Kertas FC A4 100 gr Paper One	60
000011	Kertas FC A3 100gr Gold	0
000012	Kertas FC Folio 80 gr	0
000019	Kertas Fotocopy FC A4 75gr Paperone	740
000020	Kertas Fotocopy FC A3 75gr Paperone	40
	<b>BERBAGAI KERTAS</b>	
000006	Kertas HVS Stiker A4	19
000007	pembatas sekat (guide) klasifikasi arsip (warna warni)	0
000008	kertas flip chart	350
000009	Kertas Foto	42
	<b>KERTAS COVER</b>	<b>0</b>
000001	Cover Bufallow Bahan Sidang A4	0
	<b>AMPLOP</b>	
000001	Amplop Putih Polos Panjang	8
000002	Amplop Putih Polos Pendek	1
000003	Amplop Dinas Folio	2,200
000004	Amplop Dinas Kecil/Gaji	0
000007	Amplop Dinas Kecil Bhs. Inggris	0
000009	Amplop Dinas Kemenkeu (Coklat Kecil)	0
000010	Amplop dinas kecil Bhs. Inggris (Putih)	0
000011	Amplop Dinas Kecil Bahasa Indonesia (Putih)	0
000013	Amplop CD Putih Polos	0
000016	Amplop Kecil Berkop Kemenkeu BKF	4,700
000017	Amplop Gaji Polos	5,000
000018	Amplop Putih Panjang no 90 Paperline	60
000019	Amplop putih pendek No. 104 Paperline	60
	<b>KOP SURAT</b>	
000004	Kop Surat Menteri Bhs. Inggris HVS Folio	0
000006	Kop Surat Menteri Bhs. Indonesia HVS Folio	0
000007	Kop Surat Menteri Bhs. Indonesia HVS A4	0
000008	Kop Surat Garuda (Polos) HVS A4 portrait	22,500
000009	Kop Surat Garuda (Polos) HVS Folio portrait	9,799
000010	kertas kop A4 garuda menteri keuangan landscape	3,699

000011	kertas kop F4 garuda warna mas menteri keuangan landscape	5,000
000013	Kertas Kop Surat Garuda 2020 F4 Portrait	3
000014	Kertas Kop Surat Garuda 2020 F4 Landscape	10
	<b>KERTAS DAN COVER LAINNYA</b>	
000005	Blangko SSP Carbonise	0
000008	Cover Plastik Folio	0
000011	Kartu Barang	0
000016	Plastik Laminating	0
000023	Kartu Nomeriing Kode Surat	0
000024	Kalender Meja BKF	0
000029	Blanko Cuti	0
000031	Kartu Pinjaman BMN Operasional	0
000033	Kartu Nama Pejabat	0
000036	kartu Rfid pegawai	0
000041	box kartu nama	0
000044	Kalender Dinding 2019	0
000046	Kalender Meja 2019	0
000048	Retractable Yoyo Key Ring Pull Chain Belt Clip ID card	0
000049	Frame ID Kartu RFID	0
000050	RFID Card Tipis	0
000051	Pembatas Kertas Binder Bantex 6050 A4	0
000052	ID Card Pegawai	0
000053	Plastik Laminating TOHO uk F4 100 Micron	0
000054	Kardus Arsip Besar : Ada tutup kardus, cetak sablon 1 nama	0
000055	Kertas Label Tom n Jerry no. 121	120
000056	Post It Warna Neo 3M 654	0
000057	Brother TZE - 261	0
000058	Cetakan Kartu Servis Bahan Karton	0
000059	Cover Sarung Plastik Kartu Servis	0
	<b>BAHAN CETAK LAINNYA</b>	<b>0</b>
000002	Buku saku Pelaksanaan Anggaran (color)	0
000006	Agenda BKF	0
000015	Buku Laporan Tinjauan Ekonomi dan Fiskal Edisi I	0
000016	Buku Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 219/PMK.01/2017 tentang Penilaian Kompetensi Manajerial Melalui Assesment Center di Lingkungan Kementerian Keuangan	0
000017	Kartu Nama Pegawai/Pejabat	0
000018	Stiker BMN (Besar)	0
000019	Kartu BMN (Sedang)	0
000020	Kartu BMN (Kecil)	0
000021	Dummy buku KEM dan PPKF 2019	0
000022	Buku KEM dan PPKF 2019	0
000023	Buku Pidato Menteri Keuangan dan Pengantar KEM dan PPKF 2019	0
000024	Cetak Pidato dan Tanggapan Pemerintah Atas Pandangan Fraksi DPR RI KEM PPKF 2019	0
000025	Laporan Tinjauan Ekonomi dan Fiskal Edisi II	0
000026	Kartu Ucapan Kepala BKF	0
000027	Piagam (November 2018)	0

000028	Pencetakan Label Arsip BKF	0
000029	Laporan Tinjauan Ekonomi dan Fiskal Edisi III	0
000030	Laporan Tinjauan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Edisi IV	0
000031	Buku Laporan Tinjauan Ekonomi dan Fiskal Edisi I 2019	0
000032	Rumah ID Card	0
000033	Paket Pencetakan 20 box kartu nama 125 rumah id card 100 tali idcard dan 8 plat stainless lift	0
000034	RFID Card Tipis	0
000035	Gantungan ID Card Yoyo Cetak Logo Kemenkeu	0
000036	Kalender Dinding 2021	0
000037	Buku Agenda 2021	0
000038	Cover KEM - PPKF 2022	0
000039	Pidato KEM PPKF 2022	0
000040	Kartunama Desember 2021	0
	<b>PITA PRINTER</b>	
000006	Carbon Film White Board Electric	6
000007	Label Barcode Brother TZE - 231	9
000008	Label Barcode Brother TZE - 251	5
000009	Label Barcode Brother TZE - 261 Black on White	23
000010	Label Barcode Brother TZE - 261 Strong Adhesive	0
000011	Label Barcode Brother TZE - 251 Black on White 24mm	20
000012	Polaroid Ribbon ID Card Printer	1
000013	Label Barcode Brother TZE - 221	9
	<b>TINTA/TONER PRINTER</b>	
000011	Toner Laser HP Q 5949 A	0
000012	Toner Laser HP Q 6511 A	0
000023	Toner Deskjet HP CBI 15	0
000024	Toner Cartidge Panasonic KX-FA 83	0
000030	Toner Fuji Xerox 203/204	0
000031	Toner Fuji Xerox 3428	10
000041	Toner HP CB 436 A	0
000047	Toner HP H470 b Colour (no. 98)	0
000048	Toner HP H 460 Black (No. 94)	0
000049	Toner HP H 460 Colour (No.95)	0
000057	Toner Samsung ML-2850 Series	13
000069	Toner Samsung 670 ND Cyan	0
000070	Toner Samsung 670 ND Magenta	0
000071	Toner Samsung 670 ND Yellow	0
000086	Toner HP Black 507	0
000087	Toner HP Cyan 507 A	1
000088	Toner HP Yellow 507 A	0
000089	Toner HP Magenta 507 A	0
000090	Toner HP CE278A	0
000091	Toner HP Laserjet Pro 400 CF 280 A	4
000092	toner HP CE285 A	2
000093	toner HP CE 400A black	0
000094	toner HP CE 401 A cyan	0
000095	toner HP CE 402 A yellow	0

000096	toner HP CE 403A magenta	0
000097	toner HP Laserjet CF 283A black	4
000098	toner fax kx mb 2235 panasonic KX FAT431E	0
000099	toner samsung K609 black	2
000100	Toner samsung k 609 magenta	5
000101	Toner samsung k609 yellow	4
000102	toner samsung K609 cyan	1
000103	Toner HP 410A black	9
000104	Toner HP 410A cyan	8
000105	HP 410A yellow	8
000106	HP 410A magenta	8
000107	Toner HP cartridge 26A black	18
000108	Toner HP 62 black cartidge	3
000109	Toner HP 62 tri color ink cartridge	3
000110	Toner fax panasonic KX FAT 421E	10
000111	Drum fax panasonic KX FAD422E	13
000117	Toner Samsung MLT-D205L	1
000118	Samsung Toner CLT- K508L Black	5
000119	Samsung Toner CLT- C508L Cyan	6
000120	Samsung Toner CLT - M508L Magenta	6
000121	Samsung Toner CLT - Y508L Yellow	5
000122	Toner HP CF226A	0
000123	Toner HP Laserjet CF410X Black	2
000124	Toner HP Laserjet CF 411X Cyan	0
000125	Toner HP Laserjet CF412X Yellow	0
000126	Toner HP Laserjet CF 413X Magenta	1
000127	Tinta HP 62 Black New	5
000128	Tinta HP 62 Color New	0
000129	Toner HP CE285A	0
	<a href="#">USB/FLASH DISK</a>	
000006	USB Flashdisk 8 GB	0
000007	USB Flashdisk 16 GB	0
000008	usb 32gb	0
000011	Flash Disk 16 GB*	0
000013	Sandisk Ultra Flair 32GB USB Flashdisk	0
000014	USB Flashdisk Merk SANDISK 8GB	109
	<a href="#">CD/DVD</a>	0
000001	CD-R	0
000002	CD-R Verbatin 700 Mb	0
	<a href="#">BAHAN KOMPUTER LAINNYA</a>	
000001	Drum Fax Panasonic KX-FA84	12
000002	DVD-R 1-2x2,8 GB Verbatim	0
000004	Fax Thermal Paper 210mmx30m	50
000007	Label CD Colour	0
000008	CD-R	0
000012	Karbon Fax Panasonic	58
000015	Drum Xerox 204	0
	<a href="#">SAPU DAN SIKAT</a>	0



000002	sapu ijuk	0
000003	kain mop	0
000004	sikat tangkai toilet	0
000005	Kuas Cat	0
000006	Sikat Pencuci Botol	0
	ALAT-ALAT PEL DAN LAP	0
000001	Kain Pel Biru	0
000003	kain lobby duster	0
000005	kain microfiber	0
	EMBER, SLANG, DAN TEMPAT AIR LAINNYA	0
000001	Ember Plastik	0
000002	Air Galon	0
	KESET DAN TEMPAT SAMPAH	0
000001	Keranjang Sampah	0
000002	Trash Bag	0
	ALAT PENGIKAT	
000002	Tali Plastik	0
000004	Tali Rafia 1 kg	53
	BAHAN KIMIA UNTUK PEMBERSIH	
000001	Pembersih Kaca (Clear)	0
000004	Sabun Cuci Tangan	0
000006	Sabun Sunlight Cair	0
000007	deterjen rinso	0
000008	glass cleaner	0
000009	karbol	0
000010	multi purpose cleaner	0
000011	shine up	0
000013	waxtrip	0
000014	hand soap	1
000015	hazz bubuk pembersih	11
000016	plastik sampah	0
000017	hand paper towel	0
000018	pad putih	4
000020	semir lantai/granit	0
000021	lobi rejo	0
000022	pel mop	0
000024	pengki	0
000025	sapu nilon	0
000026	kanebo	0
000028	floor pel	0
000029	pad merah	2
000032	metal shine	0
000033	go getter/boul getter	0
000038	foor polisher machine	0
000041	masker	0
000042	sarung tangan bintik	0
000044	forward	0
000045	lobby duster	0

000048	tinier	0
000049	pembersih jamur kaca kripton	0
000050	furniture polish	0
000051	Tissue Roll Merek See U	0
000052	Kain Mob	36
000053	Sikat Tangkai Toilet	0
000054	Baygon Aerosol 600ml	56
000055	Plastik Sampah 90 x 120	0
000056	Sabun Bubuk Serba Guna Cleaning Powder 650	0
000057	Spons Cuci Piring 3M Scotch Brite 3x4 in	0
000058	Ember Pail 4 + tutup	0
000059	Plastik Sampah 90 x 120 pack isi 6	0
000060	Ember Pail 4+ tutup merek Lion	0
000061	Pad Merah pcs	0
000062	Hand Paper Towel Merek See U	0
000063	Sunlight Pouch 755ml	100
000064	Minyak Kayu Putih 210 ml	0
000065	Ember Plastik pakai tutup merk LIONA	0
000066	Hand Sanitizer 500ml dan Bracket	0
000067	Masker Sensi Headloop	0
000068	Masker IBS Earloop	0
000069	Refill Hand Sanitizer Merk Onemad	0
000070	Refill Handsanitizer Merk Jhonson 2 liter	0
000071	Dispenser Sabun/Sanitizer	0
000072	Sarung Tangan Latex Sensi	0
000073	Stiker Label A3 Warna	0
000074	Stiker A3 This Area is Regularly Sanitized	0
000075	Tempat Tisu Kayu	0
000076	Tissue Roll Merek See U New	0
000077	Masker Sensi Earloop 2	45
000078	Masker Sritex Non Medis	0
000079	Refill Hand Sanitizer Jhonson 2	0
000080	Disinfektan XYZ 5 L	0
000081	Sarung Tangan Latex	0
000082	Disinfectan Merek Snap	0
000083	Spray Air dan Surface Merek Saniter 400ml	48
000084	Hand Paper Towel Merek See U Dus	0
000085	Tissue Roll Merek See U Dus	4
000086	Shine Up Miller	1
000088	Floor Cleaner Merek Miller	9
000089	Glass Cleaner Merek Miller	7
000090	Gow Getter Merek Miller	0
000091	Karbol Merek Miller	13
000092	Masker Duckbill Merek Sensi	0
000093	Hand Sanitizer Spray 55 ml Merek Antis	0
000094	Disinfectan Merek Diversey	4
000095	Sanitizer Gel Merek Onemed	8
000096	Handsoap 5 Lt JBE	6

000097	Floor Cleaner 5 Lt JBE	15
000098	Soda Api JBE	6
000099	Gow Getter Merek Jhonson	9
000100	Sarung Tangan Kebersihan	23
000101	Bubuk Kristal Marmer Italy	4
000102	Cairan Pembersih Kulit Sofa/Jok merk EZCLEAN	3
000103	Racun Semut	0
000104	Tempat Handsoap Merk Krisbow	0
000105	Tempat Sampah Injak Shinpo	1
000106	Sikat Toilet Gagang	5
000107	Ember Tutuo 12 Liter Merk Shinpo	6
000108	Long Stick Wiper 3 meter	4
000109	Squeege 35 cm	0
000110	Tempat Sampah 120 Liter	0
000111	Kemoceng Wiks	0
000112	selang serat	0
000114	Kabel Roll 50 Meter merek Kaiser	0
000115	Sapu nylon + Pengki Nagata	3
000116	Mop Set	5
000117	Bayfresh Aerosol Pengharum Ruangan	57
000118	Rinso Sachet	0
000119	Polybag 60x100	1
000120	Kain Microfiber 30x30	0
000121	Kain Microfiber 40x60	0
000123	Botol Spray Asema 500ml	25
000124	Lobby Duster Uk.80 + Gagang	3
000125	Plas+Pelambung Closet duduk merek geberit	3
000126	Tempat Sampah Injak Merek Shinpo	0
000127	Plastik Mop Holder Biru	10
000128	Wifer Lantai Dragon	30
000129	Sikat Tangkai Dragon	8
000130	Window Washer Uk. 45	11
000131	Kain Mop Pel	0
000132	Sapu Lidi Tangkai	2
000133	Hand Sanitizer Antis 55ml	5
000134	Hand Sanitizer Antis 55ml 2	0
000135	Masker Sensi Convex 4Ply Earloop isi 20	0
000136	Masker Keuangan Nov 2021	4
000137	Masker Putih Nov 2021	0
000138	Hand Sanitizer Nov 2021	0
000139	Paket Health Kit Pencegahan Covid - 19 di BKF	0
000140	Tisu Handtowel Seuu Dus	0
000141	Teranova Marble	1
000142	Tissue Handtowel Tessa	20
000143	Polybag 60x100 Merek Laris	0
000144	Rinso Sachet Dus	0
000145	Steel Wool	4
000146	Mop Super Putih	0

000147	Furniture Polish 165k	0
000148	Vas Bunga	0
000149	Botol Sanitizer	0
	ALAT UNTUK MAKAN DAN MINUM	
000002	Tissue Halus (besar)	0
000003	Tissue Kasar	0
000005	Sendok Garpu	0
000006	mangkok	0
000007	Gelas Cover	0
000008	Gelas	0
000009	Cangkir	0
000010	Sendok Teh	0
000012	Nampan	0
000013	Sendok Makan	0
000014	Tempat Sendok	0
000018	Toples	0
000019	Tempat Tissue Bahan Kayu Pernis	0
000020	Tissu Halus (Kecil)	0
000024	baki stainles	0
000025	taplak	0
000026	tutup gelas (lusin)	0
000028	dispenser tissue hand towel	0
000029	Toples Besar	0
000030	Toples Kecil	0
000031	Bunga Imitasi	0
000032	Bed Sheet Kecil	0
000033	Bed Sheet Besar	0
000034	Sendok Snack	0
000035	Jepitan Kue	0
000036	Gelas Gobled Luminar	0
000037	Cangkir Indo Keramik	0
000038	sendok the doll	0
000040	Sendok Service	0
000041	centong nasi	0
000042	kantong plastik	0
000043	gelas kopi motif	0
000044	piring plastik	0
000045	Serbet Makan	0
000046	Gelas Minum	0
000047	Gelas Besar Tangkai	0
000048	Piring Makan	0
000049	Dispenser Kaca	0
000051	Piring JM	1
000052	Toples Kue Rapat	0
000053	Toples DLXS	0
000054	Army	0
000055	Tissue Makan	0
000056	Tissue Plenty SP Green	0

000057	Mangkok Bubur 5.5B	0
000058	Bed Sheet 400rb	0
000059	Sendok Makan 70rb	0
000060	Vas Bunga	0
000061	Bed Sheet dan Alat untuk Makan dan Minum	0
000062	sarung kursi pesta (warna hitam)	0
000063	Taplak Meja Pesta	0
000064	Pitcher Air	0
000065	Rak Piring Dapur	0
000066	Coaster Tatakan Gelas Bulat Bahan Tissue	0
000069	Rak Sepatu	0
000070	Gantungan Mukena	0
000071	Topless Snack Corner	0
000072	Beverages Dispenser	0
000073	Cangkir Indo BST 2020	0
000074	Piring Snack Indo 2020	0
000075	Gelas Gobled Luminarc 2020	0
000076	Mangkok 5.5 2020	0
000077	Sendok Makan 2020	0
000078	Garpu Makan 2020	0
000079	Sendok Teh 2020	0
000080	Garpu Kecil 2020	0
000081	Taplak Meja 2020	0
000082	Toples Snack Corner 2020	0
000083	Toples Snack Corner Sedang 2020	0
000084	Tempat Gule, Teh, Kopi 2020	0
000085	Snack Storage Jar (Japitan Snack) 2020	0
000086	Tempat Snack Storage Jar 2020	0
000087	Nampan Anti Selip 2020	0
000088	Utensul Holder Rund White (tempat japitan snack) 2020	0
000089	tempat sampah 2020	0
000090	Piring Keramik Oval 2020	0
000091	Tempat Buah 2020	0
000092	Toples Snack Sedang 2020	0
000093	Tissue Facial Paseo	6
	<b>PENGHARUM RUANGAN</b>	
000003	Pengharum Ruangan	0
000004	Bayfresh Aerosol 320ml	4
	<b>PERABOT KANTOR LAINNYA</b>	
000003	Obat Nyamuk Spray	0
000019	Prisma Mika Nama	0
000020	Tempat Brosur Bahan Mika 4 Tingkat	1
000023	Payung Ukuran Besar+ Cetak Sablon	0
000024	Keranjang Payung	0
000025	Senter LED Charger	1
000026	Gembok Pintu	1
000027	APD (Hazmat, Helm, Kacamata, Sepatu Boot, dan Masker)	2

	BATU BATERAI	
000002	Batu Baterai Kecil (AA)	0
000003	Batu Baterai AAA	0
000004	Batu Baterai 9 Volt	323
000005	energizerAA	0
000007	Baterai Energizer 23A (PAK)	10
000008	Batu Baterai AA Alkaline ABC	48
000009	Baterai AAA Alkaline ABC	158
	PERLENGKAPAN DINAS LAINNYA	0
000001	Baju Kerja Lengan Pendek Petugas Kebersihan	0
000002	Baju Batik Lengan Pendek Petugas Kebersihan	0
000003	Celana Panjang Petugas Kebersihan	0
000004	Pakaian Kerja Sopir dan Pramubakti	0
000005	Baju Kerja Lengan Pendek 2020	0
000006	Baju Batik Lengan Pendek 2020	0
000007	Celana Panjang 2020	0
	PERSEDIAAN BERUPA ALAT/BAHAN LALU LINTAS	0
000001	Post It Sign Here	0
	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	
000002	Kardus Penyimpanan Arsip Besar (Inaktif)	0
000003	Box Arsip Standar Arsip Nasional	0
000004	Map Folder Standar Arsip Nasional	6,000
000005	Pembatas Arsip Standar Arsip Nasional	0
000006	Kardus Penyimpanan Arsip Kecil (Aktif)	1,900
000007	Name Card Holder	0
000011	Akrilik Nomor Ruangan	0
000012	Plat Stainless Ruang Rapat	0
000013	Plat Ruang Kepala Pusat	0
000014	Logo Kemenkeu	0
000016	Plat Stainless Nama Ruangan	4
000017	Box Arsip Bertuliskan Badan Kebijakan Fiskal	0
000018	Kartu Nama Pegawai/Pejabat BKF	0
000019	Akrilik Tempat Kartu Tamu	0
000020	Sandblast Ruang Kerja SDM	0
000021	Baygon Aerosol Flower Garden 600ml	70
000022	Tissue Paseo Smart Facial 250 2PLY	0
000023	Minyak Kayu Putih 210 ml Cap Lang	0
	PITA CUKAI, MATERAI, LEGES	0
000001	Materai	0

Petugas Persediaan

Mufti Kandaga Abidin

MATRIKS TINDAK LANJUT TEMUAN BA 015 BADAN KEBIJAKAN FISKAL TA 2021 AUDITED

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	UIC	Tindak Lanjut	Status
1.	Rumah Negara di Kemanggisan yang dikuasai Pihak Ketiga	<p>a. BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar,</p> <p>b. Membina Kuasa Pengguna Barang untuk mengelola dan mengamankan aset negara secara memadai sesuai ketentuan yang berlaku,</p> <p>c. Melakukan upaya-upaya untuk menertibkan aset yang dikuasai pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku,</p> <p>d. Segera memproses pengajuan sertifikasi tanah dan berkoordinasi dengan ke BPN untuk penerbitan sertifikat tanah,</p> <p>e. Membuat aturan dan mekanisme tentang</p>	BKF, Biro Perlengkapan Setjen, DJP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tanggal 26 Juni 2019 BKF telah mengirimkan Nota Dinas Kepada Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Nomor ND-594/KF.1/2019 terkait Usulan Pengalihan Status Rumah Dinas.</li> <li>• Pada tanggal 16 Juli 2019 Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Setjen mengirimkan ND nomor ND-1705/SJ.7/2019 yang memberitahukan bahwa usulan pengalihan status rumah Negara tidak dapat diproses lebih lanjut.</li> <li>• Pada tanggal 02 Juni 2021, BKF telah mengirimkan</li> </ul>	Dialihkan ke DJP

		<p>penghapusan aset tak berwujud.</p>		<p>Surat Kepada Penghuni Rumah Negara (Bapak Suhadi Hadiwidjojo) Nomor S-67/KF.1/2021 hal Penertiban Penghunian Rumah Negara Golongan II di Lingkungan BKF. Pada Surat tersebut, BKF meminta penghuni rumah dapat memaklumi kondisi status Rumah Negara dan mengikuti ketentuan yang berlaku sehingga penghunian Rumah Negara dimaksud dapat sesuai dengan peruntukannya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pada tanggal 04 Juni 2021 Penghuni Rumah Negara (Bapak Suhadi) melakukan komunikasi melalui Telepon dengan Sekretaris BKF dalam rangka merespon Surat BKF Nomor S-</li></ul>	
--	--	---------------------------------------	--	--	--



				<p>67/KF.1/2021 hal Penertiban Penghunian Rumah Negara Golongan II di Lingkungan BKF.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menindaklanjuti hasil komunikasi dengan Bapak Suhadi, BKF mengirimkan Surat Nomor S-74/KF.1/2021 tanggal 10 Juni 2021 hal Koordinasi Lanjutan Penertiban Penghunian Rumah Negara BKF. Pada Surat tersebut, BKF menegaskan bahwa proses perubahan status Rumah Negara dari golongan II ke golongan III tidak dapat ditindaklanjuti.</li><li>• Berdasarkan hasil pembahasan pemantauan tindak lanjut (PTL) Semester II dengan BPK, status temuan tersebut akan</li></ul>	
--	--	--	--	--	--

				<p>dialihkan ke tingkat kementerian melalui matriks penyelesaian BMN yang dikoordinasikan oleh Biro Madan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Berdasarkan rapat koordinasi tindak lanjut penertiban rumah negara Badan Kebijakan Fiskal tahun 2022, diperoleh kesepakatan bahwa penertiban rumah negara akan dilakukan secara bertahap. Tahapan pertama adalah pengalihan kepemilikan rumah dari BKF kepada DJP. Tahapan selanjutnya adalah penertiban fisik yang dikoordinasikan oleh DJP.</li><li>• Berdasarkan Nota Dinas Menteri Keuangan Nomor ND-79/MK.1/SJ.7/2022</li></ul>	
--	--	--	--	--	--

				<p>tanggal 15 Maret 2022, Menteri Keuangan telah menyetujui pengalihan Penggunaan BMN dari BKF kepada DJP.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Persetujuan tersebut ditindaklanjuti dengan serah terima BMN dan perubahan pencatatan daftar barang pada BKF dan DJP.</li></ul>	
--	--	--	--	--	--

### Daftar SP2D Satker



TIDAK ADA FILTER 00542

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SELESAI SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	MATA UANG	RATE	TANGGAL RATE	NILAI SP2D EKUIVALEN	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI	CEK DETAIL AKUN	PILIH
1234	210191302021063	28-06-2021	28-06-2021	12,090,000.00	IDR	1	28-06-2021	12,090,000	NON GAJI	00542T/411880/2021	24-06-2021	NON GAJI	Pembayaran Belanja Jasa Profesi berupa Honorarium Narasumber Evaluasi Ruang Rapat Digital BKF tanggal 11 s.d 18 Juni 2021 berdasarkan ST nomor ST-440/KF.1/2021 tanggal 11 Juni 2021 (IKP)	<a href="#">Cek Akun</a>	<input type="checkbox"/>

PILIH MINIMAL 1 DATA SP2D SEBELUM MELANJUTKAN

### Daftar SP2D Satker

EXCEL PDF FILTER

TIDAK ADA FILTER 0179

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SELESAI SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	MATA UANG	RATE	TANGGAL RATE	NILAI SP2D EKV/VALEN	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI	CEK DETAIL AKUN	PILIH
69	210191701003622	27-12-2021	27-12-2021	0,00	IDR	1	27-12-2021	0	GTUP NIHIL	01799T/411880/2021	23-12-2021	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang (IKP)	<a href="#">Cek Akun</a>	<input type="checkbox"/>

## Daftar SP2D Satker

TIDAK ADA FILTER

00354

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SELESAI SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	MATA UANG	RATE	TANGGAL RATE	NILAI SP2D EKUIVALEN	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI	CEK DETAIL AKUN	PILIH
1416	210191301015328	06-05-2021	06-05-2021	18,084,125.00	IDR	1	06-05-2021	18,084,125	NON GAJI	00356T/411880/2021	05-05-2021	NON GAJI	Pembayaran Belanja Berang Non Operasional Lainnya berdasarkan Kwitansi nomor KWT-005/M5/BKF/2021 Tanggal 27 April 2021 (IKP)	<a href="#">Cek Akun</a>	<input type="checkbox"/>



### Daftar SP2D Satker

TIDAK ADA FILTER

00692

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SELESAI SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	MATA UANG	RATE	TANGGAL RATE	NILAI SP2D EKUIVALEN	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI	CEK DETAIL AKUN	PILIH
1112	210191302026156	28-07-2021	28-07-2021	3,150,000.00	IDR	1	28-07-2021	3,150,000	GUP	00692T/411880/2021	27-07-2021	NON GÁJI	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Berang (IKP)	<a href="#">Cek Akun</a>	<input type="checkbox"/>

### Daftar SP2D Satker



TIDAK ADA FILTER

0178

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SELESAI SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	MATA UANG	RATE	TANGGAL RATE	NILAI SP2D EKUIVALEN	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI	CEK DETAIL AKUN	PILIH
42	210191701003836	28-12-2021	28-12-2021	0,00	IDR	1	28-12-2021	0	GTUP NIHIL	01785T/411880/2021	27-12-2021	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang (IKP)	<a href="#">Cek Akun</a>	<input type="checkbox"/>

PILIH MINIMAL 1 DATA SP2D SEBELUM MELANJUTKAN



### Daftar SP2D Satker



TIDAK ADA FILTER

01800T

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SELESAI SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	MATA UANG	RATE	TANGGAL RATE	NILAI SP2D EKVIVALEN	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI	CEK DETAIL AKUN	PILIH
53	210101701003899	27-12-2021	27-12-2021	0.00	IDR	1	27-12-2021	0	GTUP NIHIL	01800T/411880/2021	24-12-2021	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang (IKP)	<a href="#">Cek Akun</a>	<input type="checkbox"/>

PILIH MINIMAL 1 DATA SP2D SEBELUM MELANJUTKAN